

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA
 BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR KABUPATEN TAHUN 2017-2019**

**BAB I
 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 28 November 2017 terjadi banjir bencana banjir yang diikuti dengan longsor di Kabupaten dengan wilayah terdampak banjir adalah 6 kecamatan 35 desa antara lain dengan dampak terparah di Kecamatan Pacitan sebagai muara sungai Grindulu yang meluap hebat akibat jebolnya tanggul di 23 titik termasuk di sungai lorog. Hal ini terjadi akibat adanya siklon tropis cempaka yang memicu anomaly curah hujan dengan intensitas diatas normal yaitu 383 mm/hari. Hal tersebut juga memicu terjadinya bencana longsor pada 176 titik longsor khususnya diwilayah perbukitan pacitan dengan sebaran wilayah terdampak ada 12 kecamatan dan 68 desa.

Bencana banjir di Kabupaten diperparah oleh naiknya muka air laut pada saat kejadian akibat pengaruh siklon cempaka dengan posisi di Tenggara Pacitan menyebabkan semua sungai yang bermuara di Samudera Hindia meluap hebat akibat tertahan oleh pasang naik air laut. Banjir terparah di wilayah perkotaan menyisakan kerusakan dan kerugian baik material dan non material. Terutama disepanjang aliran sungai grindulu dan jelok yaitu di Desa Sironoyo, Sukoharjo, Kayen, Sidoharjo, Kelurahan Ploso, Kembang, Kelurahan Baleharjo, Tanjungsari, Menadi, Mentoro dan Arjowinangun.



**Gambar 1.1
 Tampak Genangan banjir dan Dampak Kerusakan Akibat banjir**

Untuk bencana longsor di terjadi pada sebagian besar wilayah perbukitan . Hampir merata di 12 Kecamatan di terdapat titik longsor. Kondisi tanah yang labil dengan diperparah alih fungsi lahan khususnya diwilayah dengan morfologi perbukitan yang seharusnya merupakan wilayah dengan peruntukan hutan dan pertanian terbatas.



**Gambar 1.2
 Dampak Kerusakan Akibat Longsor**

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Perencanaan & IS2		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Dampak akibat bencana banjir dan longsor di mengakibatkan 25 Jiwa Korban Meninggal dunia dan 6.603 unit rumah rusak. Selain itu menyebabkan kerusakan pada fasilitas pendidikan, transportasi, Sumber Daya Air, Air bersih, Lahan pertanian dan Peternakan. Sehingga sejumlah layanan publik terganggu dan bahkan hampir seluruh wilayah kota Pacitan lumpuh dan terkepung banjir dan terisolir akses jalannya akibat longsor di beberapa titik. Terkait dampak bencana banjir dan longsor hingga tanggal 8 Desember 2017 dari data posko bencana 8.019 jiwa masih mengungsi. Penduduk yang mengungsi tersebut ada yang terpusat dan ada yang mandiri dan ditempatkan di fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di wilayah terdampak.



Gambar 1.3

Kerusakan Rumah Penduduk dan Fasilitas Umum Akibat Bencana Banjir dan Longsor di

Dikarenakan kondisi tersebut diatas, Bupati Pacitan menetapkan pernyataan status tanggap darurat bencana banjir, longsor dan bencana lainnya selama 7 hari yaitu mulai tanggal 27 November 2017, melalui Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/1188/KPTS/408.12/2017 tentang Penetapan Status Tanggap darurat penaganana bencana banjir dan bencana lainnya di tahun 2017.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir dan Longsor Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BPBD ; Bappeda , Perangkat daerah terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya yang difasilitasi BNPB melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi ini menetapkan:

1. Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan;
4. Identifikasi program/kegiatan dan anggaran pada setiap Perangkat Daerah yang dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Menetapkan sumber pendanaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat dalam dan luar negeri, negara lain, dan lain-lain yang sah); dan
6. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian banjir dan longsor, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksii pasca bencana, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan:

Paraf Hierarki	Asisten	PD Terkait
Sekda	Asisten	PD Terkait
Asisten Perencanaan & Pembangunan	Asisten	PD Terkait
Kabag Hukum	Asisten	PD Terkait

1. Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana;
2. Penentuan prioritas;
3. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
4. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
5. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Banjir dan Longsor Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka:

- a. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah Kabupaten, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana ;
- b. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan longsor yang disusun oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten ;
- c. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Banjir dan Longsor Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Keseragaman pemahaman dan persepsi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta unsur-unsur swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung dengan baik;
- b. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
- d. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- e. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
- f. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

1.3 Ruang Lingkup

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun

rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan pascabencana.

Sekda		
Asisten Perencanaan		
Kabag Hukum		
	PD Pemrakarsa	1
	PD Terkait	

Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah:

1. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
2. Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
4. Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan;
5. Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
6. Aspek lintas sektor yang antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir dan Longsor di Tahun 2017-2019 terdiri dari 6 (enam) Bab, antara lain :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di , maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Umum Wilayah

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Bab III Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Pascabencana

Bab ini menguraikan kronologi kejadian bencana, upaya penanganan darurat, hasil kajian akibat bencana yang terdiri dari penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian gangguan akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya risiko. Hasil kajian kebutuhan pemulihan yang dianalisis dalam lima sektor, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

Bab IV Prinsip dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bab V Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Aksi merupakan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan longsor di .

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pembantu Kepala		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

BAB II

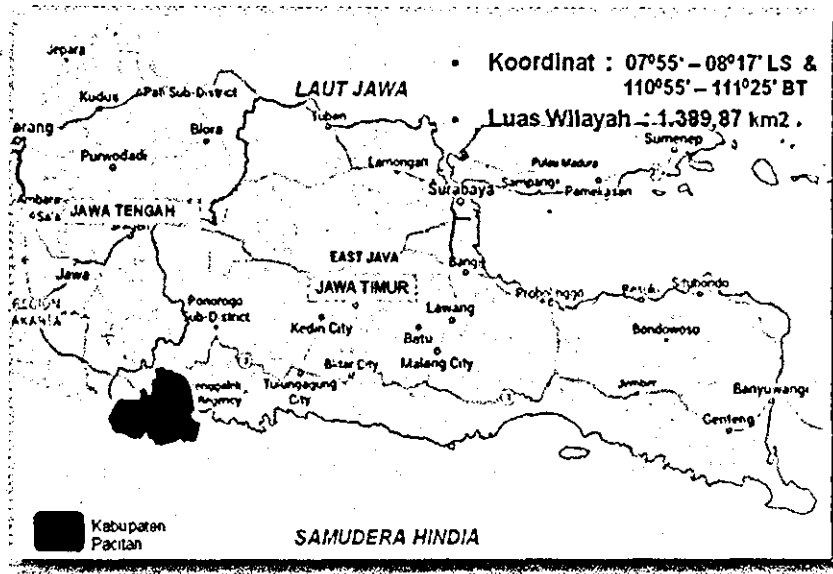
KONDISI UMUM WILAYAH

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Kondisi Fisika

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten memiliki letak geografis yang kurang menguntungkan dengan posisi di ujung paling barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dengan jarak 276 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Secara umum Kabupaten merupakan wilayah yang kompleksitas secara bentang lahan terdapat di Kabupaten Wilayah dengan topografi mulai pantai, dataran rendah hingga pegunungan.



Gambar 2.1.
Orientasi Wilayah Kabupaten

B. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten terletak di antara 07° 55'-08° 17' Lintang Selatan 110° dan 55'-111° 25' Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal.

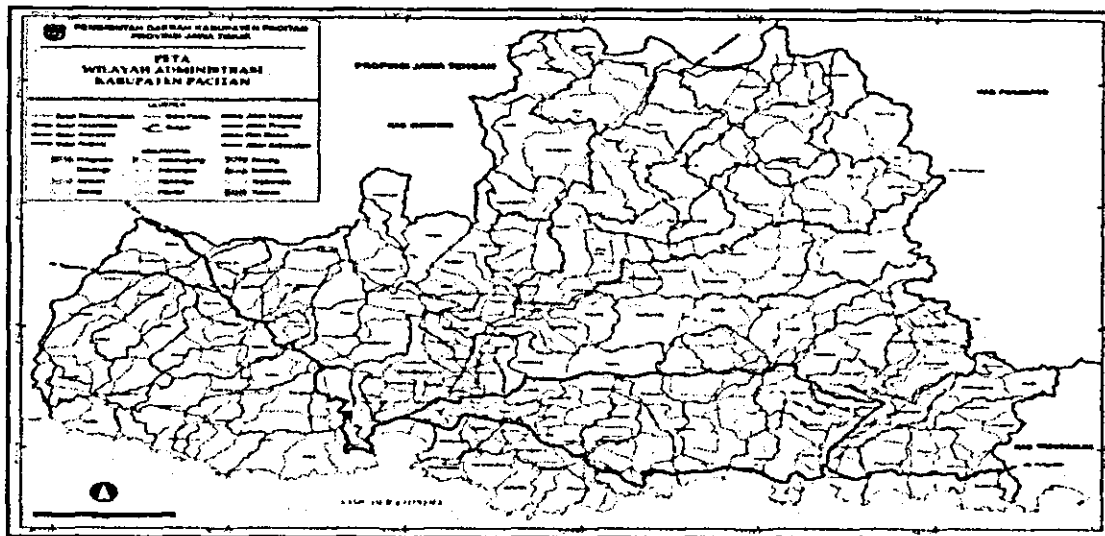
Batas wilayah Kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur)
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Secara administratif, Kabupaten terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,61 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,25 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro dengan luas 71,86 Km².

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Per. & Kera	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	



Gambar 2.2.
Peta Administrasi Kabupaten

Tabel 2.1

Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Tahun 2013

Kecamatan <i>Districts</i>	Desa <i>Village</i>	Kelurahan <i>Kelurahan</i>	RW <i>RW</i>	RT <i>RT</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010. Donorojo	12	-	110	356
020. Punung	13	-	168	364
030. Pringkuku	13	-	124	301
040. Pacitan	20	5	125	451
050. Kebonagung	19	-	175	413
060. Arjosari	17	-	140	405
070. Nawangan	9	-	128	431
080. Bandar	8	-	137	403
090. Tegalombo	11	-	146	506
100. Tulakan	16	-	203	541
110. Ngodirojo	18	-	148	435
120. Sudimoro	10	-	141	366
Jumlah / Total	166	5	1.745	4.972

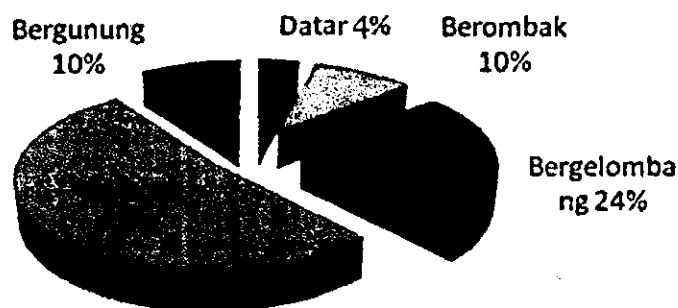
Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda & Seka	
Kabag Mukam	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

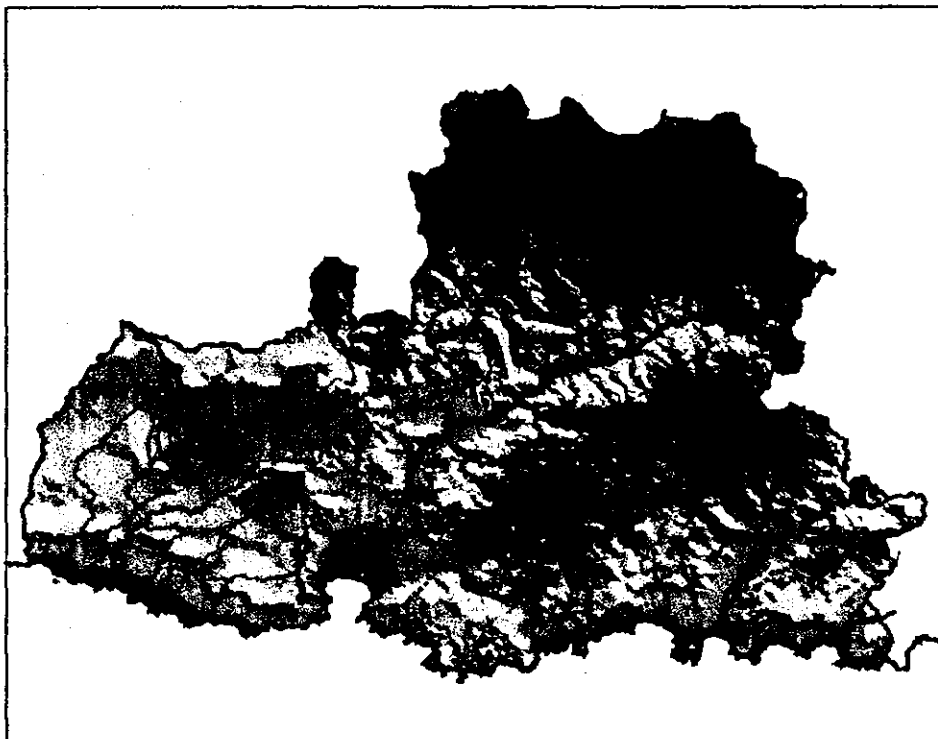
C. Kondisi Topografi

Topografis Kabupaten terdiri atas daerah pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi keberagaman potensi sumber daya alam yang ada. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut :

Keterangan	luas (km ²)	Persentase
Datar (0-5%)	55,59	4
Berombak (6-10%)	138,99	10
Bergelombang (11-30%)	333,57	24
Berbukit (31-50%)	722,73	52
Bergunung (>52%)	138,99	10



Melihat kondisi topografi Kabupaten yang sangat kompleks, maka secara geologi akan terkait dengan banyaknya potensi sumber daya alam berupa bahan tambang. Akan tetapi pada sisi lain beberapa permasalahan yang muncul akibat topografi yang kasar antara lain keterbatasan aksesibilitas, kerawanan terhadap bencana misalnya banjir, longsor dan gerakan tanah.



Gambar 2.3.
Kondisi Topografi Kabupaten

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pembantu Sekda		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

D. Kondisi Klimatologi

Di Indonesia terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selama tahun 2014, musim penghujan di Kabupaten terjadi pada bulan Januari-Juli dan bulan Nopember-Desember. Diantara bulan tersebut, hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan bulan Desember yaitu 25 hari hujan. Musim kemarau di Kabupaten terjadi pada bulan Agustus-Oktober. Bulan Desember mempunyai rata-rata curah hujan yang terbesar yaitu 23,80 mm³, sedangkan bulan dengan rata-rata curah hujan terkecil yaitu bulan Oktober sebesar 4,48 mm³. Air hujan ini mengalir melalui 3 sungai besar yang terdapat di Kabupaten yaitu Sungai Grindulu, Sungai Lorok dan Sungai Baksoka. Berikut adalah tabel banyaknya hujan bulanan, hujan harian maximum, hari hujan dan rata-rata hujan per bulan.

Curah hujan tahunan di Kabupaten paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm³, suhu udara berkisar antara 22,6°C sampai dengan 32,1°C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Tabel 2.2.






Banyaknya Hujan Bulanan, Hujan Harian Maximum, Hari Hujan dan Rata-rata Hujan Per Bulan Tahun 2014 Kabupaten

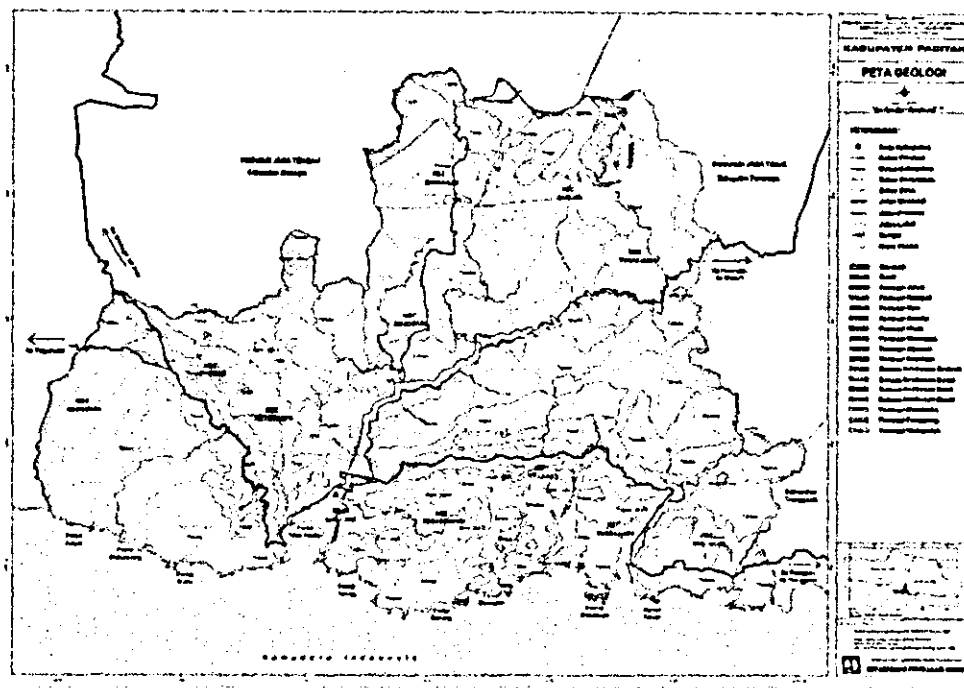
Bulan	Hujan Bulanan (mm)	Hujan Harian (Hari)	Hari Hujan	Hujan Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Januari	494,00	109,00	25,00	19,76
02 Februari	180,00	67,00	18,00	9,99
03 Maret	138,00	63,00	12,00	11,51
04 April	144,00	75,00	13,00	11,06
05 Mei	30,00	31,20	4,00	7,54
06 Juni	112,00	151,00	6,00	18,59
07 Juli	120,00	94,00	7,00	17,10
08 Agustus	14,00	28,00	2,00	6,98
09 September	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Oktober	4,00	11,00	1,00	4,48
11 November	248,00	163,00	13,00	19,08
12 Desember	595,00	236,00	25,00	23,80

Sumber: BPS Kabupaten, tahun 2015

E. Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Timur dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu dataran alluvial pantai, dataran antar perbukitan, perbukitan karst dan perbukitan denudasional, Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dan batuan gamping serta dataran alluvial dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan,

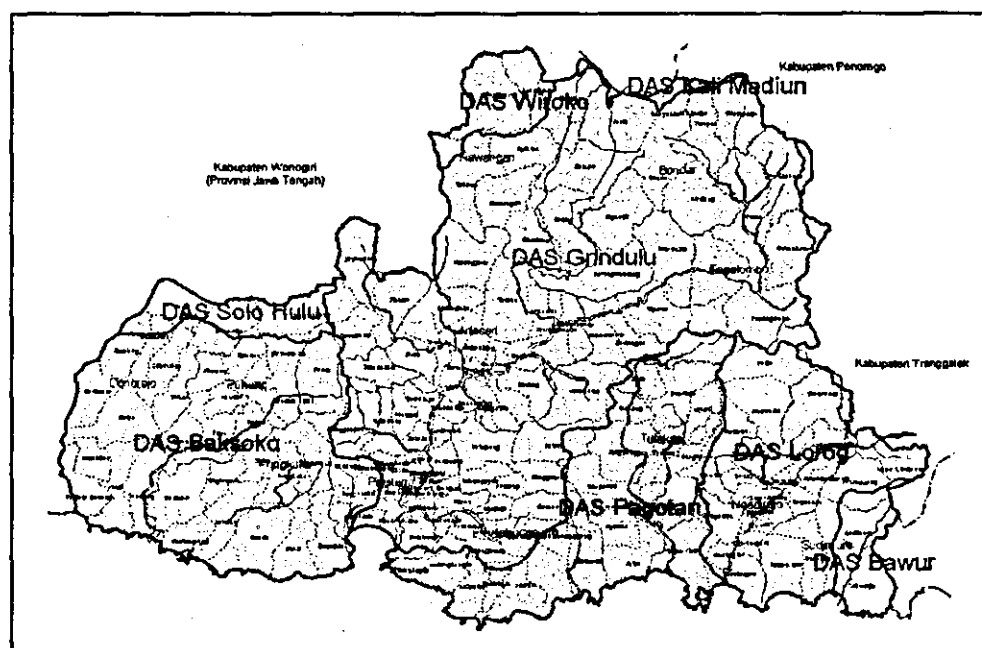
Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Perencanaan & KESD		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	



Gambar 2.4
Kondisi Geologi Kabupaten

F. Kondisi Hidrologi

Jumlah DAS di wilayah Kabupaten adalah 8 buah dengan 3 DAS utama yaitu Baksoko, Lorog dan Grindulu. Hidrologi di Kabupaten Terbagi beberapa kawasan yaitu kawasan Karst dengan kondisi air tanah dalam, kawasan perbukitan volkanik air tanah sedang, dan wilayah dataran aluvial dengan air tanah dangkal. Tipe sungai di Kabupaten mempunyai tipe *perennial* yaitu berair sepanjang musim, walaupun debitnya sangat kecil dimusim kemarau. Elevasi wilayah Kabupaten rata - rata antara 0 - 25 meter (selatan) dan 25 - 1000 meter (tengah dan utara).



Gambar 2.5.
Kondisi Hidrologi Kabupaten

Saraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Perencanaan & Kerja	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

G. Penggunaan Lahan

Tabel 2.3
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten
Tahun 2014

Kecamatan Districts	Tanah untuk Ba- ngunan House Compound	Tegal/ Huma Garden	Tan. Kayu- kayuan Trees	Hutan Rakyat, Kebun Public Forest	Hutan Negara State Forest	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
010. Donorojo	195,10	781,31	678,77	8.380,38	77,30	711,87	10.824,73
020. Punung	1aa,77	4.643,18	2.294,46	2.275,47	9,30	771,49	10.177,67
030. Pringkuwu	171,77	2.290,38	8.550,96	610,47	172,00	1.050,16	12.845,74
040. Poclton	310,55	1.693,72	2.637,21	782,70	299,50	780,68	6.504,34
050. Kebonagung	178,80	3.036,45	4.949,86	765,10	14,35	1.787,31	10.731,87
060. Arjosari	162,40	1.057,09	8.416,88	579,08	81,70	536,97	10.834,12
070. Nawangan	239,76	1.430,54	6.857,43	932,70	75,30	938,54	10.474,27
080. Bandar	283,02	2.688,02	1.179,57	4.586,56	409,40	910,22	10.056,79
030. Tegalombo	294,34	4.242,97	2.629,33	5.215,17	41,10	1.286,04	13.708,95
100. Tulakan	540,04	4.342,61	2.984,05	4.931,05	-	1.546,28	14.344,03
110. Ngadirojo	402,83	2.406,15	2.679,27	2.506,16	16,30	785,08	5.795,80
120. Sudimoro	190,95	1.278,15	1.355,99	3.404,13	15,00	426,37	6.673,59
Jumlah / Total	3.153,33	29.890,58	45.213,78	34.968,97	1.214,35	11.530,99	125.971,90

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten tentang sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi penting. Sektor yang memiliki keunggulan dan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang di Kabupaten. Potensi yang ada di wilayah Kabupaten secara umum dari berbagai komoditi tahun 2011 - 2015 sebagai berikut:

- Pertanian**, meliputi komoditi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, pisang, jeruk siam/keprok, janggolan, melinjo, jahe, kunyit, laos, temu lawak, kencur. Data produksi dan produktifitas komoditas pertanian unggulan di Kabupaten selama 5 (lima) tahun terakhir diuraikan pada aspek pelayanan umum urusan pilihan pertanian.
- Tanaman perkebunan**, meliputi komoditi kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, aren, nilam.
- Ternak**, meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras petelur dan itik/entok. Dari beberapa jenis ternak tersebut yang merupakan unggulan, data produksii peternakan di Kabupaten 5 (lima) tahun terakhir diuraikan pada aspek pelayanan umum urusan pilihan pertanian.
- Kehutanan**, meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono, bambu, dan gamelina.
- Energi dan Sumber Daya Mineral**, terdiri dari:
 - Batu bara**
 - Mineral logam**: timah putih, nikel, timah hitam, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir besi, batu besi.
 - Mineral bukan logam** : batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, fosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophyllit, fosil kayu, kalsedon/agate, kristal kuarsa, rijang, jasper.
 - Batuan** : ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/tanah liat.
- Pariwisata**:

Kabupaten memiliki banyak potensi wisata, baik wisata pantai, goa, maupun budaya. Berikut ini disajikan secara rinci.

Faraf Mierarki		
Sekda		
Asisten Perencanaan		
Kabag Hukum		

Asisten		
PD Pemrakarsa		
PD Terkait		

Faraf Mierarki		
Sekda		
Asisten Perencanaan		
Kabag Hukum		

Paraf Koordinasi		
Asisten		
PD Pemrakarsa		
PD Terkait		

Tabel. 2.5
Produksi Perikanan (ton) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi perikanan (ton)	6.244,07	7.006,49	9.275,32	9.338,57	11.692,87

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, tahun 2016

8. **Perdagangan :**

Aspek perdagangan didukung melalui ketersediaan Pasar Daerah, sejumlah 18 buah dengan rincian di masing – masing kecamatan sebagai berikut : Donorojo 1 buah, Punung 2 buah, Pringkuku 1 buah, Pacitan 4 buah, Arjosari 1 buah, Nawangan 1 buah, Bandar 2 buah, Tegalombo 1 buah, Tulakan 2 buah, Ngadirojo 2 buah dan Sudimoro 1 buah.






9. **Perindustrian :**

Potensi sektor perindustrian di Kabupaten disajikan sebagai berikut:

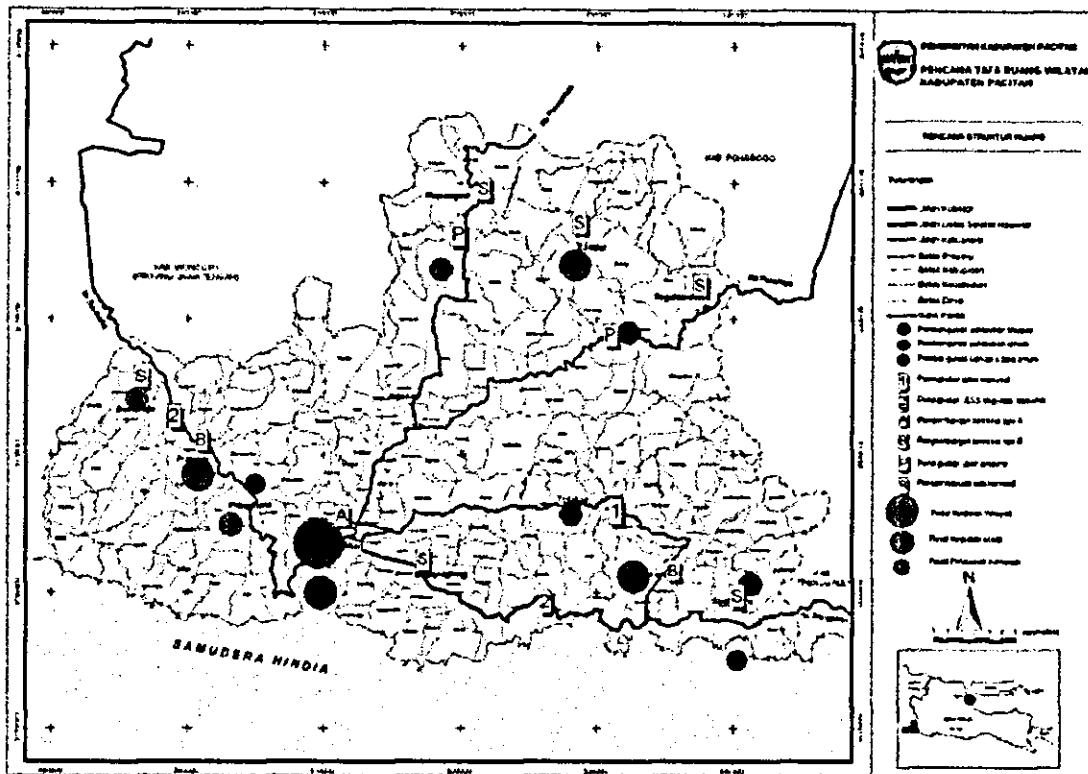
Tabel 2.6
Potensi Perindustrian Tahun 2011 – 2015
Kabupaten

No.	Uraian	Lokasi
1.	Batu Aji/Akik	Donorojo, Punung, Nawangan, Tulakan
2.	Gula merah	Kebonagung, Donorojo, Tulakan
3.	Keramik dan Gerabah Seni	Kebonagung
4.	Batik Tulis	Ngadirojo, Pacitan
5.	Batu Bata	Kebonagung, Pacitan, Ngadirojo
6.	Kapur Tohor	Kebonagung
7.	Industri Makanan Olahan	Pacitan, Ngadirojo, Tulakan, Arjosari, Tegalombo, Pringkuku, Punung
8.	Meubelair	Kec. Pacitan
9.	Anyaman bambu	Kec. Nawangan, Arjosari

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, tahun 2016

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Sekda		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Gambar 2.6.
Rencana Struktur Ruang Kabupaten



Kebijakan yang menjadi acuan dan tinjauan dalam penentuan kawasan strategis cepat tumbuh adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2010-2030, Master Plan Agropolitan Kabupaten, Rencana Detail tata ruang pada masing-masing kecamatan, rencana kawasan strategis, dan rencana kawasan perkotaan. Berdasarkan muatan pada kebijakan-kebijakan terkait tersebut, arahan pengembangan pada masing-masing kecamatan KSCD terpilih diarahkan sebagai berikut :

1. Kecamatan Pacitan

Kecamatan Pacitan memiliki fungsi diantaranya :

- Sebagai kecamatan dengan hirarki K-1, dengan fungsi sebagai PPW (Pusat Pelayanan Wilayah)
- Sebagai pusat permukiman perkotaan yang skala luas
- Pusat administrasi pemerintahan
- Sebagai pusat pelayanan sosial
- Pusat komunikasi antar kecamatan
- Pusat pengembangan wilayah belakang (seluruh wilayah Kabupaten)
- Sebagai sentra kegiatan sektor pariwisata, sektor industri makanan minuman dan peristirahatan, industri pengalengan ikan dan sektor pertambangan, serta sektor industri produksi batik tulis.

2. Kecamatan Bandar

Kecamatan Bandar memiliki fungsi diantaranya :

- Sebagai kecamatan dengan hirarki K-2 dengan fungsi sebagai PKL
- Sebagai sentra produksi dan kegiatan industri pertanian, pertambangan
- Sebagai kawasan strategis Agropolitan
- Sebagai pusat kegiatan agrowisata dan budaya

Paraf Hierarchy	
Sekda	
Asses. Per. & Kesa	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

3. Kecamatan Nawangan

Kecamatan Nawangan memiliki fungsi diantaranya :

- Sebagai kecamatan hirarki K-3 dengan fungsi sebagai PPK
- Sebagai pusat pengumpul
- Sebagai kawasan strategis agropolitan
- Sebagai sentra produksi pertambangan

4. Kecamatan Ngadirojo

Kecamatan Ngadirojo memiliki fungsi diantaranya :

- Sebagai kecamatan dengan hirarki K-2, dengan fungsi sebagai PKL
- Pusat Kegiatan pariwisata pantai, gua dan budaya
- Sebagai pintu gerbang timur untuk pengembangan pariwisata dibagian selatan Kab.Pacitan
- Sebagai sentra kegiatan perikanan dan kelautan (budidaya keramba), pertambangan dan sektor industri produksi batik tulis dan sale pisang

5. Kecamatan Punung

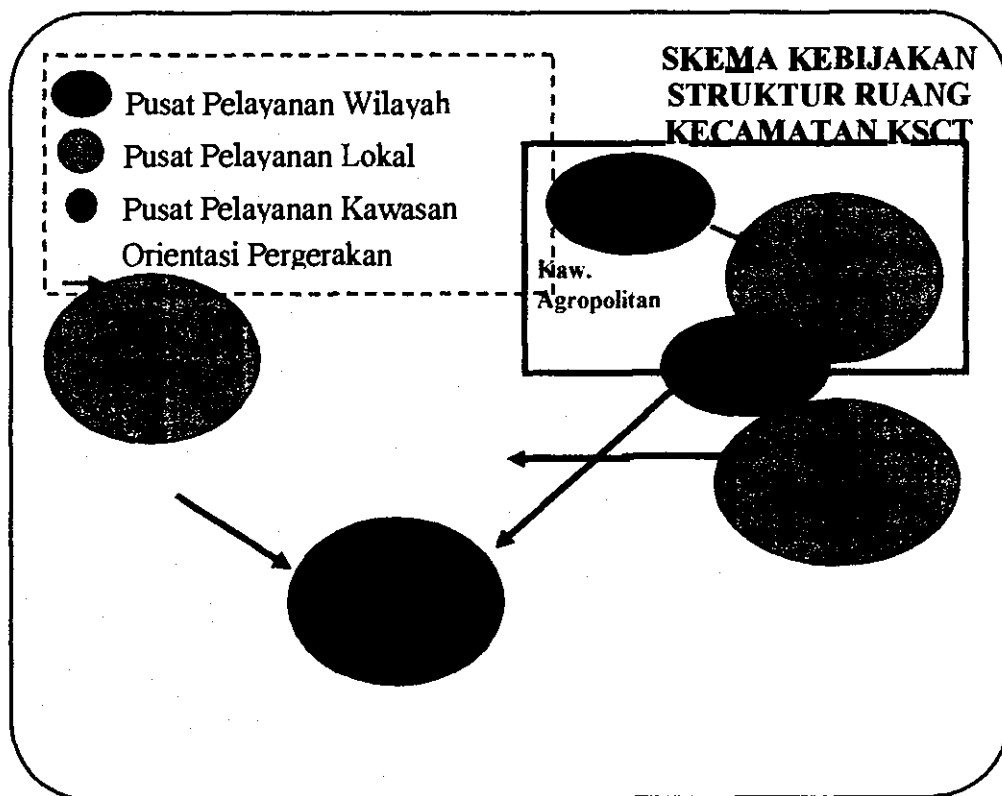
Kecamatan Punung memiliki fungsi diantaranya :

- Sebagai kecamatan dengan hirarki K-2 dengan fungsi sebagai PKL
- Sebagai pusat kegiatan pariwisata (pariwisata pawonsari)
- Sebagai pintu gerbang barat untuk kegiatan pariwisata bagian selatan Kabupaten
- Sebagai sentra kegiatan kelautan
- Sebagai sentra industri produksi mainan anak yang terbuat dari kayu jadi dan sentra produksi keramik/gerabah

6. Kecamatan Tulakan

Kecamatan Tulakan memiliki fungsi diantaranya :

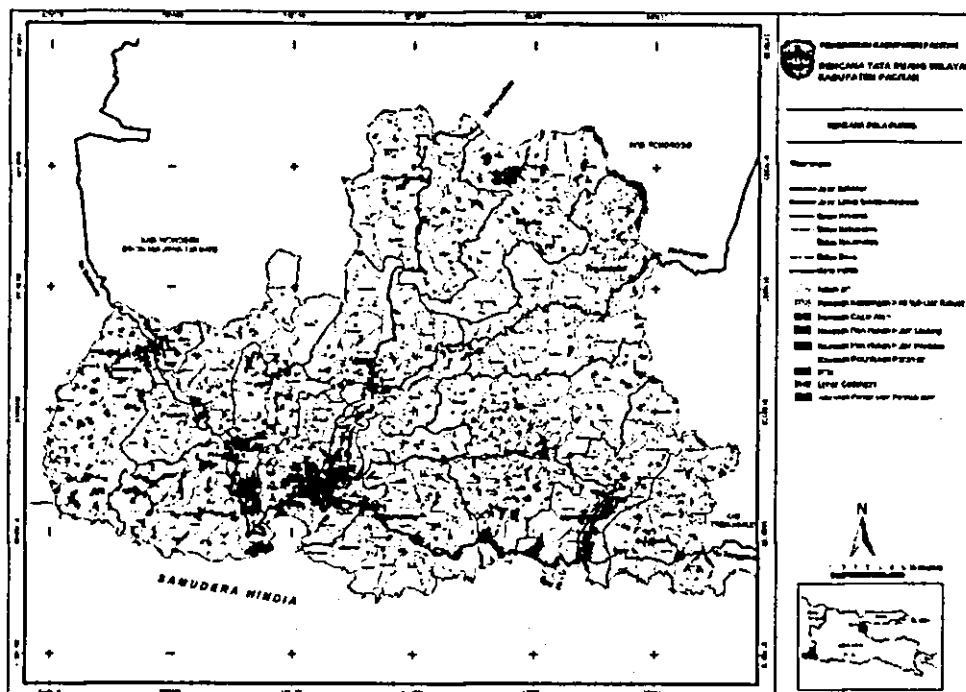
- Sebagai kecamatan dengan hirarki K-3 dengan fungsi sebagai PPK
- Sebagai sentra produksi pertanian dan pertambangan
- Sebagai pusat pengumpul



Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pen & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkalt	

Gambar 2.7 Skema Kebijakan Struktur Ruang Kecamatan KSCT Terpilih
 Sumber : RTRW Kab.Pacitan 2010-2030, diolah



Gambar 2.8 : Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten

2.1.2. Kependudukan

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten selama 5 Tahun terakhir disajikan dalam beberapa tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Desa, Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk, Rata-rata Penduduk Per Desa dan Kepadatan Penduduk Per Km² Tahun 2011-2014 Kabupaten

Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Penduduk	Rata-rata Penduduk Per Desa	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010. Donorojo	12	109,09	40.446	3.371	371
020. Punung	13	108,81	37.521	2.886	345
030. Pringkulu	13	132,93	31.977	2.460	241
040. Pacitan	25	77,11	76.537	3.061	993
050. Kebonagung	19	124,85	45.542	2.397	365
060. Arjosari	17	117,06	41.672	2.451	356
070. Nawangan	9	124,06	52.734	5.859	425
080. Bandar	8	117,34	46.017	5.752	392
090. Tegalombo	11	149,26	55.900	5.082	375
100. Tulakan	16	161,62	86.994	5.437	538
110. Ngadirojo	18	95,91	49.017	2.723	511
120. Sudimoro	10	71,86	35.119	3.512	489
Jumlah Tahun 2014	171	1.389,87	599.476	3.506	431
Tahun 2013	171	1.389,87	599.939	3.508	432
Tahun 2012	171	1.389,87	586.595	3.430	422
Tahun 2011	171	1.389,87	586.276	3.429	422

Fardus
 Sekda
 Asisten Per
 Desa
 Kabag
 Hukum

Perif Koordinasi
 Sumber Data Kantor Kecamatan Se Kabupaten, tahun 2015
 PD Terkait

Jumlah penduduk beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 sebesar 586.276 orang dan mengalami peningkatan menjadi 599.939 orang pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 599.476 orang. Kepadatan penduduk Kabupaten Tahun 2014 sebesar 431 jiwa/Km². Kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Pacitan sebagai ibukota kabupaten yang mencapai 993 jiwa/Km², hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk kecamatan lainnya yang hanya berkisar antara 241- 538 jiwa/Km².

Tabel 2.8
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2013-2014 Kabupaten

Kecamatan	Penduduk/Population		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
	2013	2014	2013-2014
(1)	(2)	(3)	(4)
010. Donorojo	40.776	40.446	-0,81
020. Punung	37.538	37.521	-0,05
030. Pringkulu	31.945	31.977	0,10
040. Pacitan	76.512	76.537	0,03
050. Kebonagung	45.481	45.542	0,13
060. Arjosari	41.338	41.672	0,81
070. Nawangan	52.578	52.734	0,30
080. Bandar	46.129	46.017	-0,24
090. Tegalombo	55.842	55.900	0,10
100. Tulakan	87.032	86.994	-0,04
110. Ngadirojo	49.213	49.017	-0,40
120. Sudimoro	35.555	35.119	-1,23
Jumlah	599.939	599.476	-0,08

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se-Kabupaten, tahun 2015

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada Tahun 2014 terdiri dari laki-laki sebesar 298.315 jiwa dan perempuan sebesar 301.161 jiwa. Laju penduduk dari Tahun 2013 ke 2014 sebesar -0,08.

Tabel 2.9
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Tahun 2011-2014 Kabupaten

Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Donorojo	19.757	20.689	40.446	95,50
2. Punung	18.469	19.052	37.521	96,94
3. Pringkulu	15.095	16.882	31.977	89,41
4. Pacitan	38.041	38.496	76.537	98,82
5. Kebonagung	23.216	22.326	45.542	103,99
6. Arjosari	20.843	20.829	41.672	100,07
7. Nawangan	26.388	26.346	52.734	100,16
8. Bandar	23.113	22.904	46.017	100,91

Paraf Kepala Kecamatan
Sekda
Asisten Per. & Kesra
Kabag Hukum

Paraf Koordinator
PD Pemrakarsa
PD Terkait

9. Tegalombo	27.772	28.128	55.900	98,73
10. Tulakan	43.636	43.358	86.994	100,64
11. Ngadirojo	24.416	24.601	49.017	99,25
120. Sudimoro	17.569	17.550	35.119	100,11
Jumlah Tahun 2014	298.315	301.161	599.476	99,05
Tahun 2013	298.053	301.886	599.939	98,73
Tahun 2012	291.550	295.045	586.595	98,82
Tahun 2011	291.498	294.778	586.276	98,89

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten, tahun 2015

2.1.3. Kondisi Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik

A. Jaringan Jalan

Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) pada tahun 2011 sepanjang 335.160 m dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 sepanjang 448.091 m. Berikut adalah tabel panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) dari tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.10
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik > 40 Km/Jam (m)
Tahun 2011 - 2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	335.160	337.660	363.554	435.763	448.091

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten, tahun 2016

B. Sumber Daya Air

Luas sawah beririgasi kabupaten dalam kondisi baik pada akhir tahun 2015 sebesar 4.489 Ha. Kondisi ini meningkat 5,70% dari tahun sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 telah mengalami peningkatan sebanyak 25,15%. Berikut adalah tabel luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.11
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	3.587	3.600	4.237	4.247	4.489

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten, tahun 2016

C. Permukiman

Capaian kinerja luas permukiman pada tahun 2011 mencapai 13.323,75 Ha mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 14.357,73 Ha. Berikut adalah tabel luas permukiman Kabupaten tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.12
Luas Permukiman (Ha) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Permukiman	13.323,75	13.496,08	13.668,41	14.013,07	14.357,73

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten, tahun 2016

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten
Asisten Perencanaan	PD Perencanaan
Kabag Hukum	PD Terkait

Capaian kinerja lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2011 mencapai 0,0% mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan

tahun 2015 mencapai 0,057. Berikut adalah tabel lingkungan pemukiman kumuh Kabupaten tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.13
Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Lingkungan Pemukiman Kumuh	0,07	0,067	0,061	0,059	0,057

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten, tahun 2016

D. Penataan Ruang

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30%. Indikator ini dihitung dengan menghitung luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB.

Tabel 2.14
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah berHPL/HGB	35,26	35,43	35,94	36,40	36,70

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten, tahun 2016






Indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2011 mencapai 35,26 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 36,70.

Tabel 2.15
Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Ditertibkan
Tahun 2011-2015 Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Ditertibkan	52	85	101	166	181

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten, tahun 2016

Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang ditertibkan pada tahun 2011 terdapat 52 rekomendasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 181 rekomendasi.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Perencanaan & Kerja		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Tabel 2.16
Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Dihasilkan Tahun 2011-2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan	0	0	1	2	4

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten, tahun 2016

Jumlah dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan pada tahun 2011 belum terdapat dokumen yang diciptakan, tetapi mengalami peningkatan hingga tahun 2015, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 4 dokumen. Lebih lanjut, disajikan juga informasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. RTH publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan umum. Indikator penyediaan RTH Publik adalah persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Tabel 2.17
Persentase RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Kawasan
Perkotaan Tahun 2011-2015 Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	11,1	13,4	15,7	18	19,2

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten, tahun 2016

b. Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan

Capaian kinerja rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan pada tahun 2011 mencapai 68,91 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 71,72 dengan rata-rata kenaikan 3,78% setiap tahunnya. Berikut adalah tabel rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten :

Tabel 2.18
Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	68,91	69,15	69,44	69,81	71,72

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten, tahun 2016

2.1.4. Energi

Capaian kinerja jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2011 mencapai 84.067 rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 133.678 rumah tangga. Berikut adalah tabel rumah tangga pengguna listrik Kabupaten tahun 2011 - 2015 :

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	[Signature]	Asisten _____	[Signature]
Asisten Perencanaan & Kesa	[Signature]	PD Pemrakarsa	[Signature]
Kabag Hukum	[Signature]	PD Terkait	

Tabel 2.19
Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Tangga Pengguna Listrik	84.067	94.050	116.550	123.613	133.678

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten, tahun 2016

2.1.5. Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah media yang digunakan untuk komunikasi oleh masyarakat, antar masyarakat dan lembaga pemerintah. Jaringan komunikasi dihitung berdasarkan jumlah kelompok informasi masyarakat yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Tabel 2.20
Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Jaringan Komunikasi	34	171	108	88	118

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, tahun 2016

Jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten pada tahun 2011 telah tersedia sebanyak 34 jaringan, meningkat menjadi 171 jaringan pada tahun 2012, namun dalam perkembangannya pada tahun 2013 telah dilakukan koreksi sehingga terjadi perubahan pada indikator capaian jumlah jaringan komunikasi yang berorientasi pada kelompok informasi masyarakat dan menara yang ada, oleh karena itu pada tahun 2014 diadakan penertiban dan pembinaan sehingga diperoleh 88 menara yang telah berizin. Dan pada tahun 2015 yang mengurus perizinan sudah mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2015 diperoleh 118 kelompok informasi masyarakat dan menara.

b. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, *feature*, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Indikator kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal pada tahun 2011 mencapai 3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 mencapai 5. Data selengkapnya disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.21
Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	3	3	3	3	5

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, tahun 2016

Struktur Organisasi		Parat Koordinasi	
Sekda	1	Asisten	2
Assan Per. & Desa	1	PD Pemrakarsa	1
Kabag Hukum	1	PD Terkait	

c. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Indikator kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal pada tahun 2011 mencapai 6, mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 28. Dari data tersebut yang telah memiliki Izin Penyiaran Publik (IPP) sejumlah 6 yang terdiri dari 5 Radio Siaran dan 1 TV lokal. Sedangkan lainnya masih dalam tahap proses perijinan/pembinaan. Berikut adalah tabel jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.22
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6	19	20	20	28

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, tahun 2016

2.1.6. Pendidikan

a. Pendidikan Dasar

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. APS SD/MI tahun 2015 dengan kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,99%, dan APS SMP/MTs dengan kelompok umur 13-15 tahun sebesar 90,07%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 0,01% anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Jumlah anak umur Sekolah Dasar yang tidak bersekolah tersebut tetap selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya, anak umur Sekolah Menengah Pertama yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 9,93%. Sehingga ini memberikan gambaran bahwa tugas pemerintah masih cukup berat untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun di masa datang.

Indikator angka partisipasi sekolah kelompok usia 7-12 tahun pada awal periode tahun 2011 adalah 100,57%. Indikator ini selalu mencapai target setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 99,99%. Indikator angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun pada awal periode tahun 2011 adalah 86,22%. Indikator ini selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 90,07%. Berikut adalah tabel Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

Angka Partisipasi Sekolah (%)	2011	2012	2013	2014	2015
Kelompok usia 7 - 12 tahun	100,57	99,99	99,99	99,99	99,99
Kelompok usia 13 - 15 tahun	86,22	88,33	89,17	89,95	90,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Perencanaan & Kerja		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Tabel 2.24

**Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten**

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Sekolah SD	420	417	417	416	416
Jumlah Sekolah MI	104	104	103	104	107
Jumlah Sekolah SD/MI	524	521	520	520	523
Jumlah Sekolah SMP	77	69	71	72	72
Jumlah Sekolah Mts	38	47	51	51	51
Jumlah Sekolah SMP/MTs	115	116	122	123	123
Penduduk Usia SD/MI (7-12 tahun)	48.472	46.710	45.654	44.591	44.608
Penduduk Usia SMP/MTs (13-15 tahun)	26.960	27.316	27.188	25.962	25.269
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	108,10	111,54	113,90	116,62	117,24
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	42,66	42,47	44,87	47,38	48,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

Melihat tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pendidikan dasar Kabupaten sampai tahun 2015 tercatat perkembangannya cenderung meningkat, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia SD dan SMP dapat diimbangi dengan penambahan jumlah sekolah pendidikan dasar.

3. Rasio Guru / Murid

Rasio guru/murid bertujuan untuk menilai ketersediaan pengajar, selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk setiap guru. Rasio guru/murid dapat dilakukan perhitungan untuk mencapai standar kualitas pendidikan yang baik. Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah tabel rasio guru terhadap murid untuk pendidikan dasar pada Kabupaten dengan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

**Tabel 2.25
Rasio Guru/Murid Tahun 2011 - 2015
Kabupaten**

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio guru / murid SD/MI	116	110	107	120	118
Rasio guru / murid SMP/MTs	91	100	101	109	108

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

Indikator rasio guru dan murid SD/MI pada awal periode tahun 2011 adalah 116. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 dan 2013 menurun di angka 110 dan 107, namun meningkat pada tahun 2014 dan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 118. Indikator rasio guru dan murid SMP/MTs pada awal periode tahun 2011 adalah 91 Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun

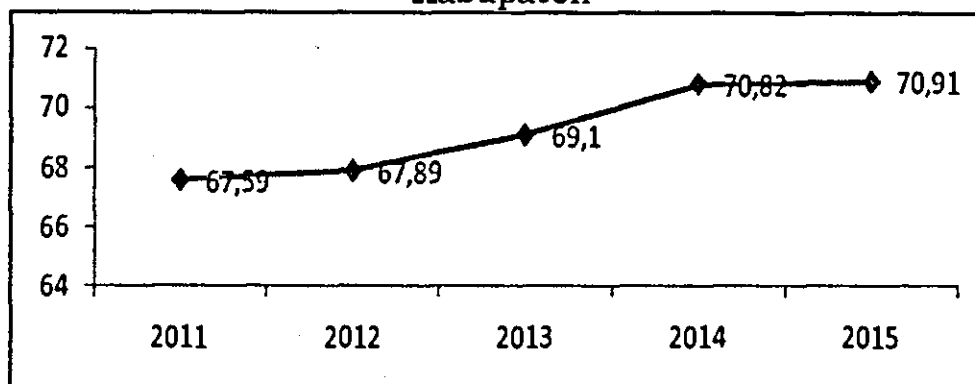
2015		Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten Pdt & Kasra	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	

b. Pendidikan Menengah

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. APS SMA/MA/SMK tahun 2011 kelompok umur 16-18 sebesar 67,59%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 32,41% anak umur 16-18 tahun di Kabupaten saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Jumlah anak umur SMA/MA/SMK yang tidak bersekolah tahun 2012 menurun menjadi 32,11%, pada tahun 2013 menjadi 30,9% dan tahun 2014 kembali menurun menjadi 29,82%, dan pada tahun 2015 turun menjadi 29,09%. Walau terus mengalami penurunan, namun masih menjadi tugas berat pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan sangat penting guna kemajuan masyarakat. Angka partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 tahun pada tahun 2015 sebesar 70,91%, mengalami kenaikan sebesar 0,09% dari capaian tahun 2014. Berikut adalah grafik angka partisipasi sekolah pendidikan menengah Kabupaten.

Grafik 2.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Sekolah SMA	10	9	9	9	10
Jumlah Sekolah SMK	25	26	27	29	31
Jumlah Sekolah MA	14	16	16	17	22
Jumlah Sekolah SMA dan MA	49	51	52	55	63
Penduduk Usia 16-18	23222	26772	25756	28324	27225
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	21,10	19,05	20,19	19,42	23,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

Sekda		Asisten	
Asisten Pen & Kesa		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Melihat tabel diatas, rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pendidikan menengah Kabupaten terlihat trend yang fluktuatif dari tahun 2011 hingga tahun 2015, yaitu 21,10 pada tahun 2011, turun menjadi 19,05 pada tahun 2012, meningkat menjadi 20,19 pada tahun 2013, dan kembali menurun pada tahun 2014 menjadi 19,42 dan meningkat di tahun 2015 menjadi 23,14. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk usia 16-18 tahun masih dapat diimbangi oleh pertambahan jumlah sekolah pendidikan menengah di Kabupaten, walaupun rasio tersebut masih dapat ditingkatkan apalagi mulai tahun 2017 pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru/murid bertujuan untuk menilai ketersediaan pengajar, selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk setiap guru. Rasio guru/murid dapat dilakukan perhitungan untuk mencapai standar kualitas pendidikan yang baik. Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah tabel rasio guru terhadap murid untuk pendidikan menengah pada Kabupaten dengan periode 2011- 2015:

Tabel 2.27
Rasio Guru Terhadap Murid Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio guru / murid SMA	77	73	71	75	77
Rasio guru / murid SMK	80	99	99	105	105
Rasio guru / murid MA	166	145	132	154	185






Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

Indikator rasio guru dan murid SMA pada awal periode tahun 2011 adalah 77. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 menjadi 73, pada tahun 2013 menjadi 71, tahun 2014 menjadi 75 dan akhir tahun 2015 mencapai 77. Indikator rasio guru dan murid SMK pada awal periode tahun 2011 adalah 80. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 105. Indikator rasio guru dan murid MA pada awal periode tahun 2011 adalah 166. Indikator ini juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 menjadi 145, tahun 2013 menjadi 132, tahun 2014 meningkat menjadi 154 dan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 185.

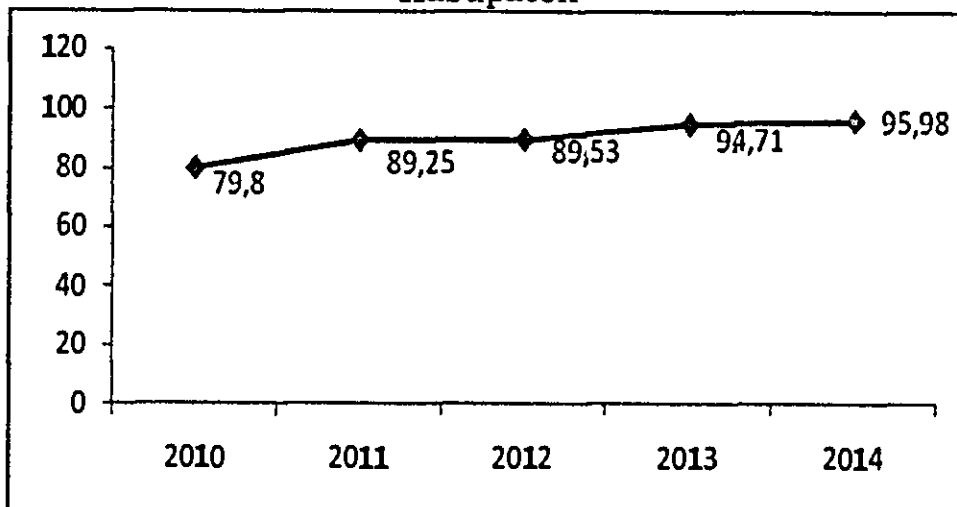
c. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Salah satu fasilitas yang sangat penting diperhatikan adalah kondisi bangunan sekolah secara baik.

Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang mempunyai peran penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, prasarana pendidikan mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pembantu Sekda		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Grafik 2.2
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%) Tahun 2010 - 2014
Kabupaten



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

Indikator kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SD/MI pada tahun 2011 adalah 79,8%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 95,98%. Indikator kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 87,14%, dan 86,32%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 94,71 untuk SMP/MTs, dan 92,81 untuk SMA/SMK/MA.

Tabel 2.28
Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan
Baik Tahun 2011 - 2015 Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	87,14	87,58	88,34	93,34	94,71
Sekolah SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	86,32	89,1	88,31	91,21	92,81

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50,3	52,07	52,54	57,8	63,02

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

Sekda		Asisten	
Asisten Perencanaan		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

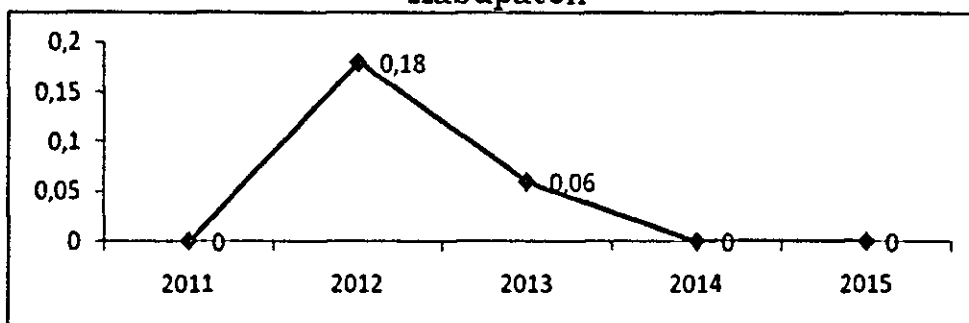
Indikator Angka Partisipasi Kasar PAUD pada awal periode tahun 2011 adalah 50,3%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015 mencapai 63,02%. Namun bila dengan rumus perhitungan baru, dimana angka penyebut yang sebelumnya menggunakan penduduk usia 0 – 6 tahun menjadi penduduk usia 3 – 6 tahun maka APK PAUD menjadi 75,81%.

e. Angka Putus Sekolah

1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Indikator angka putus sekolah SD/MI pada awal periode tahun 2011 adalah 0%. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 0,18%, tahun 2013 menjadi 0,06%, tahun 2014 dan 2015 menjadi 0%. Berikut adalah grafik angka putus sekolah SD/MI :

Grafik 2.3
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

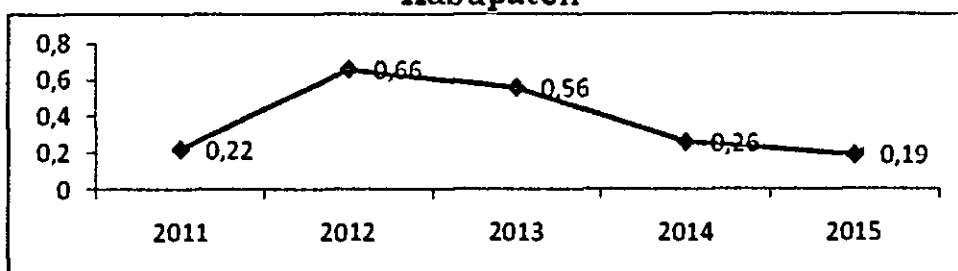


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Indikator angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2011 adalah 0,22%. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 mencapai 0,66%, tahun 2013 mencapai 0,56%, tahun 2014 mencapai 0,26% dan tahun 2015 mencapai 0,19% untuk SMP/MTs. Berikut adalah grafik angka putus sekolah SMP/MTs:

Grafik 2.4
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

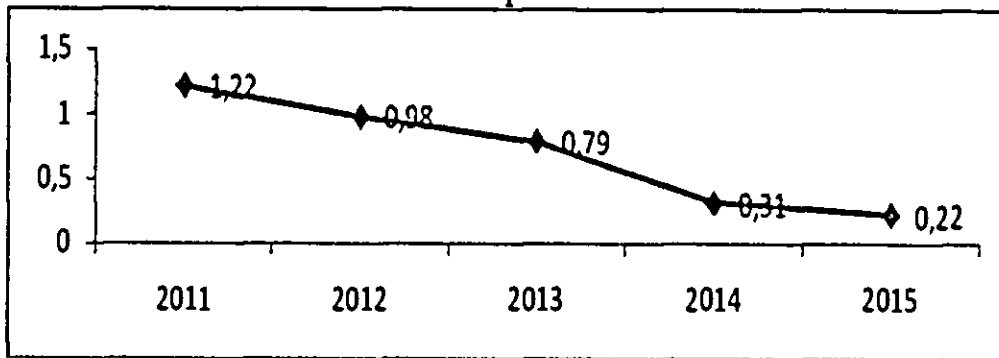
3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Indikator angka putus sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2011 adalah 1,22%. Indikator ini selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,22%. Berikut adalah grafik angka putus sekolah SMA/SMK/MA Kabupaten tahun 2011 – 2015:

Struktur Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pembantu Kasra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
FD Terkalt	

Grafik 2.5
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

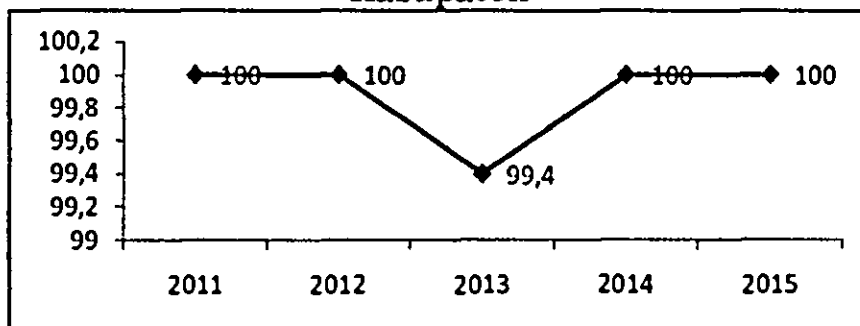
f. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Indikator angka kelulusan sekolah SD/MI pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 100%. Indikator tersebut dapat dipertahankan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015 mencapai 100%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SD/MI tahun 2011 - 2015:

Grafik 2.6
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

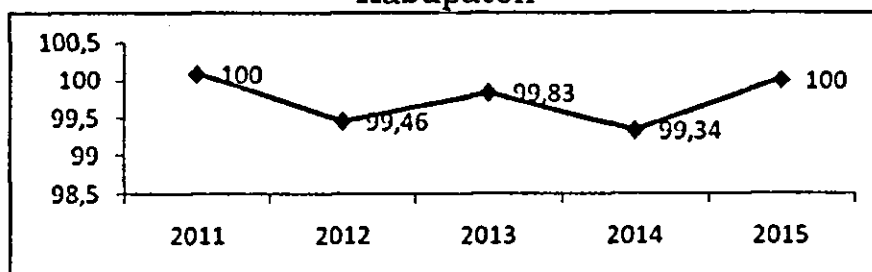


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Indikator angka kelulusan sekolah SMP/MTs pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 100%. Indikator ini mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 mencapai 99,46%, tahun 2013 mencapai 99,83%, tahun 2014 mencapai 99,34% dan Tahun 2015 mencapai 100%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SMP/MTs tahun 2011 - 2015 :

Grafik 2.7
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

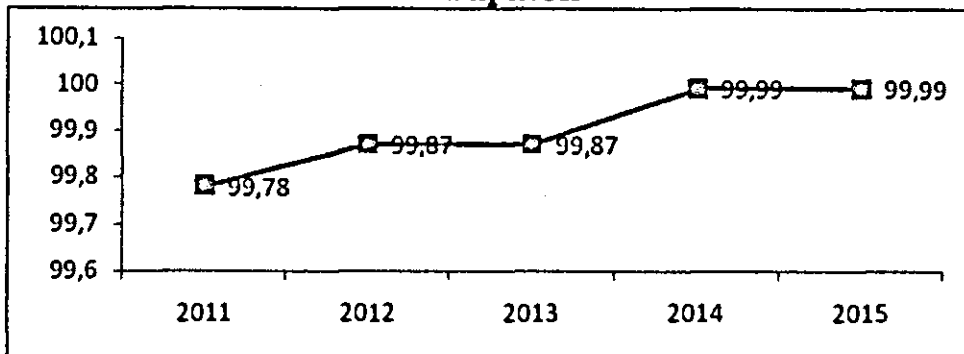
Subda	6
Asisten Pembantu Kesra	1
Kabag Hukum	

Asisten	8
PD Pemrakarsa	1
PD Terkait	

3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Indikator angka kelulusan sekolah SMA/SMK/MA pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 99,78%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 99,99%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SMA/SMK/MA tahun 2011 hingga tahun 2015.

Grafik 2.8
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

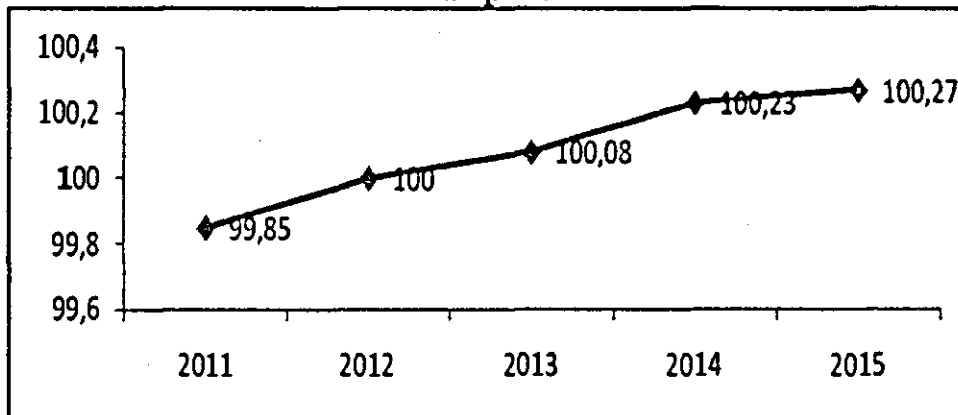


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Indikator angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 99,85%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai tahun 2015 mencapai 100,27%. Berikut adalah grafik angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2011 - 2015:

Grafik 2.9
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



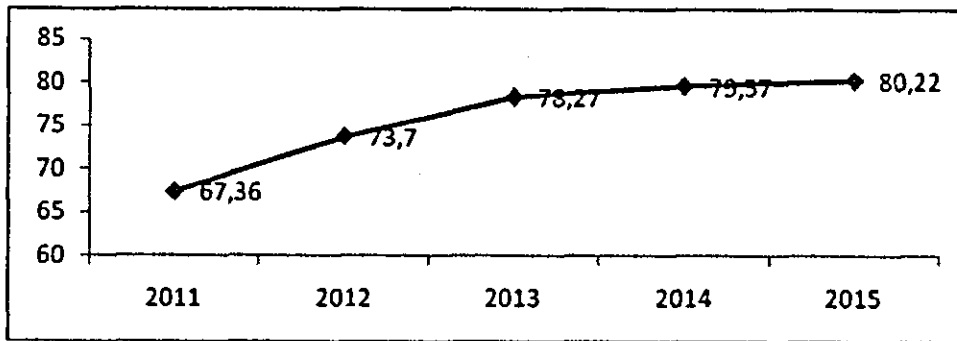
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Indikator angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2011 adalah 67,36%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 80,22%. Berikut adalah grafik angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2011 hingga tahun 2015 :

Tingkat Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Pesa		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		FD Terkait	

Grafik 2.10
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

6. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Standar kualitas pendidik yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi murid didiknya. Standar pendidik atau guru saat ini adalah Sarjana atau Diploma IV. Pemerintah pusat saat ini melakukan sertifikasi terhadap guru, program tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengajar.

Indikator guru yang memenuhi kualifikasi akademik untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 78,31%, 84,89%, dan 98,48%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 87,78% untuk SD/MI, 95,51% untuk SMP/MTs, dan 98,92% untuk SMA/SMK/MA. Berikut adalah grafik Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.30
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten

Guru yang memenuhi kualifikasi akademik (%)	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	78,31	79,07	82,80	86,64	87,78
SMP/MTs	84,89	86,67	89,84	92,44	95,51
SMA/SMK/MA	98,48	98,33	94,23	96,66	98,92

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

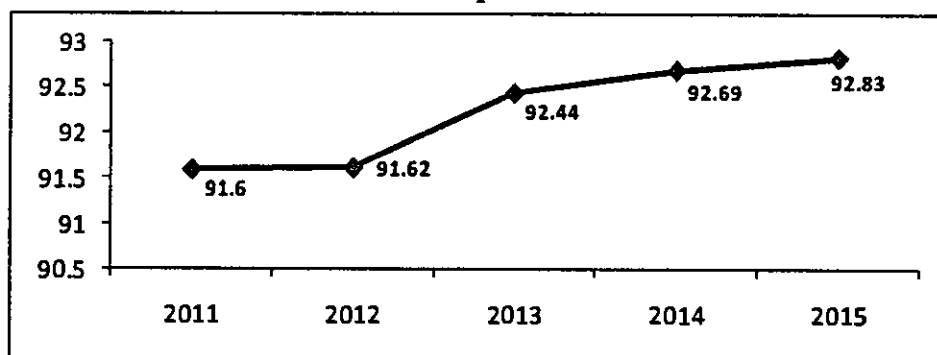
a. Angka Melek Huruf

Indikator angka melek huruf pada awal periode tahun 2011 adalah 91,6%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada akhir tahun 2015 mencapai 92,83%.

Capaian kinerja angka melek huruf didukung dengan program seperti penyelenggaraan kejar paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fungsional, mengadakan beberapa pelatihan kecakapan hidup serta meningkatkan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus-kursus yang ada di Kabupaten. Maka capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 92,83%. Berikut adalah grafik angka melek huruf Kabupaten:

Struktur Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Perek. & Persa		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Grafik 2.11
Angka Melek Huruf (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

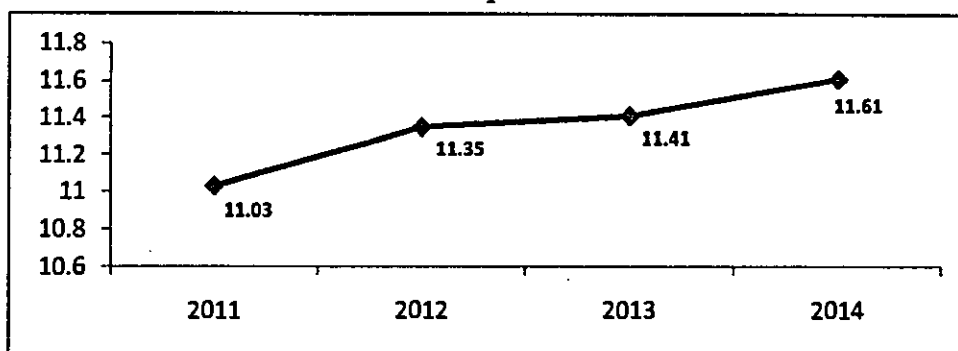


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Indikator harapan lama sekolah pada tahun 2011 mencapai 11,03 tahun, kondisi ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 meningkat menjadi 11,35 tahun, 2013 menjadi 11,41 tahun, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,61 tahun. Berikut adalah grafik harapan lama sekolah tahun di Kabupaten 2011-2014:

Grafik 2.12
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014
Kabupaten

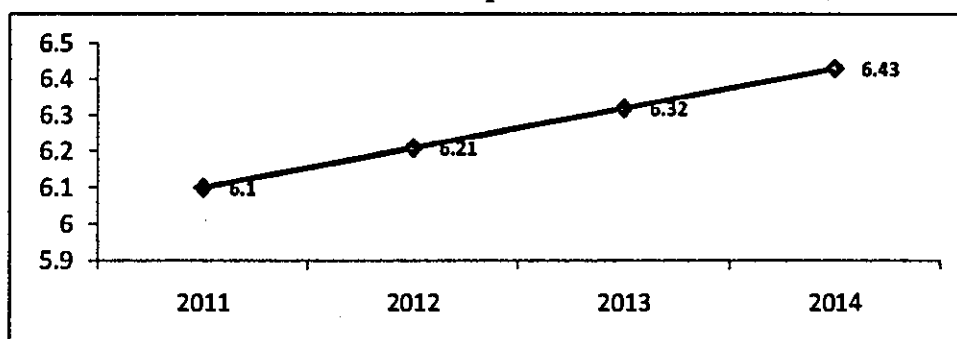


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2015

c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 adalah 6,10 tahun. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 6,43 tahun. Berikut adalah grafik angka rata-rata lama sekolah Kabupaten:

Grafik 2.13
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014
Kabupaten



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2015

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pem I Kisra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

d. **Angka Partisipasi Kasar**

Indikator angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A pada awal periode tahun 2011 adalah 103,10%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015 mencapai 103,12%. Indikator angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B pada awal periode tahun 2011 adalah 97,25%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2015 tercatat 98,62%. Indikator angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C pada awal periode tahun 2011 adalah 68,05%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 71,54%. Berikut adalah tabel angka partisipasi kasar Kabupaten:

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Kasar (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
APK SD/MI/Paket A	103,1	103,11	103,1	103,1 1	103,1 2
APK SMP/MTs/Paket B	97,25	97,34	97,45	97,91	98,62
APK SMA/SMK/MA/Paket C	68,05	68,35	69,09	70,15	71,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

e. **Angka Pendidikan Yang Ditamatkan**

Kualitas penduduk suatu daerah dapat diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Komposisi penduduk Kabupaten tahun 2014 berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa persentase terbesar adalah tamat SD/ sederajat yaitu mencapai 174.421 jiwa atau 36,72%. Sedangkan yang tamat SLTP/ sederajat mencapai 100.465 jiwa atau 21,15%. Adapun penduduk dengan tamatan perguruan tinggi baru berjumlah 20.678 jiwa atau 4,35.

Tabel 2.32
Banyaknya Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Yang
Ditamatkan Tahun 2014 Kabupaten

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
Tdk/belum pernah sekolah	5.495	23.767	29.262	6,16
Tdk/belum tamat SD/ sederajat	44.193	41.874	86.067	18,12
Tamat SD/ sederajat	86.752	87.669	174.421	36,72
Tamat SLTP/ sederajat	43.595	56.870	100.465	21,15
Tamat SMU/ sederajat	21.062	13.403	34.465	7,26
Tamat SM Kejuruan	19.107	10.487	29.594	6,23
Tamat Perguruan Tinggi	9.726	10.952	20.678	4,35
Jumlah	229.930	245.022	474.952	100

Sumber : BPS Kabupaten, tahun 2015

Tingkat Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pereksekutif Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

f. Angka Partisipasi Murni

Indikator angka partisipasi murni SD/MI/Paket A pada awal periode tahun 2011 adalah 98,21%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015 mencapai 99,03%.

Indikator angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B pada awal periode tahun 2011 adalah 82,49%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 85,14%.

Indikator angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C pada awal periode tahun 2011 adalah 54,5%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 60,44%. Berikut adalah tabel angka partisipasi murni Kabupaten:

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Murni (%) Tahun 2011-2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
APM SD/MI	98,21	98,91	98,91	98,99	99,03
APM SMP/MTs	82,49	82,72	82,81	84,23	85,14
APM SMA / SMK / MA / Paket C	54,5	55,38	55,56	59,86	60,44

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten, tahun 2016

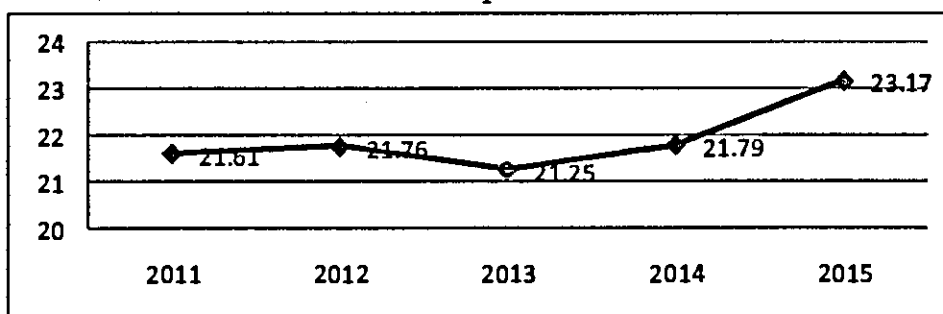
2.1.7. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kemudian akan menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Indikator rasio posyandu per satuan balita pada awal periode tahun 2011 mencapai 21,61 posyandu per 1000 balita mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 23,17 posyandu per 1000 balita. Berikut ini disajikan grafik perkembangan rasio posyandu per satuan balita tahun 2011 - 2015 :

Grafik 2.14
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

b. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

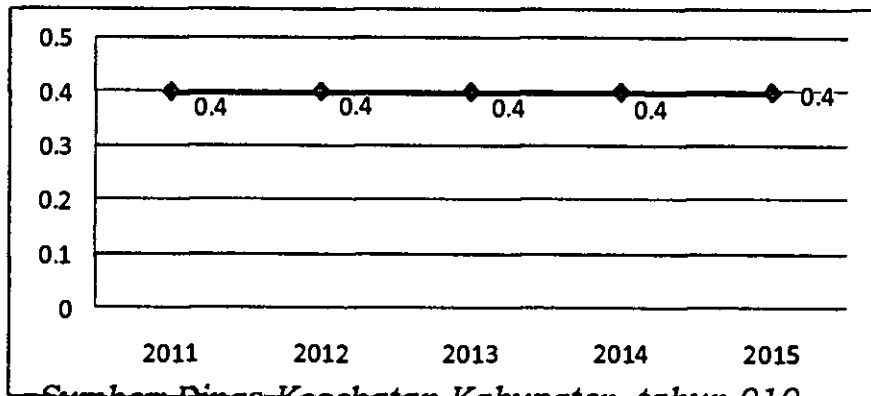
Rasio puskesmas per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan puskesmas dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Indikator Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,04 per 1000 penduduk dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih mencapai 0,04 per 1000 penduduk. Berikut

Paraf Hierarchy	2011	0,04	per 1000 penduduk
Sekda	2015	0,04	per 1000 penduduk
Asisten Pen & Tesa			
Kabag Hukum			
		PD Pemrakarsa	
		PD Tarkait	

adalah grafik rasio puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten tahun 2011-2015 :

Grafik 2.15
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



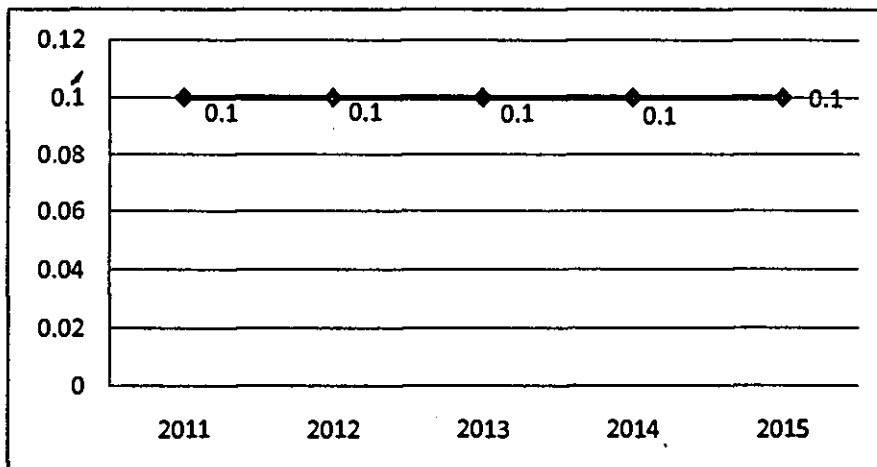
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2010

c. Rasio Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio pustu per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan pustu dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Indikator rasio pustu per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,1 per 1000 penduduk dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih mencapai 0,1 per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio pustu per satuan penduduk di Kabupaten tahun 2011-2015 :

Grafik 2.16
Rasio Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015
Kabupaten



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

d. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada Kabupaten memiliki angka yang sangat kecil, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang terdapat pada Kabupaten, tidak sebanding dengan jumlah rumah sakit yang terdapat pada Kabupaten dari tahun 2011 yang hanya 1 RS dan tahun 2014 hanya bertambah 1, yaitu menjadi 2 Rumah Sakit yang terdapat pada Kabupaten.

Sekda		PD Pemrakarsa	1
Asisten Pem. & Kesra		PD Terkait	
Kabag Hukum			

Tabel 2.34
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten

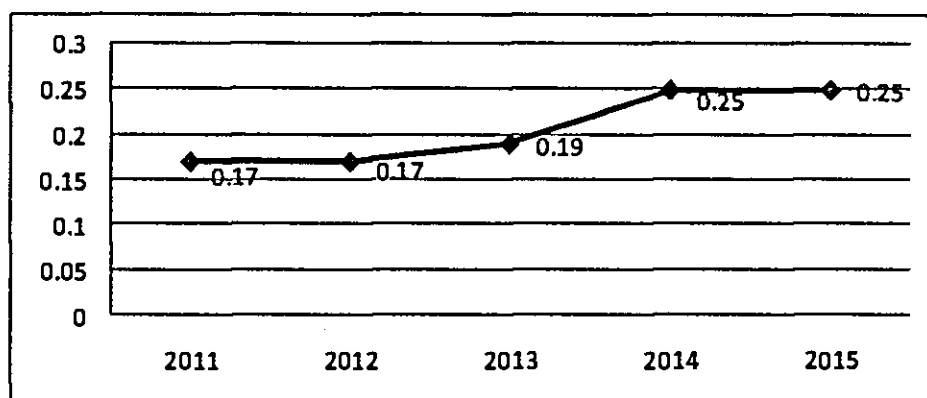
URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	2	2
Jumlah Penduduk	542.417	543.391	512.314	576.392	576.969
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,0018	0,0018	0,0059	0,0035	0,0034

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

e. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,17 per 1000 penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan 0,25 per 1000 penduduk pada tahun 2015. Tabel berikut adalah perkembangan rasio dokter umum dan dokter spesialis per satuan penduduk di Kabupaten dari tahun 2011- 2015 :

Grafik 2.17
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten

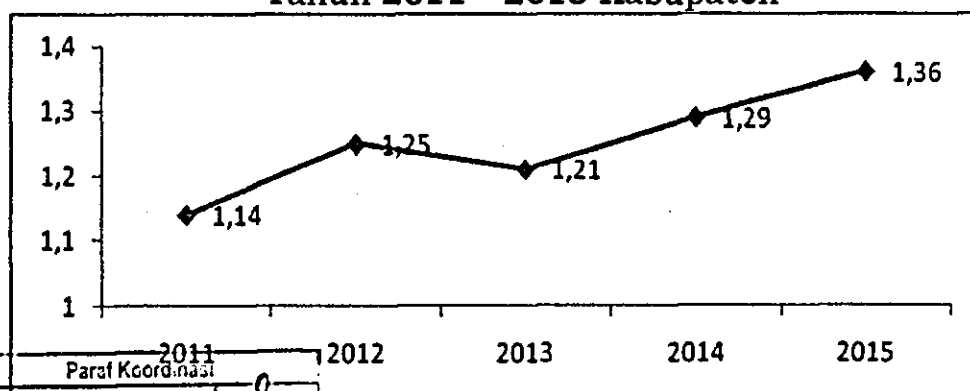


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

f. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 1,14 per 1000 penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 1,36 per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio tenaga medis per satuan penduduk dari tahun 2011 hingga tahun 2015 Kabupaten :

Grafik 2.18
Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten



Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Per & Kesa	
Kabag Hukum	

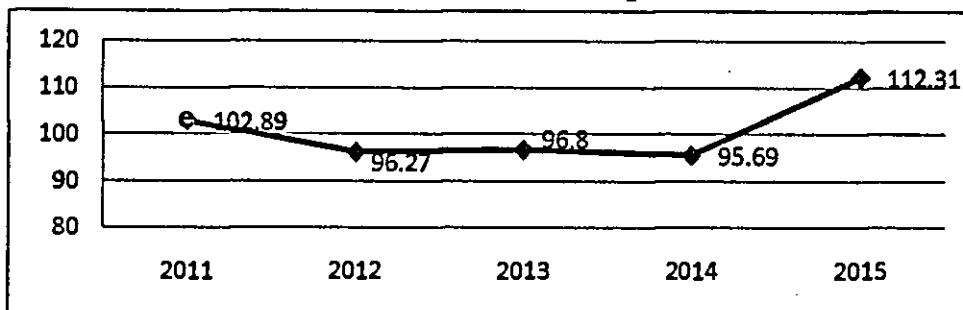
2011	2012	2013	2014	2015
Paraf Koordinasi				
Asisten				
PD Pemrakarsa				
PD Terkait				

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

g. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2011 mencapai 102,89% mengalami penurunan tahun 2012 menjadi 96,27%, meningkat sedikit menjadi 96,80%, kemudian menurun lagi pada tahun 2014 menjadi 95,69%, dan terakhir meningkat menjadi 112,31% pada tahun 2015. Berikut ini disajikan grafik cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani :

Grafik 2.19
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



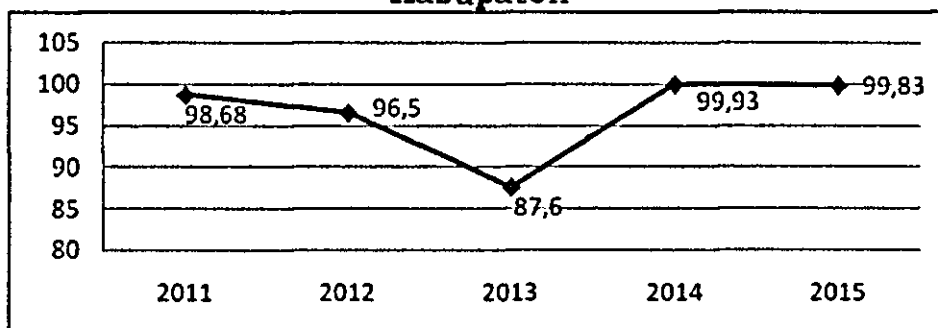
Sumber: Dinas

Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

h. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2011 mencapai 98,68% mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dimana pada tahun 2012 menurun menjadi 96,5%, menjadi 87,6% pada tahun 2013, dan meningkat menjadi 99,93% pada tahun 2014, kemudian sedikit menurun menjadi 99,83% pada tahun 2015.

Grafik 2.20
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



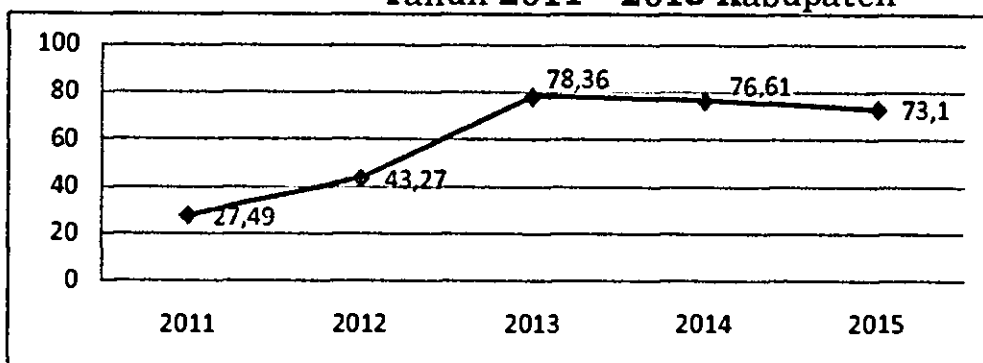
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

i. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada awal periode tahun 2011 mencapai 27,49% mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dengan kondisi pada tahun 2015 mencapai 73,10%. Data realisasi cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) setiap tahunnya disajikan sebagaimana grafik berikut:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asst. Per. & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Grafik 2.21
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

j. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score ≤ 3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menurut petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2008 memiliki definisi operasional yaitu balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan pada Kabupaten yang tercatat dalam buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 2011 - 2016 sudah mencapai angka 100% dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Hal ini perlu dipertahankan oleh pemerintah daerah karena terkait dengan UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

k. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan pasien baru TBC BTA positif pada awal periode tahun 2011 mencapai 28,47% mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan pada tahun 2015 mencapai 32,70%. Berikut ini disajikan tabel cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA tahun 2011 sampai dengan 2015:

Tabel 2.35
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Penemuan pasien baru TBC BTA positif	28,47	21,7	38,77	28,82	32,70

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

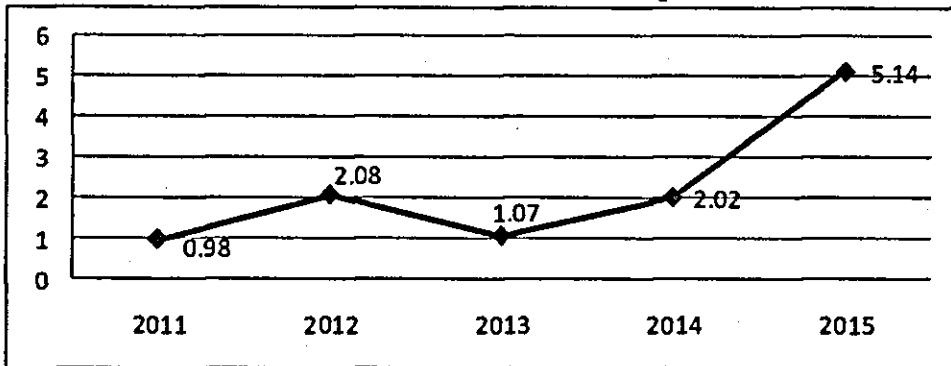
l. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit DBD

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Definisi tersebut merupakan definisi operasional menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Penderita DBD yang ditangani pada awal periode tahun 2011 mencapai 100%. Capaian ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015.

Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten Perencanaan	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	

m. **Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**
 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2011 mencapai 0,98% dan mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 5,14%. Berikut ini disajikan grafik cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2011 - 2015 :

Grafik 2.22
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)
Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

n. **Cakupan Kunjungan Bayi**

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali pada satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Definisi tersebut menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828 Tahun 2008.

Tabel 2.36
Cakupan Kunjungan Bayi (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Kunjungan Bayi	102,8	99,87	93,78	95,8	95,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2011 mencapai 102,8% mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 95,08%.

o. **Cakupan Puskesmas**

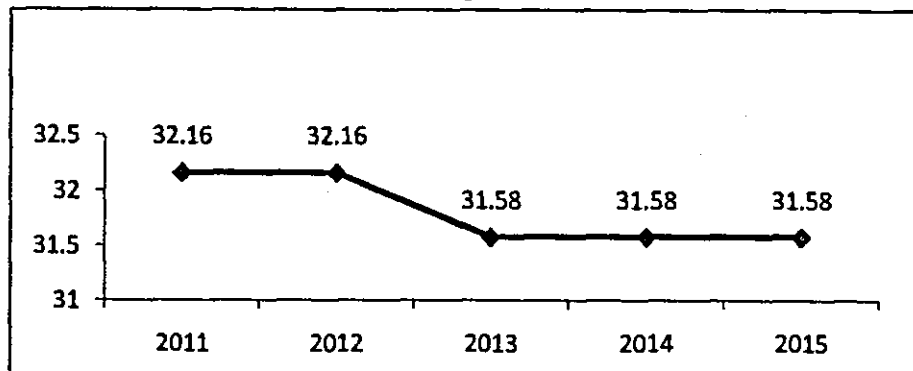
Cakupan puskesmas diperlukan untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat. Cakupan puskesmas adalah kecamatan, tergantung jumlah penduduknya. Cakupan puskesmas pada tahun 2011 mencapai 200% dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih mencapai 200%. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten telah berhasil memenuhi target 1 kecamatan ada 2 puskesmas.

p. **Cakupan Puskesmas Pembantu**

Cakupan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan di masyarakat. Pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya.

Tingkat Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asistan	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Grafik 2.23
Cakupan Puskesmas Pembantu (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

Cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2011 mencapai 32,16% mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 31,58%.

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi sama dengan 1000 kelahiran bayi dalam kurun waktu setahun dikurangi AKB.

Tabel 2.37
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2010-2015
Kabupaten

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	12,38	11,57	11,4	9,98	8,86	8,41
2	Angka kelangsungan hidup bayi	987,62	988,43	988,6	990,02	991,14	991,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2015 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten pada tahun 2015 dari 1000 bayi yang dilahirkan sebanyak 991 bayi yang dapat terus

hidup.		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pen. & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		FD Terkait	

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Berdasarkan data tahun 2011 sampai dengan 2015 nilai AKI fluktuatif dari waktu ke waktu, sehingga upaya untuk melanjutkan target tujuan pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus. Berikut adalah tabel perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.38
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten

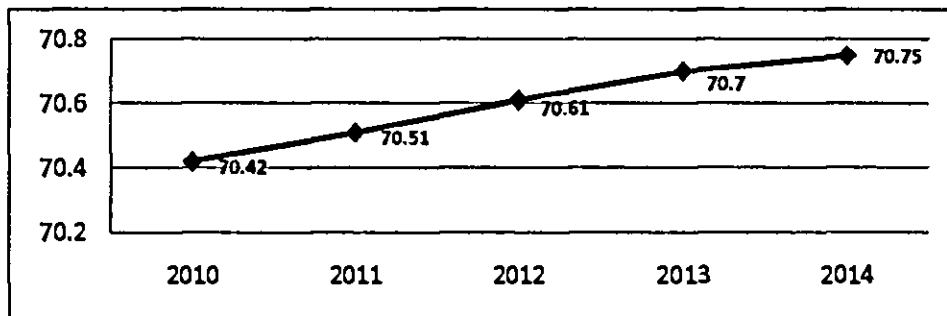
URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kematian Ibu	105,17	95,01	133,03	118,17	76,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

c. Angka Usia Harapan Hidup

Pemerintah Kabupaten berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup masyarakat yang merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan angka usia harapan hidup pada tahun 2010-2014 sebesar 0,33, dari 70,42 tahun pada tahun 2010 menjadi 70,75 tahun pada tahun 2014.

Grafik 2.24
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2010 - 2014
Kabupaten

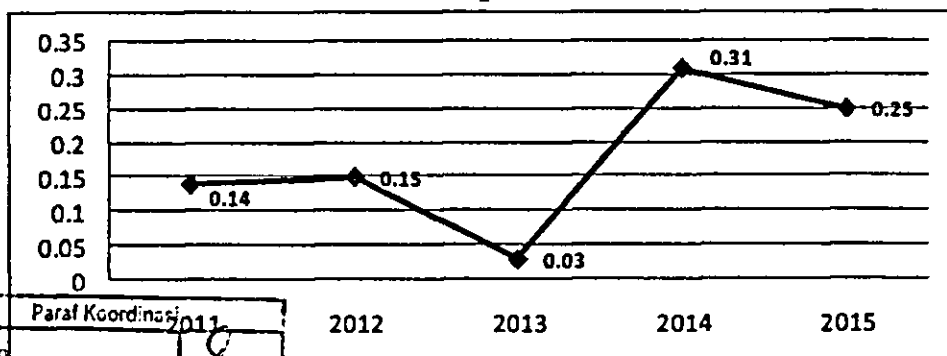


Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2015

d. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Indikator prevalensi balita gizi buruk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,14 mengalami fluktuatif sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,25. Capaian selalu mencapai target <1 per 1000 balita. Angka disini berarti Pemerintah Kabupaten berhasil menjaga Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk tetap di bawah <1 per 1000 balita, sehingga target nasional telah terpenuhi. Berikut adalah grafik persentase gizi buruk Kabupaten.

Grafik 2.25
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten, tahun 2016

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten Kes	<i>[Signature]</i>	FD Terkait	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>		

2.1.8. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata di Kabupaten pada tahun 2011 mencapai 512.274 wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Pariwisata merupakan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten, sehingga sangat dibutuhkan perencanaan yang baik dalam pengembangannya. Kunjungan wisata pada tahun 2015 telah mencapai 1.556.000 wisatawan. Berikut adalah tabel kunjungan wisata di Kabupaten tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.39
Kunjungan Wisata (orang) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Kunjungan Wisata (orang)	512.274	537.859	655.000	1.089.961	1.556.000

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten, tahun 2016

b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten pada tahun 2011 mencapai sebesar Rp.1.802.458.500,00 dengan pengembangan yang terarah maka kontribusinya meningkat sampai pada tahun 2015 menjadi Rp.6.500.000.000,00. Berikut adalah tabel kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.40
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (milyar) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	1.802	2.074	1.841	2.549	6.500

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten, tahun 2016

2.1.9. Industri dan Perdagangan

A. Perindustrian

Industri adalah bidang ekonomi yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja serta penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya.

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK.

Tabel 2.41
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten

URAIAN	2013	2014
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHB	6,79	7,48
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK 2010	6,93	7,24

Sumber: BPS Kabupaten, tahun 2015

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Sekda		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

b. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan Industri di Kabupaten pada tahun 2011 sebesar 1,99% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3,95%. Berikut adalah tabel pertumbuhan industri di Kabupaten tahun 2011 – 2015 :

Tabel 2.42
Pertumbuhan Industri Tahun 2011 – 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Industri	1,99	2,5	2,03	2,56	3,95

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, tahun 2015

c. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin Kabupaten pada tahun 2011 sebesar 2,2% sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3,95%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten tahun 2011 – 2015 :

Tabel 2.43
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,2	3,32	2,92	5,6	3,95

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, tahun 2015

2.3.2.1 Ket transmigrasian

a. Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi swakarsa pada tahun 2011 sebanyak 10 orang, mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 mencapai 135 orang. Berikut adalah tabel perkembangan transmigrasi swakarsa tahun 2011 – 2015 :

Tabel 2.44
Transmigrasi Swakarsa (orang) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Transmigrasi Swakarsa (orang)	10	35	90	130	135

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten, tahun 2015

2.1 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari empat fokus penilaian yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia. Aspek daya saing daerah menjelaskan mengenai kesiapan suatu daerah untuk maju dan berkembang.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pemb. Desa		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

B. Perdagangan

Aspek perdagangan didukung melalui ketersediaan Pasar Daerah, sejumlah 18 buah dengan rincian di masing – masing kecamatan sebagai berikut : Donorojo 1 buah, Punung 2 buah, Pringkuwu 1 buah, Pacitan 4 buah, Arjosari 1 buah, Nawangan 1 buah, Bandar 2 buah, Tegalombo 1 buah, Tulakan 2 buah, Ngadirojo 2 buah dan Sudimoro 1 buah.

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu daerah. Giatnya aktivitas perdagangan suatu daerah menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian daerah itu sendiri.

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB tahun 2013 sebesar 16,13% dan tahun 2014 naik menjadi sebesar 17,73%. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK tahun 2013 sebesar 16,76% dan tahun 2014 naik menjadi 17,87%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten tahun 2013 – 2014 :

Tabel 2.45
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten

URAIAN	2013	2014
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB	16,13	17,73
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK 2010	16,76	17,87

Sumber: BPS Kabupaten, tahun 2015

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2011 sebesar 5%, meningkat 150% sehingga pada tahun 2015 menjadi 12,5%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal Kabupaten tahun 2011 – 2015 :

Tabel 2.46
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2011 - 2015
Kabupaten

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Bina Kelompok / Pedagang/usaha Informal	5	6,25	13,75	10	12,5

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, tahun 2015





2.2. Kawasan Rawan Bencana

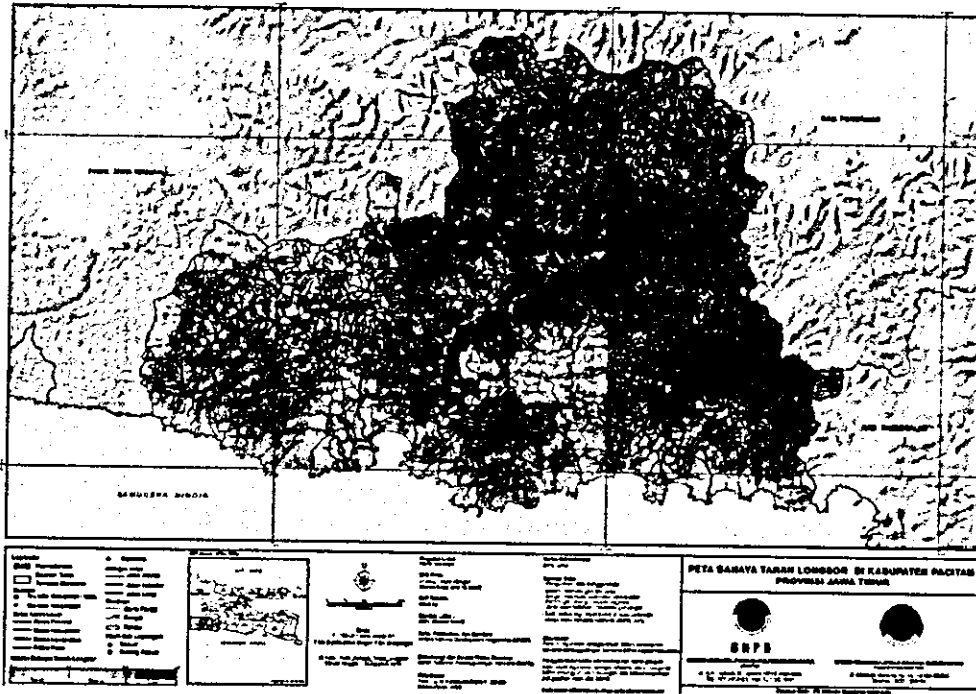
Bencana yang terdapat pada Kabupaten berdasarkan data yang tercatat dalam Laporan Bencana Kabupaten Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yaitu banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran, tanah ambles, pohon tumbang dan rumah roboh tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten, berikut adalah rincian jenis bencana pada beberapa kecamatan di Kabupaten:

1. Banjir: Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari dan Ngadirojo;
2. Tanah Longsor: Donorojo, Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro;
3. Angin-Topan: Pacitan, Kebonagung, Bandar dan Sudimoro;
4. Kebakaran: Pringkuwu, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar dan Tulakan;

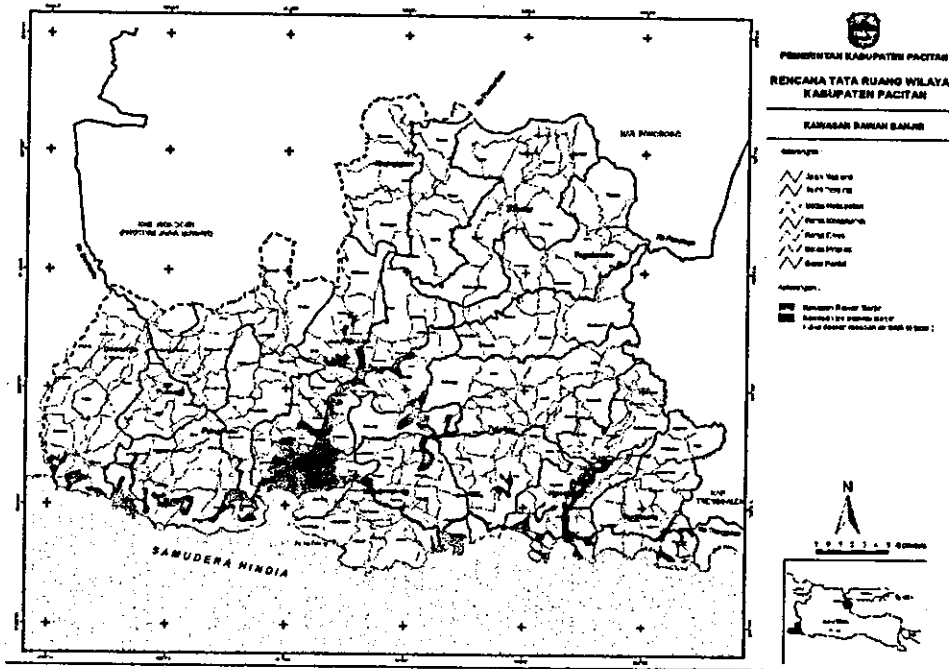
Paraf Monev	Paraf Koordinasi	
Sekda	Asisten PD Pemrakarsa	
Asisten Perencanaan & Kesa		
Kabag Hukum	PD Terkait	

5. Tanah Ambles: Arjosari;
6. Pohon Tumbang: Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo dan Tulakan;
7. Rumah Roboh: Bandar.

Tingkat Hierarchy		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Per. & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	



Gambar 2.9.
Kondisi Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten



Gambar 2.10.
Kondisi Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten

Paraf Inisrarki	
Sekda	
Asisten Perencanaan & Kesi	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
FD Tertah	

BAB III

PENGAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCA BENCANA

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan pengkajian yang memadai atas bukti-bukti berupa kerusakan dan kerugian aset-aset penghidupan, deprivasi hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan pascabencana.

Penggalian bukti-bukti diatas dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang merupakan metode yang digunakan untuk pendekatan kajian akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Jitu Pasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlandaskan pada informasi akurat dari para pihak yang terdampak bencana.

Dengan demikian Jitu Pasna merupakan basis bagi penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pendekatan Jitu Pasna yang partisipatif dan berbasis pada data akan mampu mendukung penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik.

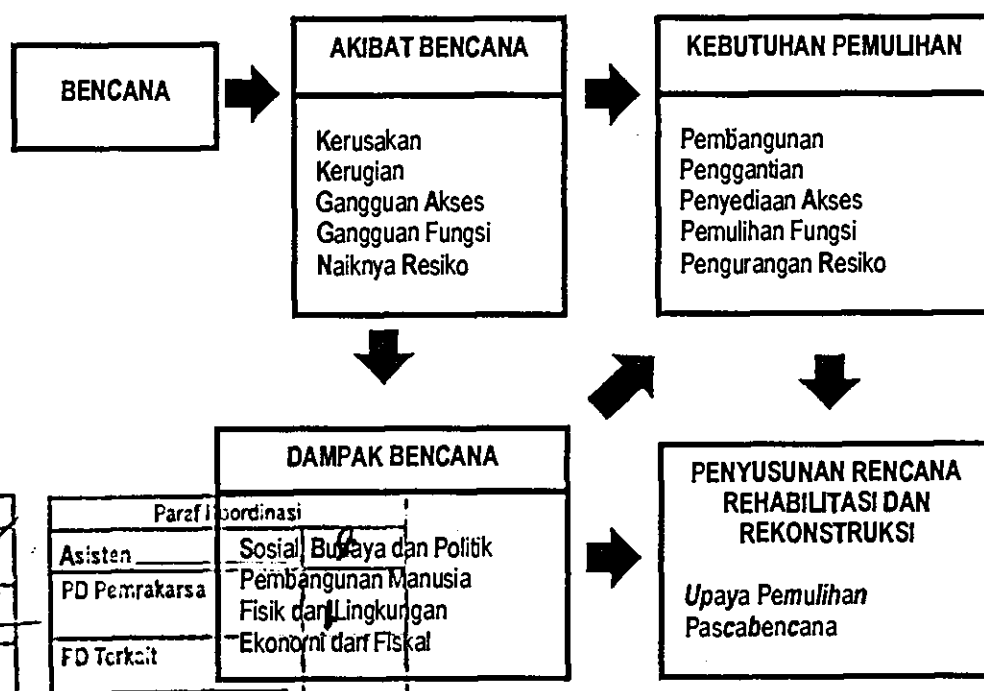
Jitu Pasna menggunakan kerangka pandang yang menyeluruh terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat untuk pulih dari bencana. Jitu Pasna mengakui keseluruhan aspek kehidupan manusia dan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tujuannya agar upaya-upaya pemulihan pasca bencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh, yang tertuang pada komponen dan lingkup Jitu Pasna.

Kajian Jitu Pasna akan memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pascabencana, yaitu:

1. Pengkajian akibat bencana
2. Pengkajian dampak bencana; dan
3. Pengkajian kebutuhan pasca bencana

Komponen-komponen dalam Jitu Pasna diatas memiliki kesaling-terhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pasca bencana.

Hubungan antara komponen pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pasca bencana nampak pada diagram di bawah ini.



Struktur Organisasi	
Struktur Organisasi	
Struktur Organisasi	
Struktur Organisasi	

Asisten	Sosial Budaya dan Politik
PD Pemrakarsa	Pembangunan Manusia Fisik dan Lingkungan
FD Terkait	Ekonomi dan Fiskal

Gambar 3.1 Kerangka Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam Jitu Pasna berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut :

1. Kebutuhan pemulihan awal adalah kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan pasca bencana yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
3. Sedangkan kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

Dengan demikian, komponen pembangunan, penggantian, penyediaan akses, pemulihan proses dan pengurangan resiko harus dipilah-pilah dalam kerangka pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berikut ini adalah tabel komponen perkiraan kebutuhan dalam Jitu Pasna.

Tabel 3.1.
Komponen Perkiraan Kebutuhan

Komponen	Keterangan
Pembangunan	Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan kerusakan infrastruktur pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana. Pembangunan kembali ini harus mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang lebih tahan bencana sehingga pengkajian resiko bencana wajib menjadi pertimbangan dalam perkiraan kebutuhan pasca bencana
Stimulasi	Kebutuhan stimulasi bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi sebagai akibat dari bencana. Penggantian juga harus berorientasi pada perbaikan besaran-besaran ekonomi dalam jangka panjang sehingga harus efektif, efisien dan berkelanjutan.
Penyediaan Akses	Kebutuhan penyediaan akses bertujuan untuk memulihkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, jaminan sosial, perumahan, budaya, pekerjaan, kependudukan dan lain-lain. Penyediaan ini harus dilakukan dalam rangka pemulihan sistem pelayanan kebutuhan dasar yang ada.
Pemulihan Proses	Kebutuhan pemulihan proses merupakan pemulihan awal yang bertujuan untuk menjalankan kembali proses pemerintahan dan kemasyarakatan. Misalnya, pemulihan proses kemasyarakatan seperti pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok posyandu, kelompok tani dan organisasi berbasis masyarakat lainnya.

Paraf Hierarchy		Paraf Kc			
Sekda		Asisten	RW,		
Asisten Pemda Kesra		PD Pemrakarsa	berbasis		
Kabag Hukum		PD Terkait			

Pengurangan Resiko	Kebutuhan pengurangan resiko meliputi kebutuhan mencegah dan melemahkan ancaman, kebutuhan mengurangi kerentanan terhadap bencana dan kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana di masa datang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pemulihan awal dan kebutuhan pemulihan jangka panjang untuk merespon peningkatan resiko akibat bencana.
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lingkup pengkajian kebutuhan pasca bencana mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pedoman ini mengarahkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam enam aspek, yakni kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Tabel 3.2.






Substansi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Aspek	Keterangan
Perumahan dan Pemukiman	Aspek perumahan dan permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
Infrastruktur	Aspek infrastruktur pembangunan, antara lain terdiri dari perbaikan
Pembangunan	prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
Ekonomi	Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan
Sosial	Aspek sosial antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
Lintas Sektor	Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup

3.1. Kajian Akibat Bencana

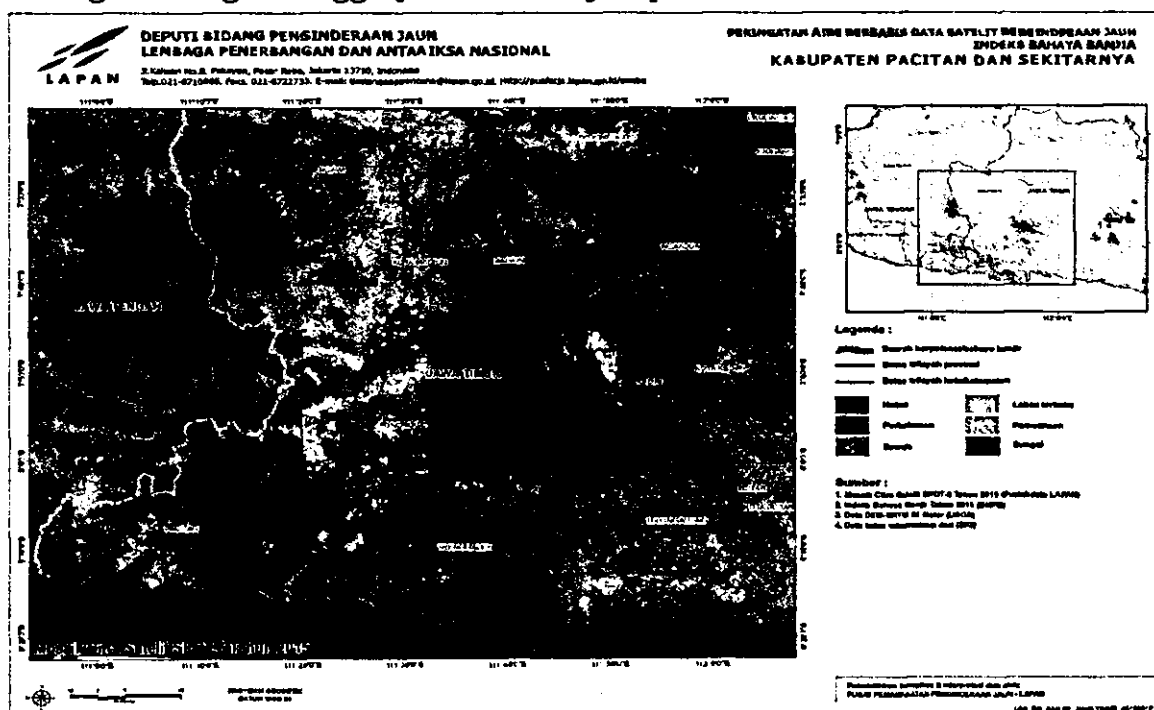
3.1.1 Kronologi Kejadian Bencana

Kejadian bencana banjir dan Longsor di Kabupaten pada tanggal 28 November 2017 telah merusak permukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya untuk yang banjir terparah pada kawasan sekitar bantaran sungai Grindulu dan Lorog yang meluas menyebabkan lumpuhnya aktifitas.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Analisis data satelit pengindraan jauh yang dilakukan oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) dilaporkan sebagai berikut :

- a. Data Curah Hujan Harian berdasarkan data akumulasi curah hujan harian dari QMorph dapat diketahui bahwa pada lokasi bencana mulai pada tanggal 27 November 2017 intensitas curah hujan rata-rata 383 mm, yang merupakan anomali intensitas hujan yang disebabkan oleh siklon tropis cempaka yang berada 23 km tenggara pacitan. dan puncak curah hujan tertinggi terjadi pada hari itu juga terjadi pada tanggal 28 November dengan intensitas yang masih sangat tinggi. Akumulasi Curah hujan dari tanggal 27-28 November 2017 tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banjir dan Longsor pada tanggal 28 November 2017.
- b. Potensi Banjir Harian berdasarkan analisis potensi banjir harian dengan menggunakan data liputan awan dari Satelit Himawari-8 selama 24 jam terakhir banjir di Kabupaten (27-28 November 2017) dapat dilihat bahwa potensi hujan dengan intensitas sangat tinggi. Sudah tampak terlihat sejak tanggal 26 November 2017. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat terindikasi pada tanggal 27 November pukul 18.00 WIB hingga tanggal 28 November atau kurang lebih selama 1x24 jam. Kemudian potensi hujan cenderung menurun hingga terlihat cerah pada tanggal 29 November 2017. Potensi hujan lebat tersebut kemudian dianalisa dengan daerah potensi genangan Kota pacitan. Hasil analisis mengidentifikasi adanya potensi banjir di wilayah Kabupaten khususnya daerah rendah sepanjang bantaran sungai Grindulu dan Lorog pada tanggal 28-29 November 2017.
- c. Analisis Daerah Terdampak Banjir lokasi dampak terparah merupakan lokasi-lokasi yang terletak tepat pada tepi sempadan sungai dengan morfologi area terdampak merupakan daerah cekungan atau rendah di sepanjang Sungai Grindulu dan Lorog, dan bantaran disepanjang Sungai Grindulu dengan radius area terdampak hampir semua kawasan disekitar badan sungai, seperti yang dapat ditunjukkan pada Gambar 3.2. Sedangkan untuk bencana tanah longsor hampir di sebagian besar wilayah perbukitan pacitan terdampak bencana longsor dimana melanda 12 kecamatan di Kabupaten dengan titik menyebar diseluruh wilayah Kabupaten. Untuk penyebab bencana longsor adalah perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi budidaya baik pertanian atau permukiman, dimana dengan kondisi kelerengn yang rata - rata ekstrim menyebabkan tanah mudah sekali longsor dengan tingginya curah hujan pada saat ini.



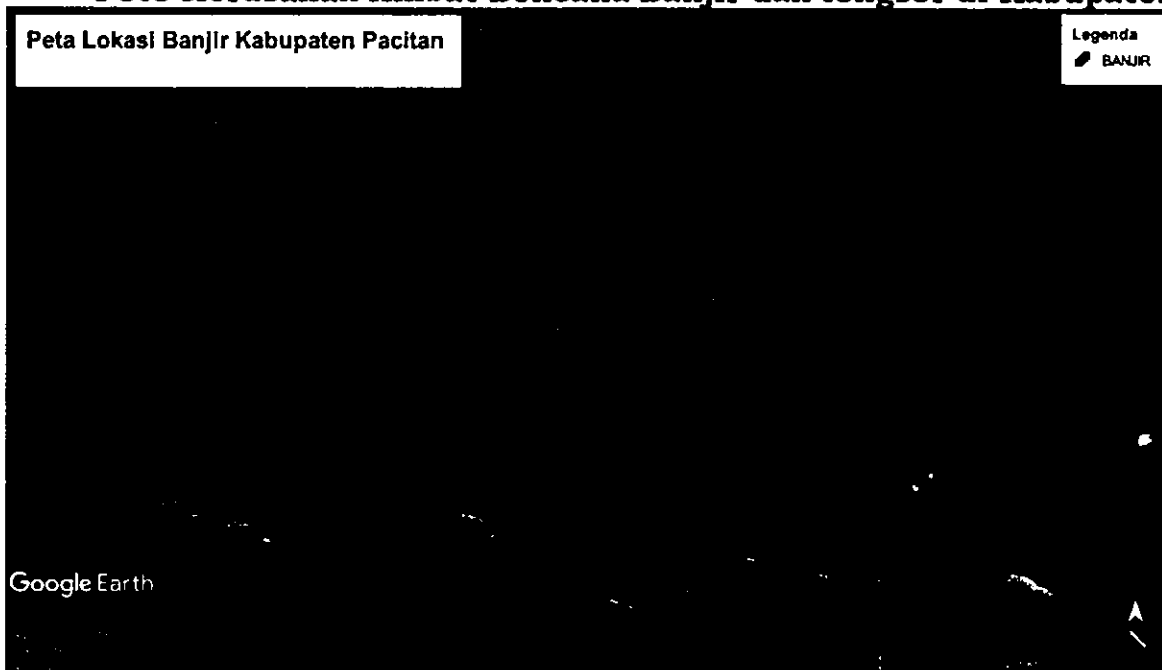
Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pen. & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Gambar 3.2
Peta Analisis Peluang Terkena Dampak Banjir Dan Longsor
Di Kabupaten



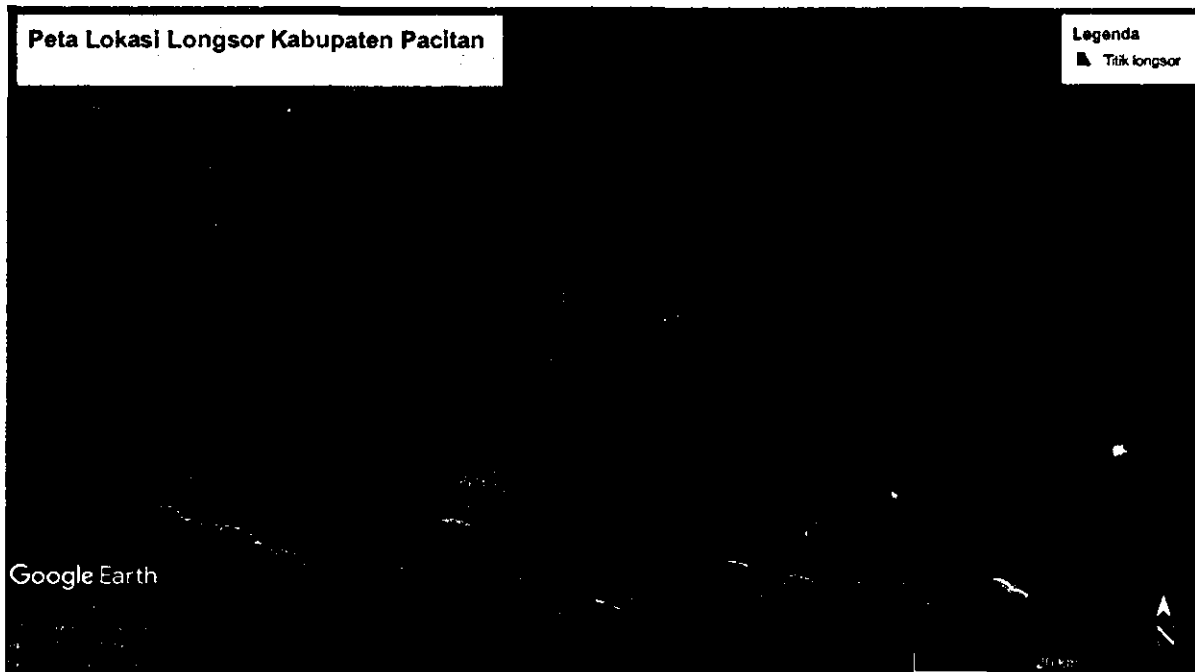
Gambar 3.3

Foto Kerusakan Akibat Bencana Banjir dan longsor di Kabupaten



Paraf Berarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Perencanaan		FD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		FD Terkait	

Gambar 3.4
Peta Kawasan Terdampak Banjir di Kabupaten, 28-11-2017



Gambar 3.5
Peta Kawasan Terdampak Bencana Tanah Longsor Kab. Pacitan, 28-12-2017

3.1.2. Upaya Penanganan Darurat dan Pemulihan Awal

Banjir dan Longsor Pacitan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 25 orang meninggal, sebanyak 16.956 jiwa pengungsi (per tanggal 4 Desember 2017) tersebar di lokasi penampungan (terpusat) yang telah ditentukan dan sebagian lainnya tersebar di rumah keluarga (mandiri).

Dalam merespon banjir dan Longsor Pacitan, kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pada masa penanganan tanggap darurat antara lain:

- a. Pendirian Posko Tanggap Darurat untuk mengevakuasi dan menampung pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan *cash for work* untuk pengungsi, pembersihan dari lumpur untuk lahan pertanian dan rumah yang terendam, jalan, distribusi air bersih, MCK, dapur umum serta penyaluran layanan kesehatan.
- b. Rapat evaluasi harian di Posko Tanggap Darurat yang dikomando oleh Dandim 0801 Kabupaten, dihadiri seluruh OPD serta elemen-elemen yang terkait, seperti Relawan-relawan berbagai unsur, organisasi masyarakat, serta komunitas peduli masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan selama tanggap darurat antara lain adalah: pencarian korban, pembersihan puing dan sampah, pengamanan, perbaikan/pemulihan fungsi jalan, jembatan dan saluran air bersih.
- d. Penyaluran bantuan masa tanggap darurat oleh BNPB berupa pakaian dan perlengkapan sekolah, lauk pauk dan makanan siap saji serta Dana Siap Pakai dengan nilai sebesar:

1) Rp.500.000.000,00 digunakan untuk Dana Operasional PoskoTanggap Darurat

Rp-142.000.000,00 digunakan untuk Dana Operasional Perpanjangan

Struktur Hierarki	2)	Tanggap Darurat	9
Sekda	3)	Rp 1.944.910.000,00	1
Asisten Sekda		Darurat TNI	
Kabag Hukum		PD Terkait	

digunakan untuk Dana Operasional Tanggap

- 4) Rp. 3.203.365.000,00 digunakan untuk Dana pengadaan setempat Tanggap Darurat
 - 5) Rp. 818.730.000,00 digunakan untuk paket sembako sebanyak 2250 paket
 - 6) Rp. 146.964.400,00 digunakan untuk paket kesehatan sebanyak 500 paket
- e. Pengelolaan berbagai bantuan yang datang dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah provinsi Jawa Timur, pihak swasta, sumbangan masyarakat, ormas, dan pihak lainnya.
 - f. Penyediaan bantuan lain berupa makanan, pakaian, peralatan mandi, tempat tidur, layanan kesehatan, layanan pendidikan, maupun *trauma healing* pada korban terdampak.
 - g. Pelaksanaan upaya penanganan darurat bencana banjir dan Longsor oleh Kementerian/Lembaga dari sektor terdampak antara lain: BNPB, Kemensos, Kemenkes, Kemenhub, Kemenpora, Kemen LHK, TNI/Polri, Basarnas, BMKG, dan PVMBG.
 - h. Penanganan pengangkutan sampah dan puing-puing bangunan yang ambruk dan pembersihan sisa tanah liat endapan bekas banjir oleh OPD, pihak swasta. TNI/POLRI di daerah terdampak banjir dan longsor dengan menggunakan alat berat dan alat seadanya.
 - i. Penanganan pelayanan terhadap pengungsi dan penyediaan hunian sementara dan pemberian jaminan hidup yang layak digunakan sampai masa 3 bulan.
 - j. Setelah masa tanggap darurat berakhir, berlanjut ke tahap transisi darurat ke pemulihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/1206/KPTS/408.12/2017 tanggal 7 Desember 2017.

3.2. Penilaian Akibat dan Dampak Bencana

Bencana Banjir Dan Longsor Pacitan yang terjadi menimbulkan dampak kerusakan baik sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lainnya di wilayah Kabupaten. Kerusakan paling parah adalah pada sektor perumahan mencapai 3.982 unit (RB=1.487 unit, RS=1.250 unit, RR=1.245 unit). Sebagian besar kerusakannya rusak ringan disebabkan adanya genangan sampah bekas puing-puing rumah dan lumpur dengan ketinggian berkisar 50 cm, sedangkan untuk rumah rusak berat sebagian besar terletak disepanjang bantaran sungai akibat arus sungai sangat deras, sedangkan kerusakan untuk longsor biasanya terjadi karena rumah tinggi tertimbun material longsor ataupun tanahnya amblas.

3.2.1. Sektor Permukiman

3.2.1.1. Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Data Kerusakan Permukiman Akibat Banjir Dan Longsor di Kabupaten, mencapai 3.982 unit rumah, baik rumah dengan konstruksi permanen, semi permanen maupun non permanen.

Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi pada komponen bangunan rumah dan kerusakan isi rumah yang berupa mebelair dan peralatan lainnya. Berdasarkan data kondisi kerusakan rumah dapat diuraikan sebagai berikut : rumah kondisi rusak berat sebanyak 1.487 unit diakibatkan dampak banjir dan Longsor kerusakannya berupa : runtuhnya kolom, pondasi sehingga rumah ambruk, rumah hanyut diakibatkan terbawa arus sungai yang sangat deras dengan debit sungai dan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Rumah kondisi rusak sedang sebanyak 1.250 unit diakibatkan dampak banjir dan Longsor kerusakannya berupa komponen struktur utama bangunan sebagian kecil rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri, diantara kerusakan pintu kusen dan jendela hancur. Rumah kondisi rusak ringan sebanyak 1.245 unit, dengan kerusakannya berupa kerusakan pintu, jendela, dinding, tiang penyangga, penutup atap rumah yang terbuat dari seng/ genteng dan endapan lumpur dan sampah yang diperlukan

Sekda		FD Pemrakarsa	
Asisten Pemda Kesejahteraan		FD Terkalt	
Kabag Hukum			

pekerjaan pembersihan lumpur yang tergenang pada kawasan bantaran sungai grindulu dan wilayah sekitarnya.

Rekapitulasi kerusakan sektor perumahan berdasarkan kategori tingkat kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat yang tersebar di enam kecamatan yakni kecamatan 12 kecamatan secara lengkap disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Kerusakan Rumah Pascabencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017

Kecamatan	Kerusakan Ringan	Kerusakan Sedang	Kerusakan Berat	Total	
				Rumah	Unit
A. PERMUKIMAN					
1. PERUMAHAN					
1.1. PERUMAHAN					
1.1.1. RUMAH					
		1487	1260	1246	3982
DONOROJO	24	2	0		Unit
PUNUNG	129	45	58		Unit
PRINGKUKU	77	25	20		Unit
PACITAN	98	210	55		Unit
KEBONAGUNG	194	322	273		Unit
ARJOSARI	214	178	176		Unit
NAWANGAN	136	84	188		Unit
BANDAR	110	40	51		Unit
TEGALOMBO	57	89	44		Unit
TULAKAN	348	139	284		Unit
NGADIROJO	71	93	76		Unit
SUDIMORO	29	23	20		Unit
1.1.2. ISI RUMAH					
DONOROJO	24	2	0		Unit
PUNUNG	129	45	58		Unit
PRINGKUKU	77	25	20		Unit
PACITAN	98	210	55		Unit
KEBONAGUNG	194	322	273		Unit
ARJOSARI	214	178	176		Unit
NAWANGAN	136	84	188		Unit
BANDAR	110	40	51		Unit
TEGALOMBO	57	89	44		Unit
TULAKAN	348	139	284		Unit
NGADIROJO	71	93	76		Unit
SUDIMORO	29	23	20		Unit

Banjir Dan Longsor Pacitan pada sektor permukiman menimbulkan kerusakan sebesar Rp. 180,758,220,000 dan kerugian mencapai Rp 9,904,500,000, sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 190,662,720,000. Angka tersebut terdiri dari sub sektor perumahan.

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Tabel 3.4

Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
A.	PERMUKIMAN	296.275.800.000	39.114.500.000	335.390.300.000
1	Perumahan	296.275.800.000,00	39.114.500.000,00	335.390.300.000,00

Pada sub sektor perumahan, akibat banjir dan Longsor di Kabupaten menyebabkan kerusakan sebesar Rp 296,275,800,000.00 dan kerugian mencapai Rp 39.144.500.000,00 sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 335.390.300.000.00 Angka tersebut diperoleh dari penilaian kerusakan pada komponen bangunan rumah sebesar Rp 278.749.800.000,00 dan penilaian kerusakan isi rumah yang berupa mebelair dan peralatan lainnya sebesar Rp 17.526.000,000,00 Penilaian kerugian yang terjadi pada sub sektor perumahan adalah akibat timbulnya biaya untuk pembersihan material sampah-sampah bangunan dan lumpur yang bercampur dengan air hujan, serta pemberesan puing-puing rumah dengan asumsi pembersihan dilakukan oleh tenaga manusia, biaya upah setempat serta lama waktu pembersihan yang dilakukan. Selain kerugian akibat pembersihan, juga timbul kerugian akibat penyediaan hunian sementara bagi warga masyarakat yang harus mengungsi.

Banjir dan Longsor menyebabkan kerusakan sebagian besar rumah yang berada dibantaran sungai serta permukiman yang ada di sekitar pegunungan yang harus dilakukan penanganan secara permanen untuk mencegah banjir dan tanah longsor susulan atau dikemudian hari dikarenakan sampai saat ini intensitas hujan masih tinggi.

3.2.1.2. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Meningkatnya Risiko Gangguan Akses

Pascabencana banjir dan Longsor memberi dampak masalah perumahan pada masyarakat di wilayah sepanjang bantaran sungai yang tidak dapat dihuni kembali serta daerah pegunungan yang terdampak longsor. Sebagian masyarakat mengungsi dari lokasi tersebut dan tinggal di tempat pengungsian, menumpang pada tempat saudara ataupun menyewa rumah di luar kawasan yang terkena dampak bencana.

Masyarakat yang mengungsi sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, serta swasta. Bagi para korban yang berprofesi sebagai petani, bila lokasi bertani dan berkebun jauh dari tempat tinggal mereka melebihi radius 3-5 km, maka akses masyarakat ke lokasi tempat bertani dan berkebun menjadi semakin jauh dan menambah waktu perjalanan menuju tempat kerja.

Gangguan Fungsi

Bencana banjir dan Longsor menyebabkan kerusakan pada komponen bangunan rumah, seperti: pintu, jendela, dinding, penutup atap, ataupun bangunan roboh/runtuh, hanyut, rumah yang hanya terendam genangan sampah, dan lumpur serta isi rumah berupa mebelair dan peralatan lainnya. Hal ini terjadi pada perumahan masyarakat di wilayah sekitar bantaran sungai.

Arif Hicra		
Sekda		
Ases: Per & Kota		
Kabag Hukum		FD Terkait

Secara bagian besar kerusakannya pada fisik struktur bangunan untuk rusak sedang dan ringan tidak menunjukkan kerusakan yang berarti hanya terdapat kerusakan pada kusen, daun pintu, dinding, namun masyarakat membutuhkan tenaga untuk membersihkan endapan sampah dan lumpur yang diakibatkan banjir dan Longsor. Namun masih banyak terdapat rumah masyarakat yang hanyut dan roboh yang dikategorikan rusak berat.

Dengan kondisi rumah runtuh/ roboh, rumah hanyut dan bagian rumah yang terendam, maka pada sebagian besar rumah penduduk berisikan sampah puing-puing rumah, kayu dan genangan lumpur akibat banjir yang menyebabkan fungsi rumah sebagai tempat tinggal sangat terganggu dan tidak dapat berfungsi, serta rumah dapat sewaktu-waktu ambruk.

Meningkatnya risiko

Banjir dan Longsor pada sektor permukiman di wilayah sekitar sepanjang hamparan bantaran sungai yang tidak dapat dihuni kembali, untuk segera dicarikan relokasi bagi masyarakat di sepanjang bantaran sungai. Hal ini disebabkan karakteristik dari sungai dan dampak dari hulu sungai yang dampak dari ketidaksesuaian pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang mempunyai kepentingan tersendiri yang tidak memikirkan dampaknya bagi masyarakat disepanjang bantaran sungai grindulu.

Sampai saat ini bencana banjir dan Longsor telah berlangsung, untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi yang lebih buruk lagi, pemerintah akan menertibkan pemilik atau pengguna lahan pada kawasan hulu sungai dan disepanjang bantaran sungai untuk segera dilakukan relokasi. Bila masyarakat masih tetap bertahan untuk tinggal pada daerah disepanjang bantaran sungai akan semakin tingginya risiko akibat bencana banjir dikemudian hari.

3.2.1.3. Kajian Dampak Bencana

Kerusakan pada sektor permukiman yang terjadi pada komponen bangunan rumah dan kerusakan isi rumah yang berupa mebelair dan peralatan lainnya akibat bencana memberikan dampak langsung terhadap aset bangunan rumah yang sama sekali hancur dan tidak dapat ditempati kembali serta aset bangunan rumah yang masih bisa dipulihkan/ diperbaiki.

Untuk korban terdampak yang rumah tinggalnya rusak dan tidak dapat ditempati ataupun berada di daerah berbahaya terjadinya bencana banjir susulan selanjutnya mengungsi dari lokasi tersebut dan tinggal di tempat pengungsian, menumpang pada tempat saudara ataupun menyewa rumah di luar kawasan yang terkena dampak bencana.

Dampak lainnya yang tidak langsung, diantaranya hambatan produktivitas akibat aset yang rusak/hilang akibat bencana, seperti potensi pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah dan lain-lain selama beberapa waktu.

3.2.2. Sektor Infrastruktur

3.2.2.1. Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh banjir akibat meluap dan jebolnya tanggul Sungai Grindulu dan Longsor pada sebagian besar wilayah Kabupaten pada sub sektor transportasi darat, energi, air dan sanitasi, dan sumber daya air (SDA). Pada sub sektor transportasi darat, banjir dan Longsor menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian ruas jalan kabupaten, jalan lingkungan, jembatan kabupaten, jembatan lingkungan dan kendaraan hanyut, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Skda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten Pembantu Kesra	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	

Tabel 3.5
Kerusakan Sub Sektor Transportasi

Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017

Kategori	Kerusakan	Lokasi	Dampak			
			Benak	Spesial	Normal	SA
B. INFRASTRUKTUR						
1. INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN						
1.1. INFRASTRUKTUR JALAN						
1.1. JALAN A. NASIONAL						
1	Ruas Jalan Glonggong - Pacitan - Hadiwarno - Bts. Kab. Trenggalek					M'
2	Link.048	Kec. Pringkuku				M'
3	Link 049	Kec. Kebonagung, Kec. Tulakan, Kec. Ngadirojo, Kec. Sudimoro				M'
4	Link 050	Kec. Pacitan, Kec. Kebonagung, Kec. Tulakan, Ngadirojo				M'
1.1. INFRASTRUKTUR B. JALAN PROVINSI						
1	Jalan Pacitan - Ponorogo					
2	KM 254+300	Kec. Tegalombo	100			M'
3	KM 258+500	Arjosari	60			M'
4	KM 265+800	Arjosari	20			M'
5	Jalan Arjosari - Purwantoro					
6	KM 269-250	Arjosari	75			M'
7	KM 269-580	Arjosari	75			M'
8	KM-269-950	Arjosari	30			M'

Paraf Hierarki

Sekda *[Signature]*

Asisten Sekda *[Signature]*

Kabag. Hukum *[Signature]*

Asisten PD Fomra *[Signature]*

PD Terka *[Signature]*

9	KM 267+000	Arjosari	75			M'
10	KM 272+820	Arjosari	25			M'
11	KM 281+750	Arjosari	40			M'
12	KM 282+650	Arjosari	20			M'
13	KM 283+600	Nawangan	25			M'
14	KM 283+850	Nawangan	40			M'
15	KM 281+900	Nawangan	40			M'
16	KM 284+200	Nawangan	25			M'
1.1.	JALAN					
C.	KABUPATEN /KOTA					
1	Jalan Teleng Ria	Pacitan	200			M'
2	Jalan Bangunsari - Ngadirejan	Pacitan	500			M'
3	Jalan Tumenggung Notopuro	Pacitan	200			M'
4	Jalan Semanten - Ponggok - Tamanasri	Pacitan	75			M'
5	Jalan Sambong - Glinggangan	Pacitan	25			M'
6	Jalan Sironoboyo - plumbungan	Pacitan	100			M'
7	Jalan Gunungpegat - Kebonagung	Kebonagung	100			M'
8	Jalan Kali Karang Dsn. Krajan Karangnongko	Kebonagung	100			M'
9	Jalan Ketrowonojoyo - Sidomulyo	Kebonagung	25			M'
10	Jalan Sidomulyo - Plumbungan	Kebonagung	40			M'
11	Jalan Karanggede - Temon	Arjosari	600			M'
12	Jalan Jatimalang - Karanggede	Arjosari	300			M'
13	Jalan Arjosari - Gondosari	Pringkuku	1,000			M'
	Jalan Soboro - Pringkuku	Pringkuku	500			M'

Paraf Hicarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

15	Jalan Punung - Kalak	Punung	50			M'
16	Jalan Punung - Gondosari	Punung	200			M'
17	Jalan Gondosari - Tinatar - Batas Jateng	Punung	1,500			M'
18	Jalan Dsn. Ngepoh Ds. Mendolo Lor	Punung	100			M'
19	Jalan Dsn. Pangkah Ds. Mendolo Lor	Punung	100			M'
20	Jalan Dsn. Bero Ds. Mendolo Lor	Punung	100			M'
21	Jalan Nawangan - Jangkung	Nawangan	100			M'
22	Jalan Jetislor - Ngromo	Nawangan	100			M'
23	Jalan Pagergunung - Jangkung	Nawangan	300			M'
24	Jalan Tokawi - Batas Jateng	Nawangan	150			M'
25	Jalan Nawangan - Mujing	Nawangan	200			M'
26	Jalan Nawangan - Ngunut	Nawangan	200			M'
27	Jalan Sempu - Ngromo	Nawangan	75			M'
28	Jalan Penggung - Sidorejo	Nawangan	50			M'
29	Jalan Bandar - Watupatok	Bandar	125			M'
30	Jalan Kebondalem - Bandar	Bandar	300			M'
31	Jalan Kalak - Batas Jateng	Donorojo	45			M'
32	Jalan Sukorejo - Klepu	Sudimoro	100			M'
33	Jalan Sudimoro - Pagerlor	Sudimoro	35			M'
	Jalan Krajan - Kaligoro	Sudimoro	75			M'

Paraf Hicarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Asisten	<i>[Signature]</i>
PD. Kom. 34	<i>[Signature]</i>
PD. Terkait	

	35	Jalan Karangturi - Ngobyok	Sudimoro	30			M'
	36	Jalan Sembowo - Batas Ponorogo	Sudimoro	150			M'
	37	Jalan Cangkring - Sembowo - Batas Ponorogo	Ngadirojo	50			M'
30						M'	
50						M'	
	38	Jalan Ngadirojo - Wonokarto	Ngadirojo	100			M'
	39	Jalan Pagerejo - Padi	Ngadirojo	100			M'
	40	Jalan Hadiwarno - Wonodadiwet an	Ngadirojo	150			M'
		Jalan Hadiwarno - wonodadiwet an	Ngadirojo	100			M'
	41	Jalan Tulakan - Wonokarto	Tulakan	200			M'
	42	Jalan Bubakan - Ngile	Tulakan	20			M'
	43	Jalan Tulakan - Tegalombo	Tulakan	30			M'
	44	Jalan Pentung - Jetak	Tulakan	100			M'
	45	Jalan Gesingan - Kropyok	Tulakan	20			M'
	46	Jalan Ketro - Slahung	Tulakan	50			M'
	47	Jalan Tegalombo - Bandar	Tegalombo	200			M'
			Bandar	300			M'
	48	Jalan Pucangombo - Kasihan	Tegalombo	75			M'
	49	Jalan Tegalombo - Kemuning - Bandar	Tegalombo	50			M'
		Jalan					
	50	Jalan Gematarjo - Watupatok	Bandar	50			M'
	51	Jalan Tumpuk - Ploso	Bandar	40			M'


Perizinan	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Mabes	✓
Hukum	✓


52	Jalan Sidomulyo - Wawaran	Kebonagung	50			M'
53	Jalan Borang - Gegeran	Arjosari	50			M'
54	Jalan Nalangan - Jeruk	Bandar	100			M'
55	Jalan Mentoro - Gunungsari	Pacitan	50			M'
56	Jalan Ngadirojo - Sudimoro	Ngadirojo	50			M'
57	Jalan Pancer Door	Pacitan	200			M'
58	Jalan Mlati - Tinatar	Punung	700			M'
59	Jalan Ngadirejan - Tamanasri	Pringkuku	150			M'
60	Jalan Kendal - Wareng	Punung	75			M'
1.1. JALAN LINGKUNGAN D.						
1	Jalan Lingkungan RT.5 Lingkungan Teleng Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan	Pacitan	100			m'
2	Jalan Lingkungan Teleng Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan	Pacitan	50			m'
3	Jalan Lingkungan RT.2,3,4/04 Dusun Bengkal Desa Tanjungsari Kec. Pacitan	Pacitan	100			m'
4	Jalan Lingkungan RT.2/4 Dusun Ngetol Desa Widoro Kec. Pacitan	Pacitan	50			m'
5	Jalan Lingkungan Dusun Dungkulan Desa Mentoro Kec. Pacitan	Pacitan	30			m'

Perizinan	
Sekda	7
Asisten Per & Kota	
Kabag Hukum	2




Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

6	Jalan Lingkungan RT.1,2 Dusun Krajan Desa Banjarsari Kec. Pacitan	Pacitan	30			m'
7	Jalan Lingkungan RT. 1,2,3,5/7 Dusun Mloko Desa Sedeng Kec. Pacitan	Pacitan	200			m'
8	Jalan Lingkungan RT.1/8 Dusun Jeruk Desa Sedeng Kec. Pacitan	Pacitan	100			m'
9	Jalan Lingkungan RT. 1,2/05 Dusun Krajan 3 Desa Sedeng Kec. Pacitan	Pacitan	65			m'
10	Jalan Lingkungan RT.1/1 Dusun Kebon Desa Sedeng Kec. Pacitan	Pacitan	40			m'
11	Jalan Lingkungan Dusun Sumber Desa Ponggok Kec. Pacitan	Pacitan	200			m'
12	Jalan Lingkungan Dusun Gamping Desa Ponggok Kec. Pacitan	Pacitan	200			m'
13	Jalan Lingkungan Dusun Tubang Desa Ponggok Kec. Pacitan	Pacitan	90			m'
14	Jalan Lingkungan Dusun Banaran Desa Ponggok Kec. Pacitan	Pacitan	200			m'

Struktur Organisasi	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Panglima	
Asisten Panglima	
FD Pemrakarsa	
FD Terkait	

	15	Jalan Lingkungan RT 2 Dusun Gamping Desa Ponggok Kec. Pacitan	Pacitan	100			m'
	16	Jalan Lingkungan Dusun Krajan Desa Sambong Kec. Pacitan	Pacitan	55			m'
	17	Jalan Lingkungan RT.2,3/06 Dusun Benggle Desa Sambong Kec. Pacitan	Pacitan	100			m'
	18	Jalan Lingkungan RT.2/7 Dusun Bareng Desa Sambong Kec. Pacitan	Pacitan	50			m'
	19	Jalan Lingkungan RT.1,2/4 Dusun Sengon Desa Sambong Kec. Pacitan	Pacitan	150			m'
	20	Jalan Lingkungan Dusun Sawahan Desa Sambong Kec. Pacitan	Pacitan	30			m'
	21	Jalan Lingkungan Dusun Duren Desa Sambong Kec. Pacitan	Pacitan	44			m'
	22	Jalan Lingkungan Desa Tambakrejo Kec. Pacitan	Pacitan	70			m'
	23	Jalan Lingkungan RT 1/3 Dusun Nglegol Desa Bolosingo Kec. Pacitan	Pacitan	50			m'

Paraf Perarki	
Sekda	
Asisten Perki Kesa	
Kabag Hukum	

23	Dusun Nglegol	Desa Bolosingo
Asisten		
FD Pemrakor		
FD Temant		

	24	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Craken Kulon Desa Sumberharjo Kec. Pacitan	Pacitan	8			m'
	25	Jalan Lingkungan RT.01/5 Dusun Purwodadi Desa Jatimalang Kec. Arjosari	Arjosari	12			m'
	26	Jalan Lingkungan RT.02/6 Dusun Purwodadi Desa Jatimalang Kec. Arjosari	Arjosari	38			m'
	27	Jalan Lingkungan RT.02/3 Dusun Jenggrik Desa Gayuhan Kec. Arjosari	Arjosari	10			m'
	28	Jalan Lingkungan Dusun Jenggrik Desa Gayuhan Kec. Arjosari	Arjosari	200			m'
	29	Jalan Lingkungan RT. 1/7 Dusun Krajan Desa Gayuhan Kec. Arjosari	Arjosari	120			m'
	30	Jalan Lingkungan RT.5/2 Dusun Sidorejo Desa Gayuhan Kec. Arjosari	Arjosari	25			m'
	31	Jalan Lingkungan RT.4.5.6/5 Dusun Trobakal-Desa Karangrejo Kec. Arjosari	Arjosari	100			m'

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	

31	Asiaton	<i>[Signature]</i>
PD Pem		<i>[Signature]</i>
FD Ter		

32	Jalan Lingkungan RT.6,8/6 Dusun Wonosari Desa Karangrejo Kec. Arjosari	Arjosari	350			m'
33	Jalan Lingkungan RT.01/1 Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kec. Arjosari	Arjosari	200			m'
34	Jalan Lingkungan RT.01/2 Dusun Brungkah Desa Karangrejo Kec. Arjosari	Arjosari	100			m'
35	Jalan Lingkungan RT.2/4 Dusun Ringin Putih Desa Karangrejo Kec. Arjosari	Arjosari	50			m'
36	Jalan Lingkungan RT 5/7 Dusun Gading Desa Temon Kec. Arjosari	Arjosari	200			m'
37	MCK Masjid Al Ikhlas RT 5/7 Dusun Gading Desa Temon Kec. Arjosari	Arjosari	0			m'
38	Talud Jalan RT 5/7 Dusun Gading Desa Temon Kec. Arjosari	Arjosari	100			m'
39	Jalan Lingkungan Dusun Tenggara Desa	Kebonagung	100			m'

Paraf Hierarchy	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Penc. Plumbungan	
Asisten	Kec. <input checked="" type="checkbox"/>
FD Pembinaan	Kebonagung <input checked="" type="checkbox"/>
FD Tertalit	<input checked="" type="checkbox"/>

	40	Jalan Lingkungan Dusun Kasihan Desa Ketepung Kec. Kebonagung	Kebonagung	300			m'
	41	Jalan Lingkungan Dusun Pule Desa Ketepung Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'
	42	Jalan Lingkungan Dusun Krajan Desa Ketepung Kec. Kebonagung	Kebonagung	200			m'
	43	Jalan Lingkungan Dusun Gombang Desa Ketepung Kec. Kebonagung	Kebonagung	50			m'
	44	Jalan Lingkungan Kebon Dusun Kedungdowo Desa Wonogondo Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'
	45	Jalan Lingkungan Bleber Dusun Kedungdowo Desa Wonogondo Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'
	46	Jalan Lingkungan Dungkebo Dusun Krajan Desa Wonogondo Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>




Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
FD Terkait	


47	Jalan Lingkungan Sor Gedhong Dusun Krajan Desa Wonogondo Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'
48	Jalan Lingkungan RT.03/02 Dsn Watuadeg Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	300			m'
49	Jalan Lingkungan RT.02/02 Dsn Watuadeg Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	60			m'
50	Jalan Lingkungan Dusun Watuadeg Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'
51	Jalan Lingkungan Dusun Kalitani/Jalan Ke Bakung Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	20			m'
52	Jalan Lingkungan RT 03/04 Dsn.Kalitani Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'
53	Jalan Lingkungan Klepu Dusun Gading Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	60			m'
54	Jalan Lingkungan Dusun Gading Desa	Kebonagung	98			m'

Faraf Hierarki	
Sekda	
Asst. Sekda	
Kabag Hukum	


Part	Karangnongko
Asisten	Kec.
PD/Pemrakor	Kebonagung
FD Terkalt	



55	Jalan Lingkungan Kali Ngembak Dsn Tawang Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	70			m'
56	Jalan Lingkungan Gondang Legi Dsn.Tawang Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	120			m'
57	Jalan Lingkungan RT.01 Dsn Tawang Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	30			m'
58	Jalan Lingkungan RT.02 Dsn Tawang Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	140			m'
59	Jalan Lingkungan Dusun Pucang Anom Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	180			m'
60	Jalan Lingkungan Duwet Dsn Pucang Anom Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	90			m'
61	Jalan Lingkungan Dusun Jaten Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Kebonagung	400			m'
62	Jalan Lingkungan Dusun Salak Desa	Kebonagung	300			m'

Paraf Hierarchy	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf	Geinbuk Kec.
Asisten	Kebonagung
FD Pemrakarsa	
FD Terkalt	

	63	Jalan Lingkungan Dusun Salak Desa Gembuk Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'
	64	Jalan Lingkungan Dusun Sonorejo Desa Gembuk Kec. Kebonagung	Kebonagung	47			m'
	65	Jalan Lingkungan Dusun Krajan Desa Gembuk Kec. Kebonagung	Kebonagung	20			m'
	66	Jalan Lingkungan Dusun Mando Desa Gembuk Kec. Kebonagung	Kebonagung	157			m'
	67	Jalan Lingkungan Dusun Sriten Desa Gembuk Kec. Kebonagung	Kebonagung	60			m'
	68	Jalan Lingkungan RT.4,5/13 Dusun Wawaran Desa Sidomulyo Kec. Kebonagung	Kebonagung	380			m'
	69	Jalan Lingkungan RT.4/13 Dusun Sawahan Desa Sidomulyo Kec. Kebonagung	Kebonagung	40			m'
	70	Jalan Lingkungan RT.2/11 Dusun Klawe Desa Sidomulyo Kec. Kebonagung	Kebonagung	200			m'

Paraf hierarki	
Sekda	
Asst. Pemb. Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Kecamatan	
Asisten	
FD Pemrakarsa	
FD Terkait	

71	Jalan Lingkungan RT.3/2 Dusun Tekil Desa Gawang Kec. Kebonagung	Kebonagung	20			m'
72	Jalan Lingkungan RT.2/9 Dusun Krajan Desa Gawang Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'
73	Jalan Lingkungan RT.3/9 Dusun Krajan Desa Gawang Kec. Kebonagung	Kebonagung	50			m'
74	Jalan Lingkungan RT.1,3 Dusun Salam Desa Karanganyar Kec. Kebonagung	Kebonagung	450			m'
75	Jalan Lingkungan RT.5 Dusun Banar Desa Karanganyar Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'
76	Jalan Lingkungan Kumplit RT.1 Dusun Jurugan Desa Karanganyar Kec. Kebonagung	Kebonagung	100			m'
77	Jalan Lingkungan RT.1,4 Dusun Krajan Desa Karanganyar Kec. Kebonagung	Kebonagung	220			m'
78	Jalan Lingkungan RT.1,2 Dusun Krajan Desa Karanganyar Kec. Kebonagung	Kebonagung	185			m'

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Asisten	<i>[Signature]</i>
FD Pemda	<i>[Signature]</i>
FD Termin	<i>[Signature]</i>

79	Jalan Lingkungan RT.2 Dusun Pakel Desa Karanganyar Kec. Kebonagung	Kebonagung	200			m'
80	Jalan Lingkungan RT.1,2 Dusun Sumber Desa Karanganyar Kec. Kebonagung	Kebonagung	150			m'
81	Jalan Lingkungan RT.1,2 Dusun Pakis Desa Karanganyar Kec. Kebonagung	Kebonagung	300			m'
82	Jalan Lingkungan RT.1,2 Dusun Pakis Desa Karanganyar Kec. Kebonagung	Kebonagung	125			m'
83	MCK Masjid RT.2 Dusun Pakis Desa Karanganyar Kec. Kebonagung	Kebonagung	10			m'
84	Jalan Lingkungan RT.01/2 Dusun Ketro Desa Kalipelus Kec. Kebonagung	Kebonagung	50			m'
85	Jalan Lingkungan RT.01/4 Dusun dadapan Desa Kalipelus Kec. Kebonagung	Kebonagung	60			m'

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf	Kebonagung
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

86	Jalan Lingkungan RT.02/5 Dusun Bibit Desa Kalipelus Kec. Kebonagung	Kebonagung	50			m'
87	Jalan Lingkungan RT.02/3 Dusun Pagergunung Desa Kalipelus Kec. Kebonagung	Kebonagung	120			m'
88	Jalan Lingkungan dan Saluran Dusun Ngampungan Desa Punjung Kec. Kebonagung	Kebonagung	50			m'
89	Jalan Lingkungan RT.01/1 Dusun Krajan Desa Katipugal Kec. Kebonagung	Kebonagung	45			m'
90	Jalan Lingkungan Geblak Dusun Kepu Desa Katipugal Kec. Kebonagung	Kebonagung	50			m'
91	Jalan Lingkungan Gebang RW.02 Dusun Krajan Desa Katipugal Kec. Kebonagung	Kebonagung	50			m'
92	Jalan Lingkungan Menuju Pantai Tawang Desa Katipugal Kec. Kebonagung	Kebonagung	50			m'

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asst. Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Pada Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
FD Terkait	<i>[Signature]</i>

93	Jalan Lingkungan RT. 1,2/3 Dusun Juwono Desa Mantren Kec. Kebonagung	Kebonagung	200			m'
94	Jalan Lingkungan RT 2/5 Dusun Krajan Desa Mantren Kec. Kebonagung	Kebonagung	50			m'
95	Jalan Lingkungan RT.1,2/6 Dusun Wates Desa Mantren Kec. Kebonagung	Kebonagung	300			m'
96	Jalan Lingkungan Dusun Tenggar Desa Wonoanti Kec. Tulakan	Tulakan	50			m'
97	Jalan Lingkungan RT.04 Dusun Ngunut Desa Wonoanti Kec. Tulakan	Tulakan	60			m'
98	Jalan Lingkungan Dusun Pojok Desa Wonoanti Kec. Tulakan	Tulakan	60			m'
99	Jalan Lingkungan Dusun Duren Desa Wonoanti Kec. Tulakan	Tulakan	60			m'
100	Jalan Lingkungan Dusun Kepek Desa Kalikuning Kec. Tulakan	Tulakan	60			m'
101	Jalan Lingkungan Jurug Gringsing Desa Ploso Kec. Tegalombo	Tegalombo	60			

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Desa Ploso	
Asisten Kec.	<i>[Signature]</i>
FD Pemrakarsa Tegalombo	<i>[Signature]</i>
FD Terkait	

102	Jalan Lingkungan Dusun Tanjung Desa Ploso Kec. Tegalombo	Tegalombo	40			
103	Jalan Lingkungan Dusun Weru Desa Ploso Kec. Tegalombo	Tegalombo	45			
104	Jalan Lingkungan Dusun Berug Desa Ploso Kec. Tegalombo	Tegalombo	35			
105	Jalan Lingkungan RT.07/15 Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kec. Tegalombo	Tegalombo	25			
106	Jalan Lingkungan Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kec. Tegalombo	Tegalombo	50			
107	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05/06 Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kec. Tegalombo	Tegalombo	170			
108	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03/05 Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kec. Tegalombo	Tegalombo	90			
109	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.13/04 Dusun Krajan Desa Ploso Kec. Tegalombo	Tegalombo	45			

Paraf Hierarki

Sekda	
Asisten Pesa & Kepra	
Kabag Hukum	




Pem. Kes	109	RT.13/04
Asisten		Dusun Krajan
FD Perencanaan		Desa Ploso
FD Tata		Kec. Tegalombo



	110	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.17/08 Dusun Weru Desa Ploso Kec. Tegalombo	Tegalombo	200			
	111	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.12/13 Dusun Pager Desa Pucangombo Kec. Tegalombo	Tegalombo	50			
	112	Jalan Lingkungan Desa Jetislor-Desa Pakis Baru Desa Jetislor Kec. Nawangan	Nawangan	50			
	113	Jalan Lingkungan RT 02 Dusun Karang-Brungkah Desa Pagerejo Kec. Ngadirojo	Ngadirojo	300			
	114	Jalan Lingkungan Desa Wonodadi Kulon Kec. Ngadirojo	Ngadirojo	60			
	1.2. INFRASTRUKTUR JEMBATAN						
	1.2. JEMBATAN DI JALAN NASIONAL						
	A.						
	1	Jembatan di Jalan Nasional	Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro				M'
	1.2. JEMBATAN B. GANTUNG						
		Jembatan Gantung Tambakrejo	Pacitan	100			M'

Parsif Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Asisten	<i>[Signature]</i>
FD Asisten	<i>[Signature]</i>
FD Terka	<i>[Signature]</i>

	2	Jembatan Gantung Banjarsari	Pacitan	70			M'
	3	Jembatan Gantung Baniarsari II	Pacitan	1			pilar
	4	Jembatan Kembang	Pacitan	150			M'
	5	Jembatan Gantung Kedungbendo	Arjosari	60			M'
	6	Jembatan Kebon Ds. Kedungbendo	Arjosari	60			M'
	7	Jembatan Gantung Kali Atas	Ngadirojo	30			M'
	1.2. C.	JEMBATAN KABUPATEN /KOTA					
	1	Jembatan Sawahan	Pacitan	4			M'
	2	Jembatan Sambong	Pacitan	8			M'
	3	Jembatan Gedangan	Tegalombo	50			M'
	4	Jembatan Tleken Ds. Gunungsari	Arjosari	10			M'
	5	Jembatan Borang	Arjosari	20			M'
	6	Jembatan Tremas	Arjosari	24			M'
	7	Jembatan Gayuhan	Arjosari	10			M'
	8	Jembatan Nalangan Ds. Karangrejo	Arjosari	50			M'
	9	Jembatan Pagutan	Arjosari	8			M'
	10	Jembatan Punjung - Banjarjo	Kebonagung	20			M'
	11	Jembatan Katosan	Ngadirojo	6			M'
	12	Jembatan Dongkel Cokrokembang	Ngadirojo	9			M'
	13	Jembatan Wonodadi Wetan	Ngadirojo	12			M'
	14	Jembatan Watukarung	Pringkuku	24			M'

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Tabel 3.6

**Kerusakan Sub Sektor Sarpras Perhubungan
Pascabencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017**






Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Peralatan	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sat
1. TRANSPORTASI						
2.1 TERMINAL						
A. Halte						
1	Halte Angkutan Umum Ds. Semanten	Kec. Pacitan		70		m2
B. Penerangan Jalan Umum						
1	Jl. Ranoe Widjojo	Kec. Pacitan	1			unit
2	Jl. Bts Kota Pacitan-Glombang	Kec. Pacitan		1		unit
3	Jl. Teleng Ria	Kec. Pacitan	2			unit
4	Jl. Buwono Keling	Kec. Kebonagung	1			unit
5	Jl. Pramuka	Kec. Pacitan		1		unit
6	Jl. Wahid Hasyim	Kec. Pacitan			1	unit
7	Jl. Ahmad Dahlan	Kec. Pacitan		1		unit
8	Jl. P. Sudirman	Kec. Pacitan		1		unit
9	Jl. Pacitan - Ponorogo	Kec. Pacitan		1		unit
PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN						
C. Komputer Pengujian						
1	Komputer Pengujian	Pacitan	3			
2	Laptop Pengujian Kendaraan Bermotor	Pacitan	1			
3	CO HC tester Pengujian Kendaraan Bermotor	Pacitan	1			
4	Smoke tester Pengujian Kendaraan Bermotor	Pacitan	1			
5	Side slip tester Pengujian Kendaraan Bermotor	Pacitan	1			
6	Brake tester Pengujian	Pacitan	1			

Paraf Harkati	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pm & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemas	<i>[Signature]</i>
PD Terh	

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sat
	Kendaraan Bermotor					
7	Genset Pengujian Kendaraan Bermotor	Pacitan	1			
8	Kompresor Pengujian Kendaraan Bermotor	Pacitan	1			
9	Pompa air Pengujian Kendaraan Bermotor	Pacitan	1			
D. Trafif Light						
1	Trafif Light Alijah Kel. Baleharjo	Pacitan	1			
2	Trafif Light Bunderan Arjowinagung	Pacitan	1			
3	Trafif Light Ds. Semanten	Pacitan		1		
E. Rambu						
1	Rambu	Pacitan	50			
2	Guardrail	Pacitan		160		
3	Road Barrier	Pacitan	10			
4	Traffic Cone	Pacitan	15			

Kerusakan sub sektor energi, air dan sanitasi terjadi pada daerah terdampak banjir dan Longsor merusak jaringan listrik dan sarana air bersih. Jaringan listrik yang mengalami kerusakan akibat luapan banjir dan Longsor yang membawa materi lumpur setelah turunnya hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan rusaknya jaringan listrik di beberapa wilayah Kabupaten. Sedangkan sarana prasarana air bersih yang terdampak banjir dan Longsor terdapat pada beberapa kecamatan diseluruh Kabupaten sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asst. Pen. &nesia		FD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		FD Terkait	

Tabel 3.7

**Kerusakan Sub Sektor Sarana Air Bersih
Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017**

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sat.
2. AIR DAN SANITASI (Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih)						
1. SARPRAS DRAINASE						
1	Saluran Drainase Jl. Maghribi		80			m3
2	Saluran Drainase Purworejo		60			m3
3	Saluran Drainase Jl. A.Yani Depan Bali Asri		20			m3
4	Saluran Drainase A.H Nasution		25			m3
5	Saluran Drainase Jl. Teleng Ria		30			m3
6	Saluran Drainase Pelen		20			m3
7	Saluran Drainase Sudetan Kalitani (Bok Dekem)		5			m3
8	Saluran Drainase Jl. Tentara Pelajar		30			m3
9	Saluran Drainase Jl. Arif Rahman Hakim		20			m3
10	Saluran Drainase Jl. S. Parman		20			m3
2. SARPRAS AIR BERSIH PERDESAAN						
1	Sarana Air Bersih Ds. Jetislor	Kec. Nawangan	228			m
2	Sarana Air Bersih Ds. Nogosari	Kec. Ngadirojo	204			m
3	Sarana Air Bersih Ds. Sawahan	Kec. Donorojo	1			Unit
4	Sarana Air Bersih Ds. Dersono	Kec. Pringkuku	1			Unit

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Per. Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag. Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Say
	5 Sarana Air Bersih Ds. Ngreco	Kec. Tegalombo	30			m
	6 Sarana Air Bersih Ds. Purwoasri	Kec. Kebonagung	30			m
	7 Sarana Air Bersih Ds. Jatimalang	Kec. Arjosari				
	8 Sarana Air Bersih Ds. Wawaran	Kec. Kebonagung	30			m
	9 Sarana Air Bersih Ds. Tokawi	Kec. Nawangan	160			m
	10 Sarana Air Bersih Ds. Kasihan	Kec. Tegalombo	18			m
	11 Sarana Air Bersih Ds. Pagerejo	Kec. Ngadirojo	120			m
	12 Sarana Air Bersih Ds. Bangunsari	Kec. Bandar	150			m
	13 Sarana Air Bersih Ds. Petungsinarang	Kec. Nawangan	60			m
	14 Sarana Air Bersih Ds. Bodag	Kec. Ngadirojo	120			m
	15 Sarana Air Bersih Ds. Karanganyar	Kec. Kebonagung	120			m
	16 Sarana Air Bersih Ds. Wonoasri	Kec. Ngadirojo	60			m
	17 Sarana Air Bersih Ds. Watukarung	Kec. Pringkuku	25			m
	18 Sarana Air Bersih Ds. Gembuk	Kec. Kebonagung	204			m
	3. SANITASI					
	1 Sarana Air bersih Ds. Kebonagung TPS 3R	Kec. Kebonagung	22			m3

Kerusakan sub sektor sumber daya air (SDA) pada sungai dan sub daerah aliran sungai (DAS) pada daerah terdampak banjir dan Longsor di beberapa Kecamatan di Kabupaten. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 3.8

Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten Pech & Kesa	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	

Tabel 3.8

**Kerusakan Sub Sektor Sungai dan Sub Das
Pascabencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017**

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sejarah	Rincian	Satuan
3. SUMBER DAYA AIR (PENGAIRAN)						
A. Sungai						
1	Parapet dan Tanggul Sungai Grindulu Ds. Tanjungsari	Pacitan	45			M'
2	Tanggul Sungai Grindulu Ds. Ploso	Pacitan	50			M'
3	Parapet Sungai Jelok Ds. Kayen	Pacitan	45			M'
4	Parapet Sungai Jelok Ds. Sukoharjo	Pacitan	90			M'
5	Parapet Sungai Jelok Ds. Kembang	Pacitan	50			M'
6	Parapet Sungai Jelok Ds. Sirnobojo	Pacitan	30			M'
7	Parapet Sungai Jelok Ds. Purwoasri	Kebonagung	80			M'
8	Tebing Sungai Brungkah Ds. Karangrejo & Karanggede	Arjosari	5000			M'
9	Parapet Sungai Mlati Ds. Sedayu	Arjosari	70			M'
10	Parapet Sungai Brungkah Ds. Gayuhan	Arjosari	100			M'
11	Parapet Sungai Jelok Ds. Banjarejo	Kebonagung	60			M'
12	Parapet Sungai Lorog Ds. Hadiwarno	Ngadirojo	70			M'
13	Parapet Sungai Bodag Ds. Bodag	Ngadirojo	50			M'
	Revertment Sungai					
	14. Brungkah Ds. Gayuhan	Arjosari	100			M'

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
14. Brungkah Ds. Gayuhan	<i>[Signature]</i>
14. Brungkah Ds. Gayuhan	<i>[Signature]</i>

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kemungkinan				
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan	
	15	Revertment Sungai Grindulu Ds. Arjowinangun	Pacitan	100			M'
	16	Revertment Sungai Sat Ds. Gunungsari	Arjosari	40			M'
	17	Revertment Sungai Jati Ds. Purworejo	Pacitan	200			M'
	18	Revertment Sungai Ponggok Ds. Semanten	Pacitan	30			M'
	19	Revertment Sungai Ponggok Ds. Widoro	Pacitan	100			M'
	20	Revertment Sungai Ponggok Ds. Ponggok	Pacitan	100			M'
	21	Revertment Sungai Ponggok Ds. Sambong	Pacitan	50			M'
	22	Revertment Sungai Grindulu Ds. Kembang	Pacitan	100			M'
	23	Check Dam Sungai Grindulu Ds. Purworejo	Pacitan	50			M'
	24	Revertment Sungai Jurug Ds. Sukoharjo	Pacitan	75			M'
	25	Parapet Sungai Carbon Ds. Ngadirojo	Ngadirojo	50			M'
	26	Check Dam Kedungsapi Ds. Jetis Kidul	Arjosari	30			M'
	27	Revertment Sungai Grindulu Ds. Gunungsari	Pacitan	480			M'
	28	Revertment Sungai Asemgandok Ds. Arjosari	Arjosari	50			M'
		29	Revertment Sungai Grindulu Ds. Gegeran	Arjosari	50		M'

Paral Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Katag Hukurn	<i>[Signature]</i>

Paral	Revertment
Asisten	Sungai
FD P	Grindulu Ds.
FD T	Gegeran

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kemitraan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sangat
30	Normalisasi Sungai Bawur	Sudimoro			200	M'
31	Revertment Sungai Teleng	Pacitan	50			M'
32	Revertment Sungai Lorog Ds. Cokrokembang	Ngadirojo	100			M'
33	Revertment Sungai Lorog Ds. Bogoharjo	Ngadirojo	100			M'
34	Revertment Sungai Lorog Ds. Hadiwarno	Ngadirojo	50			M'
35	Revertment Sungai Grindulu Ds. Tegalombo	Tegalombo	20			M'
36	Revertment Sungai Pradah Ds. Kedungbendo	Arjosari	100			M'
37	Revertment Sungai Bodag Ds. Bodag	Ngadirojo		20		M'
38	Revertment Sungai Grindulu Ds. Tegalombo	Tegalombo	85			M'
39	Tanggul Sungai Jelok Ds. Sironoboyo	Pacitan	30			M'
40	Revertment Sungai Pasang Ds. Punung	Punung	50			M'
B. Irigasi						
1	Saluran Irigasi Jalen	Nawangan	36			M'
2	Saluran Irigasi Jernman	Nawangan	71			M'
3	Saluran Irigasi Jati	Pacitan	50			M'
4	Saluran Irigasi Kerti Kiri	Arjosari	15			M'
5	Jaringan Irigasi Kebonagung	Kebonagung			1	BH
					250	M'
6	Jaringan Irigasi Gayuhan	Arjosari	1			BH
	Kanan dinasi Jaringan	Arjosari	1			BH
	FD Pcs Irigasi Mlati					
	FD T...		100			M'

Pada Hierarki	
Sekda	✓
Asst. Sekda	✓
Kabag. Hukum	✓

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kec. Kel./Desa)	Data Kuantitatif			
			Berat	Sedang	Ribuan	Segian
	8 Saluran Irigasi Kedungsapi	Arjosari	70			M'
	9 Bendung Plelesan	Ngadirojo	1			BH
	10 Jaringan Irigasi Cerbon	Ngadirojo	1			BH
			20			M'
	11 Saluran Irigasi Kedungpinihan	Ngadirojo	50			M'
	12 Jaringan Irigasi Ngancar	Ngadirojo	1			BH
			50			M'
	13 Saluran Irigasi Duren	Bandar	110			M'
	14 Saluran Irigasi Salam	Tulakan	80			M'
	15 Saluran Irigasi Nogosari I	Ngadirojo	50			M'
	16 Jaringan Irigasi Padi	Ngadirojo	1			BH
	17 Saluran Irigasi Yuwono	Tulakan	60			M'
	18 Saluran Irigasi Bandarangin	Tulakan	200			M'
	19 Saluran Irigasi Padi	Tulakan	65			M'
	20 Jaringan Irigasi Pengkol	Sudimoro	1			BH
	21 Saluran Irigasi Jurug Kanan	Nawangan	200			M'
	22 Saluran Irigasi Watu Gatuk	Tulakan	50			M'
	23 Saluran Irigasi Pronggo	Arjosari	15			M'
	24 Jaringan Irigasi Talang	Ngadirojo	1			BH
	25 Jaringan Irigasi Kembang	Pacitan	1			BH
	26 Jaringan Irigasi Sukoharjo	Pacitan	1			BH
	27 Saluran Irigasi Gayuhan Kiri	Arjosari		1500		M'
	28 Jaringan Irigasi Pajaringan	Bandar	1			BH
	29 Saluran Irigasi Kalitelu	Tegalombo	25			M'
	30 Saluran Irigasi Duren Satunggu	Bandar	20			M'
	31 Saluran Irigasi Worawari	Kebonagung	35			M'

Paraf Hierarchy
 Sekda
 Asisten Per. I
 Kabag Hukum

Asisten Per. I
 PD Pemrakarsa
 PD Terkait

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kuantitas				
			Berat	Sedang	Ribuan	Satuan	
	32	Saluran Irigasi Jetis Kiri	Bandar	20			M'
	33	Saluran Irigasi Gesing	Bandar		25		M'
	34	Saluran Irigasi Plelesan	Tegalombo	50			M'
	35	Saluran Irigasi Ketro	Tegalombo	25			M'
	36	Saluran Irigasi Gringsing	Tegalombo	50			M'
	37	Saluran Irigasi Papringan	Tulakan	40			M'
	38	Saluran Irigasi Sb. Puring	Tulakan	35			M'
	39	Saluran Irigasi Pakel	Tulakan	65			M'
	40	Saluran Irigasi Mujing	Tegalombo	1			BH
	C. Embung						
	1	Embung Pentung	Tulakan	1			M'
	D. Pantai						
	1	Pantai Teleng Ria	Pacitan	300			M'

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
FD Pemrakorsas	<i>[Signature]</i>
FD Tertaskit	

Tabel 3.9

**Kerusakan Sub Sektor Energi dan PDAM
Pascabencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017**






Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. /Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sat
1 ENERGI						
Ketenagalistrikan						
A. Jaringan Listrik						
1	Tiang Kec. Donorojo	Kec. Donorojo				Buah
2	Tiang Kec. Punung	Kec. Punung	24			Buah
3	Tiang Kec. Pringkuku	Kec. Pringkuku				Buah
4	Tiang Kec. Pacitan	Kec. Pacitan	6			Buah
5	Tiang Kec. Arjosari	Kec. Arjosari	16			Buah
6	Tiang Kec. Nawangan	Kec. Nawangan	1			Buah
7	Tiang Kec. Bandar	Kec. Bandar				Buah
8	Tiang Kec. Tegalombo	Kec. Tegalombo	1			Buah
9	Tiang Kec. Kebonagung	Kec. Kebonagung	31			Buah
10	Tiang Kec. Tulakan	Kec. Tulakan	10			Buah
11	Tiang Kec. Ngadirojo	Kec. Ngadirojo	28			Buah
12	Tiang Kec. Sudimoro	Kec. Sudimoro				Buah
B. Gardu Tiang						
1	Gardu Tiang	Kec. Pringkuku	1			Buah
2	Gardu Tiang	Kec. Arjosari	1			Buah
1 AIR DAN SANITASI . (PDAM)						
Sarana dan Prasarana Air Bersih						
PDAM						
1	Pompa Submersible Non Clogging Q = 20 lt/dt H = 25 M'	Kec. Pacitan		3		Buah
2	Pompa Centrifugal Q = 20lt/dt H= 100 m' dan Panel	Kec. Pacitan		3		Buah

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pesa Kesa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

	pe dan Panel
Asisten	Pompa
Asisten	Centrifugal
Asisten	Q = 20lt/dt
Asisten	H= 100 m'
Asisten	dan Panel

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kab./Desa	Data Kerusakan				
			Berat	Sedang	Ringan	Sat	
	3	Motor Pompa 45 KW	Kec. Pacitan		1		Buah
	4	Pipa Tranmisi GI Ø 300 mm	Kec. Pacitan	250			M'
	5	Pompa Centrifugal (CR) 20 lt/dt H = 125 M' dan Panel	Kec. Donorojo		1		Buah
	6	Pompa Submersible Non Clogging Q = 40 lt/dt H = 40 M'	Kec. Donorojo		1		Buah
	7	Pompa Centrifugal Q = 50lt/dt H= 150 m' dan Panel Inverter	Kec. Pringkuku		2		Buah
	8	Pompa Centrifugal (CR) 20 lt/dt H = 125 M' dan Panel	Kec. Pringkuku		1		Buah
	9	Pompa Centrifugal (CR) 10 lt/dt H = 160 M' dan Panel	Kec. Arjosari		1		Buah
	10	Pompa Centrifugal (CR) 5 lt/dt H = 100 M' dan Panel	Kec. Arjosari		1		Buah

Rekapitulasi jumlah kerusakan infrastruktur pascabencana banjir dan Longsor untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 3.10

Tingkat Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Per. & A/S		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		FD Terkait	

Tabel 3.10
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur
Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan	148.101.361.000,00	122.346.870.000,00	270.448.231.000,00
2	Air dan Sanitasi (Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih)	701.220.000,00	160.000.000,00	861.220.000,00
3	Sumber Daya Air (Pengairan)	41.752.485.000,00	40.952.250.000,00	82.704.735.000,00
4	Transportasi	437.000.000,00	621.650.000,00	1.058.650.000,00
3	Energi	1.647.186.000,00	135.000.000,00	1.782.186.000,00
6	Air dan Sanitasi (PDAM)	5.050.000.000,00	135.750.000,00	5.185.750.000,00

Banjir dan Longsor Kabupaten pada sektor infrastruktur menimbulkan kerusakan sebesar Rp 197.689.252.000,00 dan kerugian mencapai Rp 164.351.520.000,00 sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 362,040,772,000,00 Angka tersebut terdiri dari kerusakan dan kerugian pada sub sektor transportasi, energi, air dan sanitasi dan sumber daya air.

3.2.2.2. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Meningkatnya Resiko Gangguan Akses

Gangguan akses yang terjadi karena kerusakan pada sub sektor transportasi adalah kehilangan hak akses terhadap prasarana transportasi sebagai kebutuhan dasar perpindahan manusia dan barang di lingkungan perdesaan dan perkotaan. Pada sub sektor SDA menyebabkan petani kehilangan hak akses pengairan untuk persawahan sebagai kebutuhan dasar mata pencaharian.

Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi karena kerusakan aset pada sub sektor transportasi mengakibatkan terganggunya fungsi transportasi untuk sementara waktu. Kerusakan aset pada sub sektor SDA mengakibatkan terganggunya fungsi pengairan persawahan untuk sementara waktu.

Meningkatnya Resiko

Kerusakan aset sub sektor transportasi akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak menyebabkan meningkatnya resiko kerusakan kendaraan. Kerusakan pada sub sektor SDA mendorong meningkatnya resiko bencana banjir, kerentanan penyakit, serta mengakibatkan penurunan produksi pertanian dan kerentanan ekonomi masyarakat.

3.2.2.3. Kajian Dampak Bencana

Infrastruktur merupakan sarana penting dalam menunjang mobilitas aktivitas sosial dan ekonomi penduduk. Terjadinya bencana banjir dan Longsor mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur yang mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan secara tidak langsung berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada subsektor transportasi darat, bencana banjir dan Longsor menimbulkan dampak rusaknya sejumlah jalan dan jembatan di Kabupaten. Sebanyak 176 Ruas jalan di Wilayah Kabupaten terdampak terdiri dari 3 Ruas Jalan Nasional, 2 Ruas Jalan Provinsi, 57 ruas jalan kabupaten, 14 ruas jalan desa, dan 100 ruas jalan lingkungan hampir di 12 Kecamatan. Kerusakan

terjadi pula pada sebanyak 14 unit jembatan kabupaten dan 7 unit jembatan gantung hampir di 6 kecamatan yaitu kecamatan Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Ngadirojo dan Pringkuku. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan sesaat setelah terjadinya bencana pada beberapa ruas jalan di lokasi bencana berdampak pula pada terjadinya kemacetan yang memperlambat mobilitas dan menambah jarak tempuh pergerakan transportasi.

Pada sub sektor energi ketenagalistrikan, bencana banjir dan Longsor menimbulkan dampak rusaknya jaringan listrik beberapa diantaranya ada yang menimpa rumah penduduk. Pada sub sektor Air dan Sanitasi, bencana banjir dan Longsor menimbulkan dampak rusaknya bangunan fisik PDAM yang mengakibatkan terputusnya saluran air bersih kepada pelanggan dan mendorong adanya pendapatan yang hiang bagi PDAM serta pengeluaran untuk pengiriman air bersih selama tanggap darurat.

Pada sub sektor sumber daya air, bencana banjir dan Longsor menimbulkan dampak rusaknya sarpras pengaman sungai yang terdiri 38 titik lokasi di 2 DAS Utama yaitu Grindulu dan Lorog beserta Subdasnya, dimana DAS tersebut merupakan kewenangan BBWS Bengawan Solo. Kerusakan terjadi juga pada 40 titik lokasi jaringan irigasi yang menyalurkan air baku untuk areal pertanian. Kondisi tersebut berdampak pada tidak berfungsi sejumlah saluran irigasi, bendung dan intake sehingga air sungai tidak dapat mengalir sesuai dengan alur dan fungsinya.

3.2.3. Sektor Sosial

3.2.3.1. Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Perhitungan kerusakan dan kerugian pada sektor sosial mencakup kerusakan akibat banjir dan Longsor Kabupaten yang meliputi sub sektor pendidikan, sub sektor kesehatan, sub sektor agama, dan sub sektor lembaga sosial. Penilaian kerusakan dilakukan terhadap aset berupa aset fisik di sektor sosial serta kerugian yang ditimbulkannya. Nilai kerusakan dihitung menggunakan pendekatan persamaan tingkat kerusakan kali harga satuan kali volume kerusakan. Nilai kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan dan biaya lainnya yang dikeluarkan pada masa tanggap darurat.

Hasil perhitungan didapat total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 77,207,701,840 dengan komposisi nilai kerusakan lebih dari Rp. 58,032,101,840 dan nilai kerugian Rp. 19,175,600,000.

Tabel 3.11

Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
D. SOSIAL		58.032.101.840,00	19.175.600.000,00	77.207.701.840,00
1	Kesehatan	13.566.003.840,00	3.484.000.000,00	17.050.003.840,00
2	Pendidikan	37.671.598.000,00	12.657.500.000,00	50.329.098.000,00
3	Agama	6.766.000.000,00	2.999.000.000,00	9.765.000.000,00
4	Lembaga Sosial	28.500.000,00	35.100.000,00	63.600.000,00

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Banjir dan Longsor yang terjadi telah mengakibatkan kerusakan pada sub sektor kesehatan berupa bangunan beserta sarana prasarana didalamnya yaitu perlengkapan/mebelair dan peralatan kesehatan serta persediaan obat-obatan. Kerusakan dengan kategori tingkat sedang sampai ringan terdapat pada fasilitas kesehatan yaitu bangunan-bangunan bidang kesehatan. Sedangkan untuk isi bangunan berupa perlengkapan/mebeler, peralatan dan obat-obatan mengalami kerusakan berat yang diakibatkan sampah, material lumpur, terendam air dan hanyut terbawa banjir.

Nilai kerusakan pada sub sektor kesehatan sebesar Rp 13.566.003.840,00 sedangkan kerugian yang timbul akibat banjir dan Longsor mencakup biaya pembersihan material lumpur, sampah dan puing-puing bangunan yang terbawa oleh banjir dan Longsor pada seluruh lokasi faskes yang terkena banjir dan biaya pelayanan kesehatan selama masa darurat. Nilai kerugian pada sub sektor kesehatan mencapai Rp 3.484.000.000,00 sehingga jumlah nilai kerusakan dan kerugian pada sub sektor kesehatan adalah sebesar Rp 17.050.003.840,00.

Sub sektor pendidikan mengalami dampak yang cukup besar, mencakup kerusakan PAUD dan TK sebanyak 28 sekolah meliputi fisik dan nonfisik, SD sebanyak 57 sekolah meliputi fisik dan nonfisik, SMP sebanyak 21 sekolah meliputi fisik dan nonfisik, dan Pondok Pesantren sebanyak 1 pesantren. Kerusakan yang terjadi pada sub sektor pendidikan berupa rusaknya bangunan sekolah, peralatan dan perlengkapan sekolah. Kerusakan yang terjadi berupa rusaknya dinding bangunan sekolah, pintu dan jendela. Selain itu kerusakan juga terjadi pada isi bangunan berupa mebeler (meja kursi, lemari), peralatan belajar mengajar dan dokumen serta buku-buku pelajaran. Nilai kerusakan pada sub sektor pendidikan adalah sebesar Rp 37.671.598.000,00 sedangkan kerugian pada sub sektor pendidikan merupakan biaya yang diperlukan untuk pembersihan sekolah dari material lumpur dan sampah yang terbawa oleh banjir dan Longsor sebesar Rp 12.667.500,00 sehingga jumlah nilai kerusakan dan kerugian pada sub sektor pendidikan adalah sebesar Rp 50.329.098.000,00

Kerusakan sub sektor keagamaan sebesar Rp 6.766.000.000,00, kerugian sebesar Rp 2.999.000,00 sehingga total nilai kerusakan dan kerugian Rp 9.765.000.000,00.

Kerusakan pada sub sektor lembaga sosial terjadi pada di Pacitan pada sub sektor lembaga sosial dengan nilai kerusakan mencapai Rp 28.500.000,00, nilai kerugian Rp 35.100.000,00 sehingga jumlah nilai kerusakan dan kerugian pada sub sektor lembaga sosial adalah sebesar Rp. 63.600.000,00.

3.2.3.2. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi, dan Meningkatnya Risiko

Penilaian gangguan akses pada sektor sosial sub sektor pendidikan adalah terganggunya akses pendidikan bagi siswa-siswi baik tingkat PAUD, SD, SMP, dan Pondok Pesantren. Gangguan fungsi pendidikan pada sekolah mengakibatkan terganggunya pelayanan pendidikan yaitu proses belajar mengajar. Meningkatnya resiko sub sektor pendidikan yang ditandai dengan menurunnya kapasitas pendidikan dan meningkatnya kerentanan kondisi pendidikan, sehingga diperlukan bangunan sekolah, rumah dinas guru, perpustakaan, ruang tata usaha dan sarana prasarana pendidikan. Untuk kelancaran dan keberlanjutan kegiatan pendidikan perlu diberikan beasiswa maupun perlengkapan sekolah bagi siswa SD, SMP, dan Pondok Pesantren.

Penilaian gangguan akses pada sektor sosial sub sektor kesehatan adalah terganggunya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat. Gangguan fungsi kesehatan mengakibatkan terganggunya fungsi pelayanan kesehatan dari Posyandu, PMI dan rumah sakit sehingga tidak dapat melayani masyarakat. Meningkatnya resiko sub sektor

kesehatan yang ditandai dengan menurunnya kapasitas kesehatan dan meningkatnya kerentanan penyakit yang dapat mengakibatkan memburuknya kondisi kesehatan, sehingga diperlukan bangunan posyandu, rehabilitasi

Paraf Hierark			
Sekda			
Asisten Pdt & Kesra			
Kahag Hukum		FD Terkait	

bangunan rumah sakit, PMI, penggantian alat kesehatan dan sarana prasarana yang rusak.

Penilaian gangguan akses pada sektor sosial sub sektor agama mengakibatkan terganggunya akses masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan sebagai kebutuhan dasar. Gangguan fungsi keagamaan mengakibatkan hiang atau terganggunya layanan keagamaan masyarakat dalam beribadah. Meningkatnya resiko sub sektor keagamaan ditandai dengan menurunnya kapasitas keagamaan meningkatnya kerentanan, sehingga diperlukan tempat ibadah sementara dan dukungan dana penggerak awal untuk pemulihan kegiatan.

3.2.3.3. Kajian Dampak Bencana

Pada sektor sosial dampak bencana terjadi di sub bidang kesehatan, pendidikan, agama dan lembaga sosial yang dikelompokkan dalam kepemilikan pemerintah dan swasta.

Pada subsektor kesehatan, bencana banjir dan Longsor menimbulkan dampak rusaknya sarana dan prasarana kesehatan sejumlah 29 unit yang terdiri dari 3 Unit Polindes, 1 Unit Poskesdes, 2 Unit Pustu dan 23 Unit Puskesmas diakibatkan terendahnya sebagian atau seluruhnya lokasi fasilitas kesehatan tersebut sehingga mengakibatkan hanyut dan rusaknya berbagai fasilitas dan peralatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dimaksud. Dari kejadian tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan pada sejumlah fasilitas kesehatan di hampir seluruh pelosok wilayah Kabupaten terhambat, pelayanan rawat jalan terhenti akibat rusaknya fasilitas dan perlengkapan pendukungnya. sarana dan prasarana serta alat kesehatan yang cukup penting untuk memberikan pelayanan rusak. Ada sebagian puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap bagi pasien yang sedang mendapatkan perawatan pada saat kejadian pun ikut terhambat akibat pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari hari yang terganggu. Obat- obatan untuk kebutuhan pasien baik yang sedang di rawat maupun untuk pasien rawat jalan terganggu.






Pada subsektor pendidikan, bencana banjir dan Longsor menimbulkan dampak kegiatan belajar mengajar di wilayah terkena dampak terhenti karena bangunan sekolah berikut peralatan, ruang kelas belajar, dan perpustakaan mengalami kerusakan yang bervariasi mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SLB dan Pondok Pesantren.

3.2.4. Sektor Ekonomi Produktif

3.2.4.1. Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Material yang dibawa oleh banjir dan Longsor telah melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat beberapa wilayah di Kabupaten. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang mengalami kerusakan dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Hal ini disebabkan beberapa wilayah di Kabupaten merupakan daerah dengan potensi ekonomi yang sangat produktif di Kabupaten. Berbagai macam aktivitas ekonomi seperti sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM berada di Kabupaten. Material lumpur yang dibawa oleh banjir dan Longsor telah menghancurkan berbagai sub sektor ekonomi di sepanjang kawasan tersebut.

Sub sektor yang paling dominan dalam perekonomian Kabupaten adalah pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang sangat nampak terkena dampak. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian lahan pertanian di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten tergerus oleh arus banjir dan Longsor dengan variasi kedalaman genangan air dan material lumpur, yang menyebabkan mayoritas lahan pertanian mengalami berat kerusakan berat.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Ases. Fes 1		FD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		FD Terkait	

Tabel 3.12

**Kerusakan Sub Sektor Pertanian
Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017**

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Slt
EKONOMI PRODUKTIF						
1 PERTANIAN						
	PERTANIAN (Sarana dan Prasarana Fisik)					
	A. DAM PARIT					
1	Ds. Tambakrejo	Pacitan	1	-	-	unit
2	Ds. Tambakrejo	Pacitan	1	-	-	unit
3	Ds. Sedeng	Pacitan	1	-	-	unit
4	Ds. Borang	Arjosari	1	-	-	unit
5	Ds. Kedungbendo	Arjosari	1	-	-	unit
6	Ds. Mlati	Arjosari	1	-	-	unit
7	Ds. Sedayu	Arjosari	1	-	-	unit
8	Ds. Jetis Kidul	Arjosari	1	-	-	unit
9	Ds. Mangunharjo	Arjosari	1	-	-	unit
10	Ds. Kedungbendo	Arjosari	1	-	-	unit
11	Ds. Borang	Arjosari	-	1	-	unit
12	Ds. Karanganyar	Kebonagung	1	-	-	unit
13	Ds. Sanggrahan	Kebonagung	1	-	-	unit
14	Ds. Klesem	Kebonagung	1	-	-	unit
15	Ds. Karanganyar	Kebonagung	1	-	-	unit
16	Ds. Kalipelus	Kebonagung	1	-	-	unit
17	Ds. Sidomulyo	Kebonagung	1	-	-	unit
18	Ds. Nawangan	Nawangan	1	-	-	unit
19	Desa Nawangan	Nawangan	-	1	-	unit
20	Desa Mujing	Nawangan	-	1	-	unit
21	Desa Penggung	Nawangan	1	-	-	unit
22	Desa Tahunan	Tegalombo	-	1	-	unit
23	Desa Gedangan	Tegalombo	-	1	-	unit
24	Desa Tegalombo	Tegalombo	1	-	-	unit
25	Ds. Ploso	Tegalombo	1	-	-	unit

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Dispro	<i>[Signature]</i>
Dipemda	<i>[Signature]</i>
Dj. Terpadu	

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kec. / Desa)	Data Keagasan				
			Berat	Sedang	Rendah	Unit	
	26	Desa Tanjunglor	Ngadirojo	-	1	-	unit
	27	Desa Wonoasri	Ngadirojo	-	1	-	unit
	28	Desa Wonoasri	Ngadirojo	-	1	-	unit
	29	Desa Wonosobo	Ngadirojo	-	1	-	unit
	30	Ds. Wonosobo	Ngadirojo	-	1	-	unit
B. JALAN USAHA TANI (JUT)							
	1	Desa Kalipelus	Kebonagung	1	-	-	unit
	2	Desa Ketepung	Kebonagung	1	-	-	unit
	3	Desa Ketro	Kebonagung	1	-	-	unit
	4	Desa Gayuhan	Arjosari	1	-	-	unit
	5	Desa Karangrejo,	Arjosari	1	-	-	unit
	6	Desa Arjosari	Arjosari	-	1	-	unit
	7	Desa Pagerejo	Ngadirojo	1	-	-	unit
	8	Desa Cokrokembang	Ngadirojo	1	-	-	unit
	9	Desa Wonodadi Wetan	Ngadirojo	1	-	-	unit
	10	Desa Tanjunglor	Ngadirojo	1	-	-	unit
	11	Desa Wonodadi Kulon	Ngadirojo	-	1	-	unit
C. JARINGAN IRIGASI PERTANIAN							
	1	Ds. Bolosingo	Pacitan	1	-	-	unit
	2	Ds. Semanten	Pacitan	1	-	-	unit
	3	Desa Arjowinangun	Pacitan	1	-	-	unit
	4	Desa Tambakrejo	Pacitan	1	-	-	unit
	5	Desa Ploso	Pacitan	1	-	-	unit
	6	Desa Sirnobojo	Pacitan	1	-	-	unit
	7	Desa Kembang	Pacitan	1	-	-	unit
	8	Desa Nanggung	Pacitan	1	-	-	unit
	9	Desa Purworejo	Pacitan	-	1	-	unit
	10	Ds. Bangunsari	Pacitan	1	-	-	unit
	11	Ds. Kaveni	Pacitan	1	-	-	unit
	12	Ds. Tambakrejo	Pacitan	1	-	-	unit
	13	Ds. Ponggd...	Pacitan	1	-	-	unit

Hierarki	
Sekda	0
Asst. Pemb. Asst.	
Kabag. Hukum	

FD Terk...	
------------	--

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan				
			Berat	Sedang	Ringan	Sifat	
	14	Ds. Sukoharjo	Pacitan	1	-	-	unit
	15	Ds. Kayen	Pacitan	1	-	-	unit
	16	Ds. Simoboyo	Pacitan	1	-	-	unit
	17	Ds. Purworejo	Pacitan	1	-	-	unit
	18	Ds. Banjarsari	Pacitan	1	-	-	unit
	19	Ds. Kembang	Pacitan	1	-	-	unit
	20	Ds. Arjowinangun	Pacitan	1	-	-	unit
	21	Ds. Ploso	Pacitan	1	-	-	unit
	22	Ds. Baleharjo	Pacitan	1	-	-	unit
	23	Ds. Sidoharjo	Pacitan	1	-	-	unit
	24	Ds. Nanggung	Pacitan	1	-	-	unit
	25	Ds. Sukoharjo	Pacitan	1	-	-	unit
	26	Ds. Mantren	Kebonagun g	-	1	-	unit
	27	Desa Ketro	Kebonagun g	1	-	-	unit
	28	Desa Sidomulyo	Kebonagun g	1	-	-	unit
	29	Desa Gawang	Kebonagun g	1	-	-	unit
	30	Desa Worawari	Kebonagun g	1	-	-	unit
	31	Desa Gembuk	Kebonagun g	1	-	-	unit
	32	Desa Karangnongko	Kebonagun g	1	-	-	unit
	33	Desa Katipugal	Kebonagun g	-	1	-	unit
	34	Desa Sanggarahan	Kebonagun g	-	1	-	unit
	35	Desa Katlipelus	Kebonagun g	-	1	-	unit
	36	Desa Ketepung	Kebonagun g	-	1	-	unit
	37	Ds. Ketepung	Kebonagun g	1	-	-	unit
	38	Ds. Purwoasri	Kebonagun g	-	1	-	unit
	39	Ds. Sidomulyo	Kebonagun g	-	1	-	unit
	40	Ds. Kalipelus	Kebonagun g	-	1	-	unit
	41	Ds. Katipugal	Kebonagun g	-	1	-	unit
	42	Ds. Karangnongko	Kebonagun g	-	1	-	unit
	43	Desa Gayuhan	Arjosari	1	-	-	unit
	44	Desa Sedayu	Arjosari	1	-	-	unit
	45	Desa Gunungsari	Arjosari	1	-	-	unit
	46	Desa Karanggede	Arjosari	1	-	-	unit
	47	Desa Mlati	Arjosari	1	-	-	unit

Tingkat Hierarchy	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag Hukum	✓

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kelembagaan			
			Berat	Sedang	Ringan	Saji
48	Desa Karangrejo	Arjosari	1	-	-	unit
49	Ds. Gembong	Arjosari	-	1	-	unit
50	Ds. Karanggede	Arjosari	-	1	-	unit
51	Ds. Mlati	Arjosari	-	1	-	unit
52	Ds. Gayuhan	Arjosari	-	1	-	unit
53	Ds. Kedungbendo	Arjosari	-	1	-	unit
54	Ds. Mangunharjo	Arjosari	-	1	-	unit
55	Ds. Gayuhan	Arjosari	-	1	-	unit
56	Ds. Jetis Kidul	Arjosari	-	1	-	unit
57	Ds. Ngromo	Nawangan	1	-	-	unit
58	Ds. Nawangan	Nawangan	-	1	1	unit
59	Ds. Nawangan	Nawangan	-	1	-	unit
60	Ds. Nawangan	Nawangan	-	1	-	unit
61	Ds. Ngromo	Nawangan	1	-	-	unit
62	Ds. Tokawi	Nawangan	-	-	1	unit
63	Ds. Tokawi	Nawangan	-	1	-	unit
64	Ds. Tokawi	Nawangan	1	-	-	unit
65	Ds. Tokawi	Nawangan	-	1	-	unit
66	Ds. Tokawi	Nawangan	1	-	-	unit
67	Ds. Pakisbaru	Nawangan	-	1	-	unit
68	Ds. Gondang	Nawangan	1	-	-	unit
69	Ds. Gondang	Nawangan	1	-	-	unit
70	Ds. Gondang	Nawangan	1	-	-	unit
71	Ds. Mujing	Nawangan	-	-	1	unit
72	Ds. Jetis Lor	Nawangan	1	-	-	unit
73	Ds. Sempu	Nawangan	-	-	1	unit
74	Ds. Jetis Lor	Nawangan	-	-	1	unit
75	Ds. Jetis Lor	Nawangan	-	1	-	unit
76	Ds. Jetis Lor	Nawangan	1	-	-	unit
77	Ds. Jetis Lor	Nawangan	1	-	-	unit
78	Desa Ploso	Tegalombo	1	-	-	unit
79	Ds. Ploso	Tegalombo	-	1	-	unit
80	Ds. Tahunan	Tegalombo	-	1	-	unit
81	Ds. Mantren	Tegalombo	-	1	-	unit
82	Ds. Mantren	Tegalombo	-	1	-	unit
83	Ds. Losari	Tulakan	1	-	-	unit
84	Ds. Losari	Tulakan	1	-	-	unit
85	Ds. Losari	Tulakan	1	-	-	unit
86	Ds. Losari	Tulakan	1	-	-	unit
87	Ds. Ngunut	Bandar	-	1	-	unit
88	Ds. Ngunut	Bandar	-	-	1	unit
89	Ds. Kledung	Bandar	-	1	-	unit
90	Desa Tanjunglor	Ngadirojo	-	1	-	unit
91	Desa Cokrokembang	Ngadirojo	-	1	-	unit
92	Desa Tanjungpung Prati Koordinasi	Ngadirojo	-	1	-	unit
93	Ds. Wonoasri	Ngadirojo	-	1	-	unit
94	Ds. Bogoharjo	Ngadirojo	-	1	-	unit

Struktur Hierarchy	
Sekda	6
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kemitraan			
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan
95	Ds. Tanjungpuro	Ngadirojo	-	1	-	unit
96	Ds. Cangkring	Ngadirojo	-	1	-	unit
97	Ds. Wiyoro	Ngadirojo	-	1	-	unit
98	Ds. Hadiwarno	Ngadirojo	-	1	-	unit
99	Ds. Cangkring	Ngadirojo	-	1	-	unit
D. EMBUNG						
1	Embung Ds. Kemuning	Tegalombo	1			unit
LAHAN PERTANIAN (Pertanaman dan Saprodi)						
A. LAHAN PERTANIAN/SAWAH						
1	Ds. Tinatar	Punung	1	-	-	ha
2	Kel Sidoharjo	Pacitan	76	-	-	ha
3	Kel. Ploso	Pacitan	13	-	-	ha
4	Ds. Sukoharjo	Pacitan	43.5	-	-	ha
5	Ds. Kayen	Pacitan	25	-	-	ha
6	Kel. Baleharjo	Pacitan	-	-	1.25	ha
7	Ds. Bangunsari	Pacitan	-	-	-	ha
8	Ds. Sumberharjo	Pacitan	-	-	4	ha
9	Kel. Pucangsewu	Pacitan	10	-	-	ha
10	Ds. Tanjungsari	Pacitan	-	-	2	ha
11	Ds. Menadi	Pacitan	18	-	-	ha
12	Ds. Mentoro	Pacitan	-	5	-	ha
13	Ds. Purworejo	Pacitan	19.5	-	-	ha
14	Ds. Nanggungan	Pacitan	-	-	2.5	ha
15	Ds. Widoro	Pacitan	-	-	1.5	ha
16	Ds. Semanten	Pacitan	-	-	1.25	ha
17	Ds. Banjarsari	Pacitan	-	5	-	ha
18	Ds. Bolosingo	Pacitan	2.5	-	-	ha
19	Ds. Sambong	Pacitan	5	-	-	ha
20	Ds. Ponggok	Pacitan	7	-	-	ha
21	Ds. Tambakrejo	Pacitan	32.5	-	-	ha
22	Ds. Sedeng	Pacitan	8	-	-	ha
23	Ds. Kalipelus	Kebonagung	17	-	-	ha
24	Ds. Karangnongko	Kebonagung	24	-	-	ha
25	Ds. Karanganyar	Kebonagung	77	-	-	ha
26	Ds. Gembuk	Kebonagung	14	-	-	ha
27	Ds. Gawang	Kebonagung	17	-	-	ha
28	Ds. Ketro	Kebonagung	11	-	-	ha
29	Ds. Ketepung	Kebonagung	11	-	-	ha

Struktur Hierarchy

S. kda

Asisten Perencanaan

Kabag Hukum

FD Terkait

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Berat	Data Karakteristik			
				Sedan	Ringan	Sa	
	30	Ds. Katipugal	Kebonagung	13	-	-	ha
	31	Ds. Kebonagung	Kebonagung	10	-	-	ha
	32	Ds. Purwoasri	Kebonagung	12	-	-	ha
	33	Ds. Jetis Kidul	Arjosari	22	-	-	ha
	34	Ds. Karangrejo	Arjosari	47	-	-	ha
	35	Ds. Karanggede	Arjosari	17	-	-	ha
	36	Ds. Mlati	Arjosari	10	-	-	ha
	37	Ds. Sedayu	Arjosari	12	-	-	ha
	38	Ds. Tremas	Arjosari	10	-	-	ha
	39	Ds. Arjosari	Arjosari	25	-	-	ha
	40	Ds. Gunungsari	Arjosari	25	-	-	ha
	41	Ds. Pagutan	Arjosari	20	-	-	ha
	42	Ds. Gembong	Arjosari	30	-	-	ha
	43	Ds. Borang	Arjosari	21	-	-	ha
	44	Ds. Kedungbendo	Arjosari	16	-	-	ha
	45	Ds. Jatimalang	Arjosari	10	-	-	ha
	46	Ds. Gayuhan	Arjosari	22	-	-	ha
	47	Ds. Ngunut	Bandar	-	-	0.5	ha
	48	Ds. Ngunut	Bandar	-	-	1.5	ha
	49	Ds. Ngunut	Bandar	-	-	0.5	ha
	50	Ds. Ngunut	Bandar	-	-	1	ha
	51	Ds. Ngunut	Bandar	-	4	0	ha
	52	Ds. Ngunut	Bandar	-	5	0	ha
	53	Ds. Ngunut	Bandar	-	-	2	ha
	54	Ds. Ngunut	Bandar	-	-	0.5	ha
	55	Ds. Nglaran	Tulakan	9	-	-	ha
	56	Ds. Wonoanti	Tulakan	-	-	3.0	ha
	57	Ds. Wonoanti	Tulakan	-	-	2.0	ha
	58	Ds. Padi	Tulakan	-	-	1.0	ha
	59	Ds. Bungur Kec. Tulakan	Tulakan	-	-	3.0	ha
	60	Ds. Kalikuning	Tulakan	10	-	-	ha
	61	Ds. Kalikuning	Tulakan	-	-	4.0	ha
	62	Ds. Gasang	Tulakan	-	-	2.0	ha
	63	Ds. Gasang	Tulakan	-	5	-	ha
	64	Ds. Gasang	Tulakan	-	-	1.0	ha
	65	Ds. Ngile	Tulakan	-	-	1.0	ha
	66	Ds. Ngile	Tulakan	-	6	-	ha
	67	Ds. Ngile	Tulakan	-	-	2.0	ha
	68	Ds. Ngile	Tulakan	-	-	2.0	ha
	69	Ds. Bubakan	Tulakan	-	-	1.0	ha
	70	Ds. Bubakan	Tulakan	-	-	2.0	ha
	71	Ds. Bubakan	Tulakan	-	-	3.0	ha
	72	Ds. Losari	Tulakan	-	-	2.0	ha

Paraf Hierarki

Sekda

Asisten Per. & H. 1

Kabag Hukum

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan				
			Berat	Sedang	Ringan	Sisa	
	73	Ds. Losari	Tulakan	-	-	3.0	ha
	74	Ds. Ngumbul	Tulakan	-	-	2.0	ha
	75	Ds. Ngumbul	Tulakan	-	-	3.0	ha
	76	Ds. Wonodadi	Tulakan	-	-	2.0	ha
	77	Ds. Wonodadi	Tulakan	-	-	2.0	ha
	78	Ds. Ketrot	Tulakan	-	-	2.0	ha
	79	Ds. Ketrot	Tulakan	-	-	2.0	ha
	80	Ds. Ketrot	Tulakan	-	-	2.0	ha
	81	Ds. Ketrot	Tulakan	-	-	3.0	ha
	B. PADI						
	1	Belah	Donorojo	-	-	-	Ha
	2	Donorojo	Donorojo	1	-	-	Ha
	3	Sukodono	Donorojo	1	-	-	Ha
	4	Gendaran	Donorojo	24.5	-	-	Ha
	5	Sekar	Donorojo	0.5	-	-	Ha
	6	Punung	Punung	6	-	-	Ha
	7	Kebonsari	Punung	4	-	-	Ha
	8	Gondosari	Punung	2	-	-	Ha
	9	Sooka	Punung	4	-	-	Ha
	10	Tinatar	Punung	6	-	-	Ha
	11	Dadapan	Pringkuku	1.5	-	-	Ha
	12	Ploso	Pacitan	5	-	-	Ha
	13	Sidoharjo	Pacitan	25	-	-	Ha
	14	Tanjungsari	Pacitan	1	-	-	Ha
	15	Sukoharjo	Pacitan	25	-	-	Ha
	16	Tambakrejo	Pacitan	18	-	-	Ha
	17	Bangunsari	Pacitan	7	-	-	Ha
	18	Semanten	Pacitan	1.25	-	-	Ha
	19	Kalipelus	Kebonagung	10	-	-	Ha
	20	Karangnongko	Kebonagung	17	-	-	Ha
	21	Kalipelus	Kebonagung	8	-	-	Ha
	22	Karangnongko	Kebonagung	16	-	-	Ha
	23	Kebonagung	Kebonagung	5	-	-	Ha
	24	Karanganyar	Kebonagung	40	-	-	Ha
	25	Gembuk	Kebonagung	6	-	-	Ha
	26	Gawang	Kebonagung	17	-	-	Ha
	27	Ketro	Kebonagung	11	-	-	Ha
	28	Ketepung	Kebonagung	11	-	-	Ha
	29	Banjarjo	Kebonagung	6	-	-	Ha
	30	Plumbungan	Kebonagung	7	-	-	Ha
	31	Sanggrahan	Kebonagung	7	-	-	Ha
	32	Punjung	Kebonagung	2	-	-	Ha
	33	Mantren	Kebonagung	3	-	-	Ha
	34	Sidomulyo	Kebonagung	21	-	-	Ha
	35	Klesem	Kebonagung	21	-	-	Ha
	36	Gayuhan	Arjosari	22	-	-	Ha
	37	Gembong	Arjosari	30	-	-	Ha
	38	Jatimalahg	Arjosari	41	-	-	Ha
	39	Tremas	Arjosari	10	-	-	Ha
	40	Karangrejo	Arjosari	47	-	-	Ha
	41	Karanggede	Arjosari	17	-	-	Ha

Daftar Hierarki

Sekda

Asisten Sekda

Kabag

Hukum

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kelembagaan				
			Bera	Sedang	Ribung	Sia	
	42	Mlati	Arjosari	10	-	-	Ha
	43	Sedayu	Arjosari	10	-	-	Ha
	44	Borang	Arjosari	21	-	-	Ha
	45	Jetis Kidul	Arjosari	22	-	-	Ha
	46	Kedungbendo	Arjosari	16	-	-	Ha
	47	Pucangombo	Tegalombo	5.5	-	-	Ha
	48	Kasihani	Tegalombo	8	-	-	Ha
	49	Kemuning	Tegalombo	55	-	-	Ha
	50	Ngreco	Tegalombo		9	-	Ha
	51	Kebondalem	Tegalombo		4	-	Ha
	52	Tahunan	Tegalombo		5	-	Ha
	53	Gedangan	Tegalombo		8	-	Ha
	54	Ploso	Tegalombo		6	-	Ha
	55	Sidomulyo	Ngadirojo	5	-	-	Ha
	56	Ngadirojo	Ngadirojo	10	-	-	Ha
	57	Cokrokembang	Ngadirojo	30	-	-	Ha
C. PADI GOGO							
	1	Kendal	Punung	21			Ha
	2	Wareng	Punung	71			Ha
	3	Mendolo Lor	Punung	7			Ha
	4	Mendolo Kidul	Punung	4			Ha
	5	Ngadirejan	Pringkuku	1.5	-	-	Ha
	6	Pringkuku	Pringkuku	5	-	-	Ha
	7	Sobo	Pringkuku	2.5	-	-	Ha
	8	Sedeng	Sedeng	8	-	-	Ha
	9	Kebondalem	Tegalombo	4	-	-	Ha
	10	Tahunan	Tegalombo	5	-	-	Ha
	11	Pager Kidul	Sudimoro	10	-	-	Ha
	12	Pager Lor	Sudimoro	5	-	-	Ha
D. PERSEMAIAN PADI							
	1	Ploso	Pacitan	5	-	-	Ha
	2	Ploso	Pacitan	54.3	-	-	Ha
	3	Sidoharjo	Pacitan	70.4	-	-	Ha
	4	Sidoharjo	Pacitan	3.5	-	-	Ha
	5	Bangunsari	Pacitan	7	-	-	Ha
	6	Tanjungsari	Pacitan	1	-	-	Ha
	7	Sumberharjo	Pacitan	4	-	-	Ha
	8	Sumberharjo	Pacitan	5	-	-	Ha
	9	Pucangsewu	Pacitan	5	-	-	Ha
	10	Sukoharjo	Pacitan	6.5	-	-	Ha
	11	Kayen	Pacitan	25	-	-	Ha
	12	Baleharjo	Pacitan	16.2	-	-	Ha
	13	Baleharjo	Pacitan	1.25	-	-	Ha
	14	Bangunsari	Pacitan	1	-	-	Ha
	15	Purworejo	Pacitan	5	-	-	Ha
	16	Banjarsari	Pacitan	4	-	-	Ha
	17	Widoro	Pacitan	1.5	-	-	Ha
	18	Tambakrejo	Pacitan	3	-	-	Ha
	19	Nanggung	Pacitan	2.5	-	-	Ha
	20	Menadisi	Pacitan	5	-	-	Ha
	21	Mentoro	Pacitan	5	-	-	Ha
	22	Sambong	Pacitan	5	-	-	Ha
	23	Ponggok	Pacitan	7	-	-	Ha

Para Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	

FD Terapan	
------------	--

Sektor / Sub-Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kec./Kel./Desa)	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sel.
24	Semanten	Pacitan	3.75	-	-	Ha
25	Purwoasri	Kebonagung	2	-	-	Ha
26	Banjarjo	Kebonagung	6	-	-	Ha
27	Gunungsari	Arjosari	25	-	-	Ha
28	Pagutan	Arjosari	20	-	-	Ha
29	Arjosari	Arjosari	25	-	-	Ha
30	Jatimalang	Arjosari	31	-	-	Ha
31	Tremas	Arjosari	30	-	-	Ha
32	Karangrejo	Arjosari	3	-	-	Ha
33	Karanggede	Arjosari	68	-	-	Ha
34	Mangunharjo	Arjosari	20	-	-	Ha
35	Kledung	Bandar	10	-	-	Ha
36	Nglaran	Tulakan	8.9	-	-	Ha
37	Wonoanti	Tulakan	5.2	-	-	Ha
38	Padi	Tulakan	1.3	-	-	Ha
39	Kalikuning	Tulakan	13.5	-	-	Ha
40	Gasang	Tulakan	7	-	-	Ha
41	Ngile	Tulakan	10	-	-	Ha
42	Bubakan	Tulakan	5	-	-	Ha
43	Losari	Tulakan	4.5	-	-	Ha
44	Ngumbul	Tulakan	5	-	-	Ha
45	Wonosidi	Tulakan	4	-	-	Ha
46	Ketro	Tulakan	10	-	-	Ha
47	Sidomulyo	Ngadirojo	2.5	-	-	Ha
48	Hadiwarno	Ngadirojo	2.5	-	-	Ha
49	Hadiluwih	Ngadirojo	2.5	-	-	Ha
50	Tanjungpuro	Ngadirojo	2.5	-	-	Ha
51	Pagerejo	Ngadirojo	4	-	-	Ha
52	Wiyoro	Ngadirojo	2	-	-	Ha
53	Ngadirojo	Ngadirojo	2	-	-	Ha
54	Cokrokembang	Ngadirojo	3	-	-	Ha
55	Bodag	Ngadirojo	0.5	-	-	Ha
56	Pager Kidul	Sudimoro	3	-	-	Ha
57	Sukorejo	Sudimoro	2.5	-	-	Ha
58	Sumberejo	Sudimoro	2	-	-	Ha
E. JAGUNG						
1	Belah	Donorojo	3	-	-	Ha
2	Donorojo	Donorojo	1	-	-	Ha
3	Sekar	Donorojo	4	-	-	Ha
4	Gendaran	Donorojo	1	-	-	Ha
5	Sukodono	Donorojo	1	-	-	Ha
6	Kendal	Punung	4	-	-	Ha
7	Wareng	Punung	14	-	-	Ha
8	Gondosari	Punung	10	-	-	Ha
9	Mendolo Lor	Punung	2	-	-	Ha
10	Mendolo Kidul	Punung	4	-	-	Ha
11	Pringkuku	Pringkuku	5	-	-	Ha
12	Sobo	Pringkuku	2.5	-	-	Ha
F. CABAI						
1	Punung	Punung	3	-	-	Ha
2	Mantren	Punung	2	-	-	Ha
3	Menadi	Pacitan	2	-	-	Ha
4	Sukoharjo	Pacitan	2	-	-	Ha

Paraf Hierarki

Sekda

Asisten Sekda

Kabag Hukum

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan
	5 Arjowinangun	Pacitan	2	-	-	Ha
	6 Nanggung	Pacitan	3	-	-	Ha
	7 Kedungbendo	Arjosari	3	-	-	Ha
	8 Nawangan (Desa Tokawi)	Nawangan	9			Ha
	9 Nawangan (Jetis Lor)	Nawangan	4			Ha
G. PUPUK (Urea, SP 36, NPK, ZA, Organik)						
	1 Punung (Kios)	Kec. Punung	7			Ton
	2 Menadi, Arjowinangun, Semanten, Ploso, Sidoharjo, Sukoharjo	Kec. Pacitan	92.1			Ton
	3 Tremas, Pagutan, Gembong, arjosari, Sedayu	Kec. Arjosari	31			Ton
	4 Purwoasri	Kec. Kebonagung	11			Ton

Dalam Tabel 3.12 terlihat dampak kerusakan terbesar akibat banjir dan Longsor dialami pada sub sektor pertanian yaitu kerusakan pada lahan pertanian/sawah (773 Ha), padi (700.25 Ha), padi gogo (144 Ha), persemaian padi (590.3 Ha), jagung (52 Ha), dan Cabe (30 Ha). Kondisi ini mengakibatkan petani mengalami kerugian besar disebabkan gagal panen. Pada sub sektor pertanian, jumlah nilai kerusakan mencapai Rp. 63,337,783,000 dan kerugian mencapai Rp 32.799.943.250,00 sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 96.137.726.250,00

Banjir dan Longsor Kabupaten juga berdampak pada sub sektor peternakan yaitu dengan mati dan hilangnya ternak sapi (56 ekor), kambing (1,925 ekor), serta unggas (6,504 ekor).

Data kersakan peternakan dapat dilihat dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Kerusakan Sub Sektor Peternakan

Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan
2	PETERNAKAN					
	A. HEWAN		56			
	TKRNAK SAPI					
Parat Berah	1 Ds. Cemeng	Donorojib	1	-	-	ekor
Sekda	2 Ds. Tinatar	Punung	5	-	-	ekor
As-stan Pem & Kesra	3 Ds. Gohdosari	Punung	1	-	-	ekor
Kabag Hukum	4 Ds. Terkit Glinggangan	Pringkuku	2	-	-	ekor

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. / Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ribut	Satuan
5	Ds. Pelem	Pringkuku	1	-	-	ekor
6	Ds. Sidoharjo	Pacitan	3	-	-	ekor
7	Ds. Ploso	Pacitan	1	-	-	ekor
8	Ds. Menadi	Pacitan		-	-	ekor
9	Ds. Sukoharjo	Pacitan		-	-	ekor
10	Ds. Sironoyo	Pacitan	9	-	-	ekor
11	Ds. Kembang	Pacitan	1	-	-	ekor
12	Ds. Nanggung	Pacitan	1	-	-	ekor
13	Ds. Ponggok	Pacitan	1	-	-	ekor
14	Ds. Widoro	Pacitan		-	-	ekor
15	Ds. Baleharjo	Pacitan	2	-	-	ekor
16	Ds. Gembuk	Kebonagung	1	-	-	ekor
17	Ds. Sidomulyo	Kebonagung	3	-	-	ekor
18	Ds. Karanganyar	Kebonagung	1	-	-	ekor
19	Ds. Klesem	Kebonagung	1	-	-	ekor
20	Ds. Arjosari	Arjosari	4	-	-	ekor
21	Ds. Ploso	Tegalombo	8	-	-	ekor
22	Ds. Tahunan	Tegalombo	7	-	-	ekor
23	Ds. Gondang	Nawangan	1	-	-	ekor
24	Ds. Penggung	Nawangan	1	-	-	ekor
25	Ds. Hadiwarno	Ngadirojo	1	-	-	ekor
B. HEWAN TERNAK KAMBING (Mati)			1,925			
1	Ds. Donorojo	Donorojo	3	-	-	ekor
2	Ds. Gondosari	Punung	2	-	-	ekor
3	Ds. Tinatar	Punung	15	-	-	ekor
4	Ds. Pelem	Pringkuku	4	-	-	ekor
5	Ds. Ngadirejan	Pringkuku	2	-	-	ekor
6	Ds. Menadi	Pacitan	32			ekor
7	Ds. Sukoharjo	Pacitan	14			ekor
8	Ds. Kayen	Pacitan	19			ekor
9	Ds. Mentoro	Pacitan	15			ekor
10	Ds. Sironoyo	Pacitan	381			ekor
11	Ds. Kembang	Pacitan	257			ekor
12	Ds. Ploso	Pacitan	426			ekor
13	Ds. Sidoarjo	Pacitan	146			ekor
14	Ds. Bolosingo	Pacitan	5			ekor
15	Ds. Ponggok	Pacitan	5			ekor
16	Ds. Purworejo	Pacitan	6			ekor
17	Ds. Banjarsari	Pacitan	9			ekor
18	Ds. Tambakrejo	Pacitan	1			ekor
19	Ds. Nanggung	Pacitan	73			ekor
20	Ds. Widoro	Pacitan	15			ekor
Paraf Hierarki		Ds. Arjo Winangun	Pacitan			ekor
Sekda	71	Ds. Baleharjo	Pacitan			ekor
Asisten Sekda	122					
Kabag. Hukum						

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec / Kel / Desa	Data Konsentrasi			
			Berat	Sedang	Rumput	Sajian
23	Ds. Tanjungsari	Pacitan	31			ekor
24	Ds. Semanten	Pacitan	2			ekor
25	Ds. Sambong	Pacitan	3			ekor
26	Ds. Sidomulyo	Kebonagung	2	-	-	ekor
27	Ds. Katipugal	Kebonagung	2	-	-	ekor
28	Ds. Karanganyar	Kebonagung	15	-	-	ekor
29	Ds. Purwoasri	Kebonagung	14			ekor
30	Ds. Gayuhan	Arjosari	1	-	-	ekor
31	Ds. Mlati	Arjosari	8	-	-	ekor
32	Ds. Karanggede	Arjosari	8	-	-	ekor
33	Ds. Arjosari	Arjosari	140			ekor
34	Ds. Gembong	Arjosari	2			ekor
35	Ds. Tremas	Arjosari	35			ekor
36	Ds. Pagutan	Arjosari	14			ekor
37	Ds. Gunungsari	Arjosari	7			ekor
38	Ds. Borang	Arjosari	3			ekor
39	Ds. Gondang	Nawangan	9	-	-	ekor
40	Ds. Mujing	Nawangan	7	-	-	ekor
41	Ds. Nawangan	Nawangan	2	-	-	ekor
42	Ds. Penggung	Nawangan	12	-	-	ekor
43	Ds. Ketro	Tulakan	23	-	-	ekor
44	Ds. Kalikuning	Tulakan	10	-	-	ekor
45	Ds. Ploso	Tegalombo	25	-	-	ekor
46	Ds. Tahunan	Tegalombo	20	-	-	ekor
47	Ds. Kemuning	Tegalombo	7	-	-	ekor
48	Ds. Hadiwarno	Ngadirojo	26			ekor
49	Ds. Bogoharjo	Ngadirojo	8			ekor
50	Ds. Pagenjo	Ngadirojo	2			ekor
C. HEWAN TERNAK UNGGAS (Mati)			6,504			
1	Ds. Sukoharjo	Pacitan	700	-	-	ekor
2	Ds. Kembang	Pacitan	5,000	-	-	ekor
3	Ds. Purwoasri	Kebonagung	110	-	-	ekor
4	Ds. Gunungsari	Arjosari	364	-	-	ekor
5	Ds. Pagutan	Arjosari	70	-	-	ekor
6	Ds. Arjosari	Arjosari	10	-	-	ekor
7	Ds. Tahunan	Tegalombo	200			ekor
8	Ds. Ketro	Tulakan	50			ekor
D. HMT RUMPUT			105			
1	Ds. Tambakrejo	Pacitan	28	-	-	Ha
2	Ds. Banjarsari	Pacitan	10	-	-	Ha
3	Ds. Purworejo	Pacitan	10	-	-	Ha
4	Ds. Kembang	Pacitan	15	-	-	Ha
5	Ds. Sironoyo	Pacitan	20	-	-	Ha
FD Terkait						

Staf Hiera
 Sdkda
 Asisten Pemb
 K. Bag
 H. Kum

Sektor / Sub Sektor	Sarana Prasarana	Lokasi Kecamatan/Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Seluruh
6	Ds. Arjowinangun	Pacitan	8	-	-	Ha
7	Ds. Menadi	Pacitan	3	-	-	Ha
8	Ds. Mentoro	Pacitan	2	-	-	Ha
9	Ds. Kayen	Pacitan	4	-	-	Ha
10	Ds. Sukoharjo	Pacitan	5	-	-	Ha
E. HMT LEGUMINOCEAE			11			
1	Ds. Menadi	Pacitan	2	-	-	Ha
2	Ds. Mentoro	Pacitan	2	-	-	Ha
3	Ds. Kayen	Pacitan	3	-	-	Ha
4	Ds. Sukoharjo	Pacitan	4	-	-	Ha
F. KANDANG SAPI			68			
1	Ds. Cemeng	Donorojo	1	-	-	unit
2	Ds. Tinatar	Punung	2	-	-	unit
3	Ds. Gondosari	Punung	1	-	-	unit
4	Ds. Glinggangan	Pringkuku	1	-	-	unit
5	Ds. Pelem	Pringkuku	1	-	-	unit
6	Ds. Sidoharjo	Pacitan	1			unit
7	Ds. Ploso	Pacitan	1			unit
8	Ds. Menadi	Pacitan	2			unit
9	Ds. Sukoharjo	Pacitan	1			unit
10	Ds. Sirnobojo	Pacitan	27			unit
11	Ds. Kembang	Pacitan	9			unit
12	Ds. Nanggung	Pacitan	2			unit
13	Ds. Ponggok	Pacitan	1			unit
14	Ds. Widoro	Pacitan	2			unit
15	Ds. Baleharjo	Pacitan	1			unit
16	Ds. Gembuk	Kebonagung	1	-	-	unit
17	Ds. Sidomulyo	Kebonagung	1	-	-	unit
18	Ds. Karanganyar	Kebonagung	1	-	-	unit
19	Ds. Klesem	Kebonagung	1	-	-	unit
20	Ds. Arjosari	Arjosari	2			unit
21	Ds. Ploso	Tegalombo	3	-	-	unit
22	Ds. Tahunan	Tegalombo	3	-	-	unit
23	Ds. Gondang	Nawangan	1	-	-	unit
24	Ds. Penggung	Nawangan	1	-	-	unit
25	Ds. Hadiwarno	Ngadirojo	1			unit
G. KANDANG KAMBING			599			
1	Ds. Donorojo	Donorojo	1			unit
2	Ds. Sekar	Donorojo	1			unit
3	Ds. Gondosari	Punung	1			unit
4	Ds. Tinatar	Punung	2			unit
5	Ds. Pelem	Pringkuku	1			unit
6	Ds. Pemrekarso	Pringkuku	1			unit
7	Ds. Ngadirejan	Pringkuku	1			unit
8	Ds. Menadi	Pacitan	15			unit

Sakda
 Anggaran
 Kabag

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kec. / Kel./Desa)	Data Ketersediaan				
			Berat	Sedang	Ringan	Seluruh	
	8	Ds. Sukoharjo	Pacitan	4			unit
	9	Ds. Kayen	Pacitan	6			unit
	10	Ds. Mentoro	Pacitan	5			unit
	11	Ds. Sironoyo	Pacitan	95			unit
	12	Ds. Kembang	Pacitan	61			unit
	13	Ds. Ploso	Pacitan	85			unit
	14	Ds. Sidoarjo	Pacitan	30			unit
	15	Ds. Bolosingo	Pacitan	1			unit
	16	Ds. Ponggok	Pacitan	1			unit
	17	Ds. Purworejo	Pacitan	2			unit
	18	Ds. Banjarsari	Pacitan	2			unit
	19	Ds. Tambakrejo	Pacitan	1			unit
	20	Ds. Nanggungan	Pacitan	25			unit
	21	Ds. Widoro	Pacitan	4			unit
	22	Ds. Arjowinangun	Pacitan	20			unit
	23	Ds. Baleharjo	Pacitan	3			unit
	24	Ds. Tanjungsari	Pacitan	9			unit
	25	Ds. Semanten	Pacitan	1			unit
	26	Ds. Sambong	Pacitan	1			unit
	27	Ds. Sidomulyo	Kebonagung	2			unit
	28	Ds. Katipugal	Kebonagung	5			unit
	29	Ds. Karanganyar	Kebonagung	15			unit
	30	Ds. Klesem	Kebonagung	18			unit
	31	Ds. Purwoasri	Kebonagung	14			unit
	32	Ds. Arjosari	Arjosari	45			unit
	33	Ds. Gembong	Arjosari	1			unit
	34	Ds. Tremas	Arjosari	11			unit
	35	Ds. Pagutan	Arjosari	4			unit
	36	Ds. Gunungsari	Arjosari	2			unit
	37	Ds. Borang	Arjosari	1			unit
	38	Ds. Mlati	Arjosari	3			unit
	39	Ds. Karanggede	Arjosari	3			unit
	40	Ds. Gayuhan	Arjosari	1			unit
	41	Ds. Gondang	Nawangan	3			unit
	42	Ds. Mujing	Nawangan	2			unit
	43	Ds. Nawangan	Nawangan	1			unit
	44	Ds. Penggung	Nawangan	4			unit
	45	Ds. Ploso	Tegalombo	8			unit
	46	Ds. Tahunan	Tegalombo	7			unit
	47	Ds. Kemuning	Tegalombo	2			unit
	48	Ds. Ketro	Tulakan	23			unit
	49	Ds. Kalikuning	Tulakan	10			unit
Para Hierarki	50	Fa Ds.ordinasi	Ngadirojo	26			unit
Sckda	6	A. H. Hadiwarno					
Asisten P. & P. 1	51	Ds. Bogoharjo	Ngadirojo	8			unit
Kabag Hukum	52	Ds. Pagerjo	Ngadirojo	2			unit

Tabel 3.14
Kerusakan Sub Sektor Perikanan

Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel / Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sat.
6. PERIKANAN						
INFRASTRUKTUR						
1. INFRASTRUKTUR DAN PERBENGKELAN						
1	Life Jacket	Pringkuku	55			buah
2	Pju	Pringkuku			6	titik
3	Infrastruktur Pdpt	Pacitan		1		unit
4	Mesin Perbengkelan Dan Mesin Biofuel	Pacitan	2			unit
5	Genset	Ngadirojo		1		unit
6	Pju	Kebonagung	18			Titik
7	Gudang Mesin, Kmr Mandi Tpi	Kebonagung	2			Unit
8	Kamar Mandi Tpi	Ngadirojo	1			unit
9	Gedung Tpi	Sudimoro			1	unit
10	Kolam Dan Bangunan Konservasi Penyu	Ngadirojo	2			paket
11	Breakwater	Tulakan	50			m
12	Breakwater	Sudimoro	100			m
13	Talud Jalan Dan Jogging Track Tpi Watukarung	Pringkuku	10			m
14	Jembatan Penghubung Tpi Tamperan - Teleng	Pacitan	50			m
15	Jalan Dan Talud Pdpt Ds. Kembang Sirnoboyo	Pacitan		50		m
16	Talud Kel Sidoharjo	Pacitan	50			m
17	Rabat Jalan Lingkungan Desa Pesisir Kel Sidoharjo	Pacitan	463			m
18	Talud Pengaman Pantai Ds. Sidomulyo	Kebonagung	100			m

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi - Kec / Desa	Data Keunggulan			
			Berat	Sedang	Ringan	St.G
19	Jalan Menuju Tpi Klesem	Kebonagung	500			m
20	Jembatan Menuju Tpi Klesem	Kebonagung	40			m
21	Talud Pengaman Pantai Ds. Klesem	Kebonagung	350			m
22	Jalan Menuju Tpi Ds Katipugal	Kebonagung		800		
23	Jalan Dan Talud Menuju Tpi Ds Worawari	Kebonagung	400			m
24	Jalan Menuju Tpi Ds Kalipelus	Kebonagung		200		m
25	Talud Jembatan Ds. Kalipelus	Kebonagung		30		m
26	Jembatan Menuju Tpi Karangnongko	Kebonagung		30		m
27	Jalan Menuju Tpi Karangnongko	Kebonagung		50		m
SARANA, PRASARANA DAN PEMBENIHAN						
2. SARANA PENGOLAHAN						
1	Sarana Pengolahan Dan Pemasaran	Pacitan	19			kelompok
2	Sarana Pengolahan Pemasaran	Arjosari	1			kelompok
3	Sarana Pengolahan Dan Pemasaran	Ngadirojo	1			kelompok
3. PRASARANA DAN ALAT TANGKAP						
1	Greenbelt	Donorojo	250			pohon
2	Greenbelt	Pacitan	5,000			pohon
3	Perahu	Pringkuku	3			unit
4	Perahu	Pacitan	68			unit
5	Perahu	Pacitan		228		unit
6	Perahu	Kebonagung	8			Unit
7	Perahu	Ngadirojo	4			unit
8	Kapal Nelayan 5-Gt Dan Kapal Patroli	Pacitan	2			unit
9	Kapal Laganbar	Ngadirojo	1			unit

Sekda
Asisten Sekda
Kabag Hukum

Sektor/ Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kebutuhan			Sat	
			Berat	Sedang	Ringan		
	10	Mesin Perahu	Pringkuku	2			unit
	11	Mesin Perahu	Pacitan	63			unit
	12	Mesin Perahu	Pacitan		136		unit
	13	Mesin Perahu	Kebonagung	8			Unit
	14	Mesin Perahu	Ngadirojo	4			unit
	15	Mesin Perahu	Ngadirojo		15		unit
	16	Alat Tangkap	Pacitan	94			unit
	17	Alat Tangkap	Kebonagung	17			Unit
	18	Alat Tangkap	Ngadirojo		210		unit
	19	Alat Tangkap	Ngadirojo	4			unit
	20	Alat Tangkap	Pacitan		197		unit
4. PERALATAN TAMBAK							
	1	Tambak Udang	Pringkuku	2			petak
	2	Tambak Udang	Kebonagung	9			petak
	3	Tambak	Ngadirojo	80			petak
	4	Tambak Udang	Sudimoro	2			petak
	5	Benur	Pringkuku	200,000			ekor
	6	Benur	Pacitan	4,600,000			
	7	Benur	Kebonagung	900,000			ekor
	8	Benur	Sudimoro	200,000			ekor
	9	Benur	Ngadirojo	8,000,000			ekor
	10	Talud Tambak	Pacitan	3			petak
	11	Kincir Tambak	Pacitan	6			unit
	12	Sarana Bbi	Pacitan	1			paket
	13	Kolam Ikan Dan Induk Bbi	Tulakan	1			paket
	14	Minapadi (Terpal, Jaring Dan Benih Ikan)	Tegalombo	1			paket
	15	Sarpras Bioflok (Pompa, Genset)	Arjosari	1			paket
	16	Rumput Laut	Ngadirojo	250			jalur
5. BENIH IKAN							
	1	Benih Ikan	Donorojo	250,000			ekor
	2	Benih Ikan	Pringkuku	10,600			ekor
	3	Benih Ikan	Punung	410,000			ekor
	4	Benih Ikan	Kebonagung	510,000			ekor
	5	Benih Ikan Lele	Arjosari	953,000			ekor
arat Perarki	Sekda	5	Lele				ekor
	Asisten Sekda						
	Kabag Hukum						

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sat.
6	Benih Ikan Lele	Tegalombo	30,000			ekor
7	Benih Ikan Lele, Nila	Pacitan	102,00 5,400			ekor
8	Benih Ikan Gurame	Pacitan	12,000			ekor
9	Benih Gurame	Arjosari	35,000			
10	Benih Ikan	Tulakan	40,000			ekor
11	Benih Ikan Lele	Ngadirojo	510,000			ekor
12	Pakan Ikan	Punung	300			Kg
13	Pakan Ikan	Arjosari	3,600			Kg
14	Ikan Konsumsi	Punung	420			Kg
15	Induk Ikan	Pacitan	3			paket
6. PRASARANA KOLAM IKAN						
1	Kolam Ikan	Donorojo	25			kolam
2	Kolam Ikan	Pringkuku	6			kolam
3	Kolam Ikan	Pacitan	215			kolam
4	Kolam Ikan	Kebonagung	48			kolam
5	Kolam Ikan	Arjosari	95			kolam
6	Kolam Ikan	Ngadirojo	51			kolam
7	Kolam Ikan	Tulakan	4			kolam
8	Kolam Ikan	Tegalombo	3			kolam
9	Kolam Permanen	Arjosari	8			kolam

Pada sub sektor peternakan, banjir dan Longsor di Kabupaten menyebabkan kerusakan sebesar Rp 1.661.360.000,00 dan kerugian mencapai Rp 1.110.000,00 sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 3.142.470.000,00 Sementara itu, pada sub sektor perikanan, banjir dan Longsor di Kabupaten menyebabkan kerusakan sebesar Rp. 14,154,979,950 dan kerugian mencapai Rp 54.578.354.000,00 sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 68.733.333.950,00

Kerusakan pada sektor ekonomi terjadi juga pada sub sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Kegiatan ekonomi masyarakat berupa kegiatan produksi, transaksi jual beli barang dan jasa setelah terjadinya banjir dan Longsor Kabupaten terhenti. Untuk sub sektor perdagangan terdapat kerusakan pada sarana fisik sejumlah 2 unit pasar dan Non fisik modal sejumlah 10 unit dengan jumlah kerusakan sebesar Rp. 30,599,000,000 dan kerugian Rp 485.000.000,00 sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 31.084.000.000,00

Pada sub sektor koperasi dan UKM terdapat kerusakan pada Balai Latihan Kerja 17 unit sarana dan prasarana, Koperasi sejumlah 16 Unit. Jumlah nilai kerusakan sub sektor koperasi dan UKM sebesar Rp 464.000.000,00 dan kerugian mencapai Rp 25.000.000,00, sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 489.000.000,00.

Pada sub sektor industri terdapat 1003 Unit IKM yang rusak akibat dari banjir dan Longsor Kabupaten, dengan nilai kerusakan sebesar Rp 14.875.000.000,00 dan kerugian Rp 400.000.000,00 sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 15.275.000.000,00

Kerusakan yang dialami oleh beberapa warung, industri kecil dan koperasi berupa kerusakan bahan baku dan barang dagang, peralatan, bangunan, kendaraan, operasional, serta produk jadi dengan tingkat kerusakan berat sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 3.15.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	
	FD Terkalt

Tabel 3.15

Kerusakan Sub Sektor Perdagangan, Koperasi dan UKM, Industri, Pariwisata Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017

Sektor // Sub Sektor	Surah dan Pasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sat.
4 PERDAGANGAN						
	A. Fisik		45			
1	Pasar Margo Muyo	Kec. Punung	25			m
2	Pasar Arjosari	Kec. Arjosari	20			m
	A. Non Fisik		1,970			
1	Pasar Margo Muyo	Kec. Punung				Per/hr
2	Pedagang Pasar Buah Arjowinangun	Kec. Arjosari	12			Per/hr
3	Pedagang Pasar Arjowinangun	Kec. Pacitan	638			Per/hr
4	Pedagang Pasar Sayur Arjowinangun	Kec. Pacitan	45			Per/hr
5	Pedagang Pasar Kelapa Mentoro	Kec. Pacitan	47			Per/hr
6	Pedagang Pasar Arjosari	Kec. Arjosari	225			Per/hr
7	Usaha Kecil Menengah (UKM)	Kec. Arjosari	244			UKM/h r
8	Usaha Kecil Menengah (UKM)	Kec. Pacitan	400			UKM/h r
9	Usaha Kecil Menengah (UKM)	Kec. Kebonagung	122			UKM/h r
10	Usaha Kecil Menengah (UKM)	Kec. Ngadirojo	62			UKM/h r
11	Usaha Kecil Menengah (UKM)	Kec. Punung	175			UKM/h r
5 PERINDUSTRIAN				1,003		
1	IKM Ajosari	Kec. Ajosari		244		Unit
2	IKM Pacitan	Kec. Pacitan		400		Unit
3	IKM Kebonagung	Kec. Kebonagung		122		Unit
4	IKM Ngadirojo	Kec. Ngadirojo		62		Unit
5	IKM Punung	Kec. Punung		175		Unit
7 PARIWISATA						
	A. PANTAI KLAYAR					
1	Plengsengan Ambrol Pantai Klayar	Kec. Donorojo	250			m
2	Talud Abrasi Pantai Klayar	Kec. Donorojo	100			m
3	Lampiran Jalan Ambrol Pantai Klayar	Kec. Donorojo	2			unit

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Ketersediaan			
			Berat	Sedang	Ruang	Sat.
B. PANTAI WATUKARUNG						
1	Joging Track ambrol Pantai Watukarung	Kec. Pringkuku	10			m
2	Talud Pantai Watukarung	Kec. Pringkuku	15			m
C. PANTAI PANCER DOOR						
1	Talud Abrasi Pantai Pancer Door	Kec. Pacitan	100			m
2	Geopark Pantai Pancer Door	Kec. Pacitan	1			Unit
3	Erosi Jalan Pantai Pancer Door	Kec. Pacitan	200			m
D. PANTAI TELENG RIA						
1	Jembatan Antara TPI dan Teleng Ria	Kec. Pacitan	150			m
2	Jongging Trak, Pagar dan Jalan Pantai Teleng Ria	Kec. Pacitan	500			m
E. GOA TABUHAN						
1	Talud Belakang Loket Goa Tabuhan	Kec. Punung	1			Unit
F. PANTAI BUYUTAN						
1	Jalan Pantai Buyutan	Kec. Donorojo	100			m
G. GOR dan WISMA ATLET						
1	Pembersihan GOR dan Wisma Atlet	Kec. Pacitan	1			unit
2	Alat dan Perlengkapan Olahraga	Kec. Pacitan	1			unit
H. LAPANGAN OLAHRAGA DESA						
1	Lapangan Olahraga Terendam Banjir	Kec. Pacitan	20			Lpgn
8	KOPERASI dan UKM					
A. BALAI LATIHAN KERJA						
1	Mobil Dinas Panther	Kec. Pacitan		1		Unit
2	Mobil MTU	Kec. Pacitan		1		Unit
3	Sepeda Motor	Kec. Pacitan			5	Unit
4	Alat peraga diesel dan mesin	Kec. Pacitan		10		Unit
5	Rumab Latiban	Kec. Pacitan	80			M2
B. BINAAN KOPERASI UMK (Usaha Menengah)						
1	KUD Pacitan	Kec. Pacitan		1		Unit
2	KUD Arjosari	Kec. Arjosari		1		Unit
3	Kopwan Sironoboyo	Kec. Pacitan			1	Unit

Sekda	3	Paraf Koordinasi	
Asses. P. & K.			
Kabag Hukum		FD Terhail	

Sektor // Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sat
4	Kopwan Kembang	Kec. Pacitan			1	Unit
5	Kopwan Sukobarjo	Kec. Pacitan			1	Unit
6	Kopwan Kayen	Kec. Pacitan			1	Unit
7	Kopwan Mentoro	Kec. Pacitan			1	Unit
8	Kopwan Arjowinangun	Kec. Pacitan			1	Unit
9	Kopwan Tremas	Kec. Arjosari			1	Unit
10	Kopwan Purwoasri	Kec. Kebonagun g			1	Unit
11	Kopwan Kedungbendo	Kec. Arjosari			1	Unit
12	Kopwan Nanggung	Kec. Pacitan			1	Unit
13	Kopwan Semanten	Kec. Pacitan			1	Unit
14	Kopwan Mlati	Kec. Arjosari			1	Unit
15	Kopwan Arjosari	Kec. Arjosari			1	Unit
16	Kopwan Tokawi	Kec. Nawangan		1		Unit

Penilaian kerusakan pada sektor ekonomi dilakukan terhadap aset berupa aset fisik di subsektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri kecil menengah, koperasi dan UKM serta dampak kerugian yang ditimbulkannya. Nilai kerusakan dihitung menggunakan pendekatan persamaan tingkat kerusakan kali barga satuan kali volume kerusakan. Sedangkan kerugian pada sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi dan UKM serta industri dihitung berdasarkan potensi bilangannya pendapatan atau penurunan produksi, dan biaya yang dikeluarkan untuk pembersihan material.

Dari hasil perhitungan, maka nilai kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi meliputi sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi dan UKM serta industri adalah kerusakan sebesar Rp 140.180.622.950,00 dan kerugian sebesar Rp 190.710.807.250,00 sehingga total perkiraan kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi sebesar Rp 330.891.430.200,00 Ringkasan perkiraan kerusakan dan kerugian sektor ekonomi disajikan pada tabel 3.16.

Pencat Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Perencanaan & Kearsifan		FD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		FD Tertanggung	

Tabel 3.16

Perkiraan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
C.	EKONOMI	146.723.122.930	212.720.596.790	343.443.717.790
1	Pertanian	63.337.783.000,00	32.834.320.750,00	96.172.103.750,00
2	Peternakan	1.678.860.000,00	1.481.760.000,00	3.160.620.000,00
3	Perkebunan	12.363.500.000,00	100.257.360.000,00	112.620.860.000,00
4	Perdagangan	30.599.000.000,00	8.672.950.000,00	39.271.950.000,00
3	Perindustrian	14.875.000.000,00	9.173.300.000,00	24.048.300.000,00
6	Perikanan	14.154.979.950,00	38.317.334.000,00	72.472.333.950,00
7	Parwisata	3.150.000.000,00	1.740.800.000,00	4.990.800.000,00
8	Koperasi dan UKM	464.000.000,00	242.750.000,00	706.750.000,00

3.2.4.2. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Resiko Gangguan Akses

Gangguan akses dalam bidang ekonomi berupa terganggunya akses individu dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar karena transaksi jual beli barang dan jasa terhent. Biasanya masyarakat dapat dengan mudab memenuhi kebutuhan dasar sebelum bencana, tetapi sesudah terjadi bencana sulit diperoleh dan akses terbadap mata pencaharian menjadi terganggu.

Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi dalam bidang ekonomi berupa terganggunya fungsi kelembagaan organisasi kelompok ekonomi yang ada di masyarakat seperti kelompok tani dan organisasi simpan pinjam (koperasi, credit union).

Meningkatnya Risiko

Gangguan akses berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar dan gangguan fungsi kelembagaan organisasi usaha ekonomi masyarakat, koperasi dan kelompok tani mengakibatkan meningkatnya risiko berupa turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada melambatnya laju perekonomian, sehingga dapat mendorong resiko meningkatnya angka kemiskinan.

3.2.4.3. Kajian Dampak Bencana

Pada sektor ekonomi dampak bencana terjadi di sub bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Perindustrian.

Pada subsektor pertanian, bencana banjir dan Longsor menyebabkan rusaknya lahan pertanian, jaringan irigasi, jalan usaha tani, traktor, rumab penggilingan padi dan transplanter/alat tanam padi yang berdampak pada potensi pendapatan yang hilang akibat menurunnya produksi panen dan adanya pengeluaran untuk pembersihan bagi korban terdampak.

Pada subsektor peternakan dan perikanan, bencana banjir dan Longsor menyebabkan mati dan bilangnya bewan ternak sapi, kambing, unggas dan ikan yang berdampak pada potensi pendapatan yang hilang akibat menurunnya produksi ternak dan bilangnya aset usaha ekonomi masyarakat.

Pada subsektor perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Industri, bencana banjir dan Longsor menyebabkan rusaknya bahan baku, barang dagang serta peralatan usaba masyarakat yang berdampak pada potensi pendapatan yang hilang akibat aset yang hilang serta kegiatan produksi, transaksi jual beli barang dan jasa setelah terjadinya banjir dan Longsor Kabupaten terhenti.

Pemrakarsa		
Sekda		
Asisten Sekda		
Kesra		
Kabag Hukum		
	PD Pemrakarsa	
	PD Terkait	

3.2.5. Lintas Sektor

3.2.5.1. Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Kerusakan yang terjadi pada lintas sektor mencakup sub sektor pemerintahan, keuangan perbankan, ketertiban, keamanan dan lingkungan hidup. Kerusakan sub sektor pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 3.17 di bawah ini:

**Tabel 3.17
Kerusakan Fasilitas Sub Sektor Pemerintahan**

Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kec. / Kel./Desa)	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Staf
LINTAS SEKTOR						
1 Pemerintahan						
1	Bangunan Kantor					
	A. Kantor BPBD	Kec. Pacitan				
	1. Perlengkapan Kantor		148	-	-	barang
	2. Logistik		1250	-	-	barang
	B. Kantor PDAM	Kec. Pacitan				
	Perlengkapan Kantor		159	-	-	barang
	C. Kantor Pertanian	Kec. Pacitan				
	Bangunan Kantor		27			Unit
	D. BPKAD Pacitan	Kab. Pacitan				
	Aset PD			20		PD
2 Ketertiban dan Keamanan (TNI/POLRI)						
A.	Makodim 0801	Kec. Pacitan				
	1. Perlengkapan Kantor (Kursi)			4		buah
	2. Tanaman kantor			5		Ha
	B. Kantor Staf Intel	Kec. Pacitan				
	Perlengkapan dan Peralatan Kantor			11		buah
	C. Kantor Staf Ops	Kec. Pacitan				
	Perlengkapan dan Peralatan Kantor			5		buah
	Kantor Staf	Kec. Pacitan				

Strat Hicrarki			
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	Kantor Staf
Asisten Per. & Kes	<i>[Signature]</i>	D. Pers	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Ketersediaan			
			Berat	Sedang	Ruangan	Ses.
	1 Perengkapan dan Peralatan Kantor			4		buah
	E. Kantor Staf Log	Kec. Pacitan				
	Peralatan Kantor			7		buah
	F. Kantor Staf Ter	Kec. Pacitan				
	Perengkapan dan Peralatan Kantor			5		buah
	G. Kantor Staf Tu Ud	Kec. Pacitan				
	Perengkapan dan Peralatan Kantor			5		buah
	H. Kantor Juru Bayar	Kec. Pacitan				
	Perengkapan dan Peralatan Kantor			4		buah
	I. Kantor Persit	Kec. Pacitan				
	Perengkapan dan Peralatan Kantor			5		buah
	J. Kantor Koperasi	Kec. Pacitan				
	Perengkapan dan Peralatan Kantor			4		unit
	K. Gudang BBM	Kec. Pacitan				
	Perengkapan dan Peralatan Kantor					
	L. Barak Transit	Kec. Pacitan				
	Perengkapan dan Peralatan Kantor			5		buah
	M. Koramil 0801/02					
	Perengkapan dan Peralatan Kantor	Kec. Pacitan		18		buah

Peny. Hierarchy	
Asisten	0
Asisten Per. & Kesra	
Kabag Hukum	

Asisten	Perengkapan dan Peralatan Kantor	
ED Pemra		
FD Tert...		

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Sel.
N.	Koramil 0801/03					
1	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kec. Pacitan		78		buah
O.	Koramil 0801/05					
	Talud dan pagar	Kec. Pacitan		25		m
P.	Sub DenPom V/1-4 Pacitan					
	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kec. Pacitan		9		buah
Q.	Kantor PosKes 05.10.25					
	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kec. Pacitan		3		buah
R.	TK Kartika IV-18					
	Perlengkapan	Kec. Pacitan		31		buah

Kerusakan sub sektor pemerintahan meliputi kerusakan pada kendaraan dinas, peralatan perkantoran, serta lingkungan hidup. Penilaian kerusakan akibat banjir dan Longsor Pacitan pada sub sektor pemerintahan diperkirakan sebesar Rp 3.069.450.000,00 dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 871.352.640,00 sehingga total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 3.940.802.640,00

Kerusakan sub sektor pengurangan resiko bencana kerusakan diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000 dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 15.000.000,00 sehingga total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 515.000.000.,00.

Kerusakan sub sektor Ketertiban dan Keamanan kerusakan diperkirakan sebesar R. 1.805.000.000,00 dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 901.000.000,00 sehingga total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 2.706.000.000,00

Kerusakan sub sektor lingkungan hidup terjadi dari Dinas Lingkungan Hidup terjadi pada Bidang Pertamanan dan Persampahan dengan perkiraan nilai kerusakan sebesar Rp 130.625.000,00 dan kerugian untuk biaya pembersihan diperkirakan mencapai Rp 68.070.000,00 sehingga total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 198.695.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.18.

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pesa & Kesa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Tabel 3.18

**Kerusakan Sub Sektor Lingkungan Hidup
Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017**

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kec. Kel./Desa	Data Kerusakan			
			Bes. (t)	Sekda (mg)	Ring (m)	Satuan
4 Lingkungan Hidup:						
1. PERTAMANAN						
1	Pot. Jl. Letjend Suprpto	Kec. Pacitan	21			m ²
2	Pot. Jl. Gatot Subroto	Kec. Pacitan	6			m ²
3	Pot. Jl. Tentara Pelajar	Kec. Pacitan	30			m ²
4	Taman Batas Kota Gemaharjo	Kec. Tegalombo		1		Unit
5	Taman Pancer Door	Kec. Pacitan		1		Unit
6	Tanaman Ayom	Kec. Pacitan	100			Unit
7	Tanaman Hias	Kec. Pacitan	200		175	Unit
8	Pengerukan lumpur dan Pembersihan jalan, dan taman kota	Kec. Pacitan				
2. PERSAMPAHAN						
1	TPS Kelurahan Ploso			1		Unit
2	pengangkutan dan pengelolaan Sampah, TPA					

Secara keseluruhan, penilaian kerusakan akibat banjir dan Longsor Pacitan pada lintas sektor diperkirakan sebesar Rp 5.505.075.000,00 dan kerugian sebesar Rp 1.855.422.640,00 sehingga total kerusakan dan kerugian sebesar Rp 7.360.497.640,00 dengan rincian terlihat dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19

**Penilaian Kerusakan dan Perkiraan Kerugian Lintas Sektor
Pascabencana Banjir Dan Longsor di Kabupaten Tahun 2017**

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
E.	LINTAS SEKTOR	5.505.075.000	1.949.422.644	7.454.497.640
1	Pemerintahan	3.069.450.000,00	871.352.640,00	3.940.802.640,00
2	Pengurangan resiko bencana (PRB)	500.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00
3	Keterlibatan dan Keamanan	1.803.000.000,00	901.000.000,00	2.706.000.000,00
	Pada Koordinasi Lingkungan Hidup	130.625.000,00	77.070.000,00	207.695.000,00

Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

3.2.5.2. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Meningkatnya Risiko Gangguan Akses

Gangguan akses sub sektor pemerintahan adalah pada terganggunya akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan di kantor pemerintahan.

Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi sub sektor pemerintah adalah karena banyak dokumen penting yang rusak/hilang saat terjadi bencana dan pelayanan publik pemerintahan terganggu, maka diperlukan dukungan dalam pengurusan kembali administrasi surat/dokumen penting.

Meningkatnya Risiko






Dalam menghadapi bencana banjir dan Longsor masyarakat memerlukan penyediaan informasi tentang kondisi rawan bencana di wilayah yang ditempati, wacana untuk relokasi hunian/rumab, pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

3.2.5.3. Kajian Dampak Bencana

Pada lintas sektor dampak bencana terjadi di sub bidang Pemerintahan dan Lingkungan Hidup. Pada subsektor pemerintahan, bencana banjir dan Longsor menyebabkan terganggunya kegiatan pelayanan publik pemerintahan pada kantor. Pada subsektor lingkungan hidup, bencana banjir dan Longsor berdampak pada meningkatnya pengeluaran untuk aktivitas pembersihan dan perbaikan taman Dinas Lingkungan Hidup.

3.3 Kajian Kebutuhan Pascabencana

Berdasarkan analisis terhadap kerusakan dan kerugian serta dampak pascabencana banjir dan Longsor yang meliputi sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp 705.811.559.471,00. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan Longsor Kabupaten tersebut diperuntukkan bagi sektor permukiman sebesar Rp 222.724.885.000,00 (32%), sektor infrastruktur sebesar Rp 254.025.831.606,00 (36%), sektor sosial sebesar Rp 58.350.101.840,00 (8%), sektor ekonomi sebesar Rp. 152.390.162.935,00 (22%), dan lintas sektor sebesar Rp 18.320.578.090,00 (3%).

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Per. & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Tabel 3.20

Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Pancabencana Banjir Dan Longsor Kabupaten Tahun 2017-2018

REKAPITULASI PENILAIAN KERUSAKAN & KERUGIAN PASCABENCANA KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017				
NO	SEKTOR SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
A.	PERMUKIMAN	296.375.896.990	39.114.844.490	335.390.344.840
1	Perumahan	296.273.800.000,00	39.114.500.000,00	335.390.300.000,00
1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan	148.101.361.000,00	122.346.870.000,00	270.448.231.000,00
2	Air dan Sanitasi (Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih)	701.220.000,00	160.000.000,00	861.220.000,00
3	Sumber Daya Air (Pengairan)	41.732.483.000,00	40.952.250.000,00	82.704.735.000,00
4	Transportasi	437.000.000,00	621.650.000,00	1.058.650.000,00
5	Energi	1.647.186.000,00	133.000.000,00	1.782.186.000,00
6	Air dan Sanitasi (PDAM)	5.050.000.000,00	135.750.000,00	3.185.750.000,00
C.	EKONOMI	144.723.122.990	211.724.894.790	353.443.717.740
1	Pertanian	63.337.783.000,00	32.834.320.730,00	96.172.103.730,00
2	Peternakan	1.678.860.000,00	1.481.760.000,00	3.160.620.000,00
3	Perkebunan	12.363.500.000,00	100.257.360.000,00	112.620.860.000,00
4	Perdagangan	30.399.000.000,00	8.672.950.000,00	39.271.930.000,00
5	Perindustrian	14.873.000.000,00	9.173.300.000,00	24.048.300.000,00
6	Perikanan	14.154.979.950,00	58.317.334.000,00	72.472.333.950,00
7	Pariwisata	3.250.000.000,00	1.740.800.000,00	4.990.800.000,00
8	Koperasi dan UKM	464.000.000,00	242.730.000,00	706.750.000,00
D.	SOSIAL	13.366.003.840,00	3.484.000.000,00	17.050.003.840,00
1	Kesehatan	13.366.003.840,00	3.484.000.000,00	17.050.003.840,00
2	Pendidikan	37.671.598.000,00	12.657.300.000,00	30.329.098.000,00
3	Agama	6.766.000.000,00	2.999.000.000,00	9.763.000.000,00
4	Lembaga Sosial	28.300.000,00	35.100.000,00	63.600.000,00
E.	LINTAS SEKTOR	5.305.075.004	1.849.422.648	7.454.497.840
1	Pemerintahan	3.069.450.000,00	871.352.640,00	3.940.802.640,00
2	Pengurangan resiko bencana (PRB)	500.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00
3	Keteroban dan Keamanan	1.803.000.000,00	901.000.000,00	2.706.000.000,00
4	Lingkungan Hidup	130.625.000,00	77.070.000,00	207.695.000,00
TOTAL		694.225.351.794	437.312.837.390	1.135.536.989.180




Secara terinci kebutuhan masing-masing sektor akan diuraikan sebagai berikut :



Paraf Hierarchy		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten Perencanaan	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	

Tabel 3.21

**Rekapitulasi Rincian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pancabencana Banjir Dan Longsor Kabupaten Tahun 2017-2018**

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Data Kebutuhan		Prakiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Satuan	
A PERMUKIMAN				222.724.885.000
1	Perumahan	3982	Unit	156.092.200.000
2	Bantuan Stimulan	201804	M2/Paket	66.632.685.000
B INFRASTRUKTUR				254.025.831.808
1	Transportasi	14.331	Unit	195.834.803.520
2	Energi	119	buah	1.647.186.023
3	Air dan Sanitasi	1.922	Unit	3.320.653.000
4	Sumber daya Air	11.882	Unit	53.223.189.063
C SOSIAL				58.350.101.840
1	Kesehatan	74	Unit	13.599.803.840
2	Pendidikan	26017	Unit	37.821.598.000
3	Keagamaan	122	Unit	6.756.000.000
4	Kelembagaan Sosial	101	Unit	162.700.000
D EKONOMI				152.300.162.035
1	Pertanian	2587,95	ha/unit	27.572.689.750
2	Peternakan	9.257	ekor/ha	4.595.860.000
3	Perkebunan	30.414	batang	12.363.500.000
4	Perdagangan	1.972	Unit	30.733.999.547
5	Penndustrian	1.003	unit	352.929.688
6	Perikanan	118.681.831	kotan/ekor/unit	53.766.183.950
7	Parwisata	33	Paket	3.200.000.000
8	Koperasi dan UKM	598	Unit	19.800.000.000
E LINTAS SEKTOR				18.320.578.090
1	Pemerintah	6	Paket	5.510.102.640
2	Ketertiban dan Keamanan (TNI/POLR)	228	Unit	901.000.000
3	Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	34	Paket	11.713.000.000
4	Lingkungan Hidup	536	Unit	196.475.450
TOTAL				705.811.559.471

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pesa & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PO Terkait	

BAB IV

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor Kabupaten dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui BPBD Kabupaten dan difasilitasi oleh BNPB dengan melibatkan partisipasi aktif dari Bappeda Kabupaten, Perangkat Daerah Kabupaten yang terdampak, Kementerian/Lembaga serta BPBD dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasma) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sab.

Jitu Pasma dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat banjir dan longsor di Kabupaten dengan pendekatan sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh tim terpadu. Hasil Jitu Pasma dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten yang merupakan daerah terdampak serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemulihan suatu wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terdampak bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan membimpun potensi-potensi sumber pendanaan yang tersedia, seperti APBD kabupaten dan APBD provinsi wilayah terdampak, APBN dan DIPA kementerian/lembaga yang lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus dana yang bersumber dari dunia usaha dan organisasi pembangunan multilateral.

Beberapa pokok pikiran yang perlu ditindaklanjuti pascabencana banjir dan longsor Kabupaten :

1. Masyarakat korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten menginginkan pembersihan, perbaikan rumah dan perbaikan infrastruktur publik dengan segera ;
2. Pemerintah Kabupaten dan BNPB bersama dengan Kementerian / Lembaga menugaskan tim pengkajian kebutuhan pascabencana sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
3. Identifikasi dan inventarisasi dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian / Lembaga;
4. Mempercepat upaya pemulihan penghidupan masyarakat di daerah relokasi untuk daerah terdampak bencana dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, BNPB dan Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
5. Dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan mitigasi kawasan rawan bencana.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pen & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

4.1. Prinsip Dasar dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya merupakan upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tahun 2009-2028;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Alam.

Pokok-pokok kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor Pacitan mencakup:

1. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai sarana untuk membangun komunitas dan menstimulasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana;
2. Dilaksanakan dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik, melalui koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan, serta mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;
3. Khusus untuk kegiatan pemulihan di bidang perumahan dan kehidupan masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
4. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman di daerah rawan bencana dengan prinsip *build back better and safer*.

Hierarki	
Sekda	
Asisten Per. & Kesra	
Kabag Hukum	

5. Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis dan perizinan, termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat;

PD Terkait	
------------	--

6. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana dan pertanggungjawaban yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melalui koordinasi yang efektif dan kerjasama antarpihak lintas sektor, dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
8. Dengan pertimbangan dampak kerusakan dan ketersediaan anggaran, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi periode tahun anggaran 2018 - 2019.

4.2. Ruang Lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperoleh dari penilaian kerusakan dan kerugian. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar perhitungan untuk mendapatkan perkiraan kebutuhan pemulihan pascabencana. Keterkaitan antara penilaian kerusakan dan kerugian dengan penilaian kebutuhan dapat memberikan umpan balik bagi kebutuhan pemulihan pascabencana dengan menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran pemulihan pascabencana. Berdasarkan sektor dan subsektor yang mengalami kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir dan longsor Pacitan, hampir seluruh sektor dan sub sektor terkena dampak. Oleh karena itu, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi sektor dan sub sektor yang terdampak, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor. Pemulihan di setiap sektor dan subsektor ini berbasis pada mitigasi dan pengurangan risiko bencana dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul apabila terjadi kembali bencana pada masa mendatang.

1. Sektor Permukiman

Pemulihan sektor permukiman, meliputi sub sektor perumahan dan prasarana lingkungan, akan dilakukan dengan pembangunan rumah dengan rata-rata type 36 yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan CSR, pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat, serta pemberian bantuan stimulan kepada pemilik rumah sesuai dengan tingkat kerusakan rumahnya berdasarkan hasil verifikasi kriteria kerusakan bangunan rumah berdasarkan ketentuan yang ada.

2. Sektor Infrastruktur

Pemulihan sektor infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah meliputi subsektor transportasi daerah, listrik, air bersih dan sumber daya air.

3. Sektor Ekonomi Produktif

Pemulihan sektor ekonomi meliputi subsektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM.

4. Sektor Sosial

Pemulihan sektor sosial meliputi pemulihan kehidupan sosial masyarakat pada sub sektor kesehatan, pendidikan, agama dan lembaga sosial

5. Lintas Sektor

Pemulihan lintas sektor meliputi sub sektor pemerintahan, ketertiban, keamanan, perbankan, lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana.

Paraf Koordinasi:	
Asisten _____	2
PD Pemrakarsa	1
PD Terkait	

Paraf	
Asisten Pem & Kesra	1
Kabag Mukom	

4.3. Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait. Terkait tanggung jawab tersebut, dalam rangka menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor, untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana banjir dan longsor Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten telah membentuk Tim Penilai Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pascabencana Banjir Dan longsor Kabupaten yang diputuskan berdasarkan hasil rapat seluruh Perangkat Daerah dan pihak - pihak terkait yang dimana rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Bupati Pacitan dengan keputusan asistensi dan koordinasi setiap Perangkat Daerah di ruang rapat bupati. Selanjutnya rapat diketuai Kepala Bappeda Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dengan beranggotakan para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bidang, Camat dan BUMD terkait yang dibagi kedalam sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor dengan tugas :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penilaian, kerugian dan kebutuhan pasca bencana banjir dan longsor Kabupaten;
- b. Melakukan proses pengumpulan data penilaian, kerugian dan kebutuhan pasca bencana banjir dan longsor Kabupaten;
- c. Melakukan verifikasi data penilaian, kerugian dan kebutuhan pasca bencana banjir dan longsor Kabupaten;
- d. Melakukan pengolahan dan analisis data penilaian, kerugian dan kebutuhan pasca bencana banjir dan longsor Kabupaten;
- e. Melakukan pelaporan penilaian, kerusakan dan kerugian pasca bencana banjir dan longsor Kabupaten;
- f. Menyusun perkiraan kebutuhan pasca bencana banjir dan longsor Kabupaten;
- g. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana banjir dan longsor Kabupaten yang telah dilakukan oleh Tim dimaksud dengan fasilitasi oleh BNPB, maka berikut ini diuraikan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk masing-masing sektor.

1. Sektor Permukiman

Pendataan awal kerusakan sektor permukiman dengan dikoordinasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dari data setiap kecamatan terdampak yang bersumber dari laporan kerusakan dari para ketua RT, RW, Kelurahan dan Kepala Desa. Data Kerusakan Pemukiman Akibat Banjir Dan longsor Kabupaten, mencapai 3.982 unit rumah mengalami kerusakan yang tersebar di 12 kecamatan yakni dengan rincian 1.487 unit rumah rusak berat, 1.250 unit rumah rusak sedang dan 1.245 unit rumah rusak ringan.

Untuk itu, ditetapkan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Relokasi Pengungsi

Pasca-Bencana Banjir Dan longsor Kabupaten yang diputuskan berdasarkan rapat yang di pimpin Bupati Pacitan dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan relokasi pengungsi pascabencana banjir dan longsor Kabupaten. Tim tersebut diketuai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Parat Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kesra	
Kabag Hukum	

Asisten	
PD Pemr	
PD Terka	

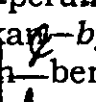
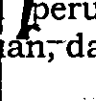
dengan beranggotakan para Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah, Kepala Bidang, Kepala Seksi pada OPD dan kecamatan terkait dengan tugas :

- a. Memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat yang terkena bencana di lokasi bencana;
 - b. Menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan relokasi;
 - c. Melakukan verifikasi data pengungsi;
 - d. Menetapkan pengungsi yang akan direlokasi;
 - e. Menempatkan pengungsi ke tempat relokasi yang sudah ditentukan;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan tim kepada bupati melalui sekretariat daerah Kabupaten;
- 2) Melakukan penentuan lahan calon lokasi relokasi rumah terdampak;
 - 3) Melakukan relokasi masyarakat korban dan pemilik rumah yang berada di kawasan rawan bencana ke lokasi yang aman dari bencana banjir melalui pembangunan rumah baru;
 - 4) Melakukan pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat korban dan pemilik rumah yang akan dilakukan melalui BNPB untuk kategori rumah rusak berat dan rusak sedang serta melalui Pemerintah Daerah untuk kategori rumah rusak ringan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada;
 - 5) Melakukan pembangunan prasarana lingkungan permukiman di lokasi relokasi antara lain pelaksanaan Land Clearing Lokasi Relokasi, Rehabilitasi Jalan Lingkungan, penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, Penataan Kawasan Terdampak, Perbaikan Kualitas Lingkungan, Jalan lingkungan, Drainase, SPAM, IPAL Komunal, Tempat Pembuangan Sementara (TPS3R), pembangunan Masjid di lingkungan Relokasi dan pembangunan penerangan jalan umum (PJU). Lahan yang dipergunakan untuk lokasi relokasi merupakan lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 6) Melakukan penggalangan dana dan bantuan non pemerintah untuk pembangunan rumah khusus maupun bantuan stimulan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mekanisme pemulihan sektor permukiman berupa:

- a. Melakukan kajian kelayakan calon lokasi relokasi di 12 Kecamatan dengan bantuan dari Badan Geologi Kementerian ESDM dan lembaga yang lain.
- b. Penyusunan dokumen perencanaan teknis untuk pembangunan Rumah;
- c. Sosialisasi data korban terdampak sektor perumahan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, RW dan RT, baik yang akan dilakukan relokasi maupun yang akan diberikan bantuan stimulan sesuai dengan tingkat kerusakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada;
- d. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pembangunan rumah mengikuti standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemberian bantuan stimulan untuk pelaksanaan pemulihan sektor permukiman berdasarkan hasil verifikasi penerima bantuan perumahan, status kepemilikan lahan dan bangunan berdasarkan *by name by address*, dengan besaran stimulan ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disertai dengan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kasi	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

- g. Bantuan diberikan melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal, karakter, dan budaya masyarakat setempat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- h. Pembangunan rumah mengikuti standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait sekaligus aspirasi masyarakat korban bencana.

2. Sektor Infrastruktur

Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur meliputi:

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemulihan perekonomian masyarakat;
- b. Pembangunan kembali infrastruktur publik dengan memperhatikan kebijakan sektor terkait dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- c. Memulihkan fungsi dan membangun kembali infrastruktur publik, yaitu transportasi, sumber daya air, energi/ listrik, serta air bersih;
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur mengacu pada standar teknis terkait;
- e. Pembangunan tanggul yang jebol serta perawatan bangunan secara berkesinambungan agar tetap berfungsi optimal;
- f. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sektor Ekonomi




Pada sektor ekonomi, strategi yang ditetapkan meliputi:


- a. Mendorong dan mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik di bidang ekonomi;
- b. Pemberian bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pemberian pendampingan dalam pemulihan usaha, termasuk pelatihan kewirausahaan;
- d. Pembentukan kelompok usaha kecil menengah berbadan hukum di lokasi relokasi untuk pemenuhan penyaluran bantuan sektor ekonomi;
- e. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Sektor Sosial

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadahan dan lembaga sosial dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor sosial meliputi:

- a. Pemulihan layanan kesehatan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah (Rumah Sakit dan Puskesmas), layanan gizi masyarakat, dan pemulihan psikososial;
- b. Pemulihan layanan pendidikan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan milik pemerintah (misalnya fasilitas PAUD, TK, SD, SMP, dan SMU), pemberian bantuan peralatan sekolah dan inisiasi sekolah siaga bencana;
- c. Pemulihan sarana dan prasarana peribadahan (rehabilitasi mesjid);
- d. Pemulihan pelayanan lembaga sosial dengan merehabilitasi sarana

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kesra	
Kabag. Hukum	

d. Pemulihan pelayanan lembaga sosial dengan merehabilitasi sarana	
Asisten dan prasarananya;	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

- e. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;

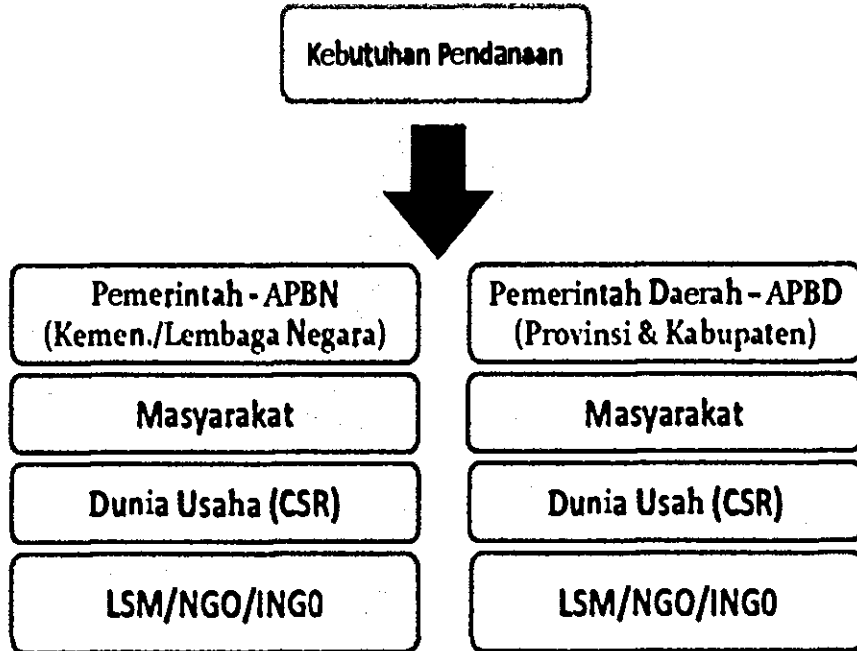
5. Lintas Sektor

Strategi untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan lintas sektor meliputi:

- a. Pemulihan kembali fungsi layanan publik dan sarana prasarana pemerintahan (Kantor Pemerintahan, Polsek, Rumah Dinas);
- b. Fasilitasi kemudahan dalam proses pengurusan surat berharga dan administrasi kependudukan;
- c. Sosialisasi pengurangan risiko bencana dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
- d. Pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana guna menumbuhkan dan menanamkan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana;
- e. Mendorong dan memfasilitasi dalam restrukturisasi pinjaman seperti penjadwalan ulang, penundaan pembayaran utang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengurangan pajak; dan
- f. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4. Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi






Skema pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Masyarakat, Swasta (CSR) maupun bantuan luar negeri.






		Paraf Koordinasi	
		Asisten _____	l
		FD Pemrakarsa _____	h
		FD Terkait _____	


4.5. Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor Pacitan, yang diuraikan sebagai berikut :

Paraf		Paraf Koordinasi	
Dakda		Asisten _____	
Asisten Perencanaan		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkalt	

No	Kegiatan	Tahun 2017				Tahun 2018												Tahun						
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
PERSIAPAN																								
1	Penanganan darurat bencana																							
2	Inventarisasi keruakan																							
3	Penilaian Jitupasna																							
4	Penyusunan Rencana RR																							
5	Pelaksanaan pemulihan dini																							
PELAKSANAAN REHAB DAN REKON																								
1	Sektor Perumahan																							
2	Sektor Infrastruktur																							
3	Sektor Ekonomi Produksi																							
4	Sektor Sosial																							
5	Lintas Sektor																							

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

BAB V

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan kegiatan (termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan), pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi kegiatan (termasuk pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah), hingga pengalihan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sesaat setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Akhir Tahun 2017 di Kabupaten masih berpotensi banjir susulan mengingat masih tingginya curah hujan. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat, tahapan selanjutnya dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyelenggaraan pemulihan pascabencana pada kelima sektor yang terkena dampak yang akan dikoordinasikan di tingkat daerah melalui BPBD Kabupaten dan berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur.

5.1. Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun pertama pascabencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.

Sumber pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten dan sumber lainnya seperti dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah lainnya. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah yang terkena bencana dalam hal APBD tidak memadai dalam membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bantuan diberikan melalui mekanisme Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *bottom-up* dan partisipatif, yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis

kegiatan

Sekda	kegiatan	kegiatan
Asisten Pen. & Kerja	kegiatan	kegiatan
Kabag Hukum	kegiatan	kegiatan

kegiatan

kegiatan	kegiatan	kegiatan
kegiatan	kegiatan	kegiatan
kegiatan	kegiatan	kegiatan

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dihitung berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasma). Pengkajian kebutuhan pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, dampak bencana sampai kepada kebutuhan pascabencana meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.

Total kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Tahun 2017-2019 di Kabupaten sebesar Rp 60.000.071.997,00 dengan komposisi pendanaan dari APBN sebesar Rp 252.523.200,00 (35,78%), APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 100.197.525.936,00 (14,20%), APBD Kabupaten sebesar Rp 60.000.071.997,00 (8.64%), dan sumber lainnya dari dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah lainnya sebesar Rp 3.000.550.000,00 (0.43%).






Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Tahun 2017-2019 di Kabupaten untuk setiap sektor diuraikan sebagai berikut :

5.1.1. Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman

Secara umum perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor perumahan terhadap masyarakat terdampak dan memiliki ancaman resiko bencana, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp 222.724.885.000,00 Komposisi sumber pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman terdiri dari APBN sebesar Rp 24.061.000.000,00 (13%), APBD Kabupaten sebesar Rp 32.593.440.000,00 (15%), APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 41.857.900.000,00 (17%) dan sumber lainnya sebesar Rp. 1.285.200.000,00 (1%).

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah susun, pembangunan rumah terdampak bencana dari Kementerian PU-PR, bantuan stimulan rusak berat dan rusak sedang untuk pembangunan rumah pola pemberdayaan masyarakat, bantuan isi rumah, pendampingan (Konsultan Management, Fasilitator, *Quality Assurance*) dan penyediaan prasarana lingkungan. Sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prasarana lingkungan yaitu *land clearing* lokasi relokasi, rumah terdampak bencana (dari kodam), rehabilitasi jalan lingkungan, penyediaan air bersih dan sanitasi, penataan kawasan terdampak, dan perbaikan kualitas lingkungan. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten diarahkan untuk penyediaan lahan perumahan, pembuatan site plan, bantuan stimulan rusak ringan, dan penyediaan prasarana lingkungan, dan recovery infrastruktur yang lainnya. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari CSR maupun dana masyarakat untuk pembangunan rumah, bantuan logistik dan recovery infrastruktur yang lainnya.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman disajikan dalam Tabel 5.1.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Perencanaan & Pembangunan		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkalt	

Tabel 5.1

Rekapitulasi Kebutuhan dan Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman Pancabencana Banjir dan Tanah Longsor Pacitan Tahun 2017-2018

NO	SEKTOR SUBSEKTOR	Data Kebutuhan		Prkiraan Kebutuhan (Rp)	Pendanaan (Rp) TA 2017 - 2018				
		Volume	Satuan		APBD - Kota Pacitan	APBD - Provinsi Jawa Timur	APBN - KL	Sumber Lain	
A PERMUKIMAN				222.724.005.000	32.583.440.000	10.000.000.000	24.061.000.000	100.000.045.000	1.285.200.000
					TA. 2017 - 2018	TA. 2018 - 2018	TA. 2018 - 2018	TA. 2018 - 2018	TA. 2017 - 2018
1	Perumahan	3382	Unit	156.052.200.000	4.710.000.000	31.120.000.000	12.115.000.000	137.012.000.000	1.285.200.000
2	Berkas Simpan	28184	M2 Paket	66.672.685.000	27.863.440.000	10.737.000.000	11.946.000.000	16.355.345.000	-

5.1.2 Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor transportasi, energi, air dan sanitasi serta sumberdaya air, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 254.025.831.606,00 Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur terdiri dari APBN sebesar Rp 145.670.488.523,00 (57%), APBD Kabupaten sebesar Rp 16.189.768.020,00 (6%) dan APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 16.717.836.000,00 (7%).

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, ketenagalistrikan, sarana air bersih dan sumber daya air. Sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, ketenagalistrikan, sarana air bersih dan sumber daya air irigasi. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jembatan, dan sumber daya air irigasi. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari CSR maupun dana masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan biaya non fisik lainnya.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2

Rekapitulasi Kebutuhan Dan Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekostruksi Sektor Infrastruktur Pascabencana Banjir dan Tanah Longsor Pacitan Tahun 2017-2018

NO	SEKTOR SUBSEKTOR	Data Kebutuhan		Prkiraan Kebutuhan (Rp)	Pendanaan (Rp) TA 2017 - 2018			
		Volume	Satuan		APBD - Kota Pacitan	APBD - Provinsi Jawa Timur	APBN - KL	Sumber Lain
B INFRASTRUKTUR				254.025.831.606	16.189.768.020	16.717.836.000	145.670.488.523	75.447.790.063
1	Transportasi	14.331	Unit	135.634.803.520	13.307.425.020	16.404.136.000	82.062.582.500	74.350.250.000
2	Energi	119	buah	1.647.106.083	-	-	1.617.196.023	-
3	Air dan Sanitasi	1.922	Unit	2.220.953.000	682.843.000	136.000.000	2.520.010.000	-
4	Sumber daya Air	11.882	Unit	53.223.106.083	2.220.000.000	136.000.000	49.440.106.000	1.397.439.353

Piraf Hicrarki		Piraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pen & Ketr		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

5.1.3 Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor sosial terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor Kesehatan, Pendidikan, Agama, Lembaga Sosial dan Pendampingan / Pemberdayaan Sosial Masyarakat, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 58.350.101.840,00 Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial terdiri dari APBN sebesar Rp. 25.051.832.001,00 (43%), APBD Kabupaten sebesar Rp. 9.119.035.913,00 (16%), APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 4.983.900.000,00 (9%), Hibah dan sumber lainnya sebesar Rp. 939.600.000,00 (2%).

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, keagamaan, panti sosial, dan Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat. Sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan, dan lembaga sosial. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten diarahkan untuk pelayanan posyandu dan pendidikan. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari CSR maupun dana masyarakat untuk pelayanan kesehatan rumah sakit/puskesmas, PMI dan pondok pesantren.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial disajikan dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Kebutuhan dan Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial Pancabencana Banjir Dan Tanah Longsor Pacitan Tahun 2017-2018

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Data Kebutuhan		Prkiraan Kebutuhan (Rp)	Pendanaan (Rp) TA 2017 - 2019				
		Volume	Satuan		APBD - Kota Pacitan	APBD - Provinsi Jawa Timur	APBN - KL	Sumber Lain	
C	SOSIAL			58.350.101.840	9.119.035.913	4.983.900.000	25.051.832.001	10.255.733.026	939.600.000
1	Kesehatan	741	Unit	13.589.823.840	159.335.913	851.500.000	6.489.132.001	6.550.135.926	-
2	Pendidikan	25317	Unit	37.821.598.000	2.675.300.000	4.632.300.000	18.400.000.000	11.855.598.300	418.600.000
3	Keagamaan	122	Unit	6.756.300.000	6.245.300.000	-	-	-	521.000.000
4	Keterbangan Sosial	101	Unit	152.700.000	-	-	162.700.000	-	-

5.1.4 Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi dan UKM, perindustrian dan pendampingan/pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 152.390.162.935,00 Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi terdiri dari APBN sebesar Rp. 53.739.879.950,00 (35%), APBD Kabupaten sebesar Rp. 806.999.974,00 (1%), APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 40.787.889.936,00 (27%) dan sumber lainnya sebesar Rp. 57.055.393.075,00 (37%).

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi dan UKM, perindustrian dan pendampingan/pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas UKM dan perdagangan. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten diarahkan untuk pemulihan sub

Asisten Per. & Kesa	PD Terkask
Kabag Hukum	

sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan koperasi dan UKM. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari swasta untuk pembangunan industri menengah. Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi disajikan dalam Tabel 5.4.

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Data Kebutuhan		Prkiraan Kebutuhan (Rp)	Pendanaan (Rp) TA 2017 - 2018				
		Volume	Satuan		APBD - Kota Pacitan	APBD - Provinsi Jawa Timur	APBN - KL	Sumber Lain	
0	REKONSTRUKSI			182.390.923.936	200.000.000	40.750.000.000	12.730.000.000	91.290.923.936	300.000.000
1	Pertanian	2507,26	ha/Unit	27.572.689.750	-	-	20.300.000.000	7.272.689.750	-
2	Peternakan	0,25	ekor/ha	4.595.990.000	-	-	-	4.595.990.000	-
3	Perkebunan	30.414	ha/arek	12.363.500.000	-	-	-	12.363.500.000	-
4	Perdagangan	1.972	Unit	30.730.989.547	400.000.000	1.100.000.000	-	29.230.989.547	-
5	Pendidikan	1.000	Unit	362.929.600	200.000.000	500.000	-	2.343.750	150.000.000
6	Perikanan	119.001,831	kubekelair/Unit	53.706.483.950	-	40.076.304.000	13.630.179.950	-	-
7	Perwisata	53	Paket	3.290.000.000	200.000.000	-	-	2.000.000.000	200.000.000
8	Koperasi dan UKM	589	Unit	19.800.000.000	-	-	19.750.000.000	50.000.000	-

5.1.2 Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor Pemerintahan, Keuangan dan Perbankan, Ketertiban (POLRI), Keamanan (TNI), dan Lingkungan Hidup, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 18.320.578.090,00 Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.290.828,00 (13%) dan sumber lainnya sebesar Rp 15.604.000.000,00 (85%).

Sumber pendanaan dari APBD diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sub sektor ketertiban (POLRI), keamanan (TNI), dan lingkungan hidup untuk penanganan pemulihan dan pengolahan sampah, serta pengurangan resiko bencana.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor disajikan dalam Tabel 5.5.

Tabel 5.5

Rekapitulasi Kebutuhan dan Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor Pancabencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Tahun 2017-2018

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Data Kebutuhan		Prkiraan Kebutuhan (Rp)	Pendanaan (Rp) TA 2017 - 2018				
		Volume	Satuan		APBD - Kota Pacitan	APBD - Provinsi Jawa Timur	APBN - KL	Sumber Lain	
E	LINTAS SEKTOR			18.320.578.090	2.290.828.000	-	-	15.994.000.000	425.750.000
1	Pemerintah	6	Paket	5.610.192.640	1.804.323.640	-	-	3.200.000.000	425.750.000
2	Kelurahan dan Kecamatan (TNI/POLRI)	228	Unit	901.000.000	-	-	-	901.000.000	-
3	Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	34	Paket	11.710.000.000	210.000.000	-	-	11.500.000.000	-
4	Lingkungan Hidup	536	Unit	196.475.450	196.475.450	-	-	-	-

Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari APBN berupa dana siap pakai BNPB, hibah pemerintah kepada pemerintah daerah (dari Kementerian Keuangan), DIPA Kementerian/Lembaga teknis terkait, dan APBD sesuai kewenangan masing-masing. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam dua tahun anggaran, yakni dari 2017 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Asisten Pembantu Kepala	Paraf Koordinasi
Kabag Hukum	Asisten
	PD Pemrakarsa
	PD Terkait

1. Pemulihan sektor permukiman dilaksanakan selama dua tahun anggaran, yakni tahun anggaran 2017-2018;
2. Pemulihan sektor infrastruktur dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana infrastruktur untuk pelayanan transportasi, air minum, sumberdaya air dan irigasi, serta kegiatan pengurangan risiko bencana;
3. Pemulihan sektor ekonomi produktif dilaksanakan secara bertahap bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi produktif, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana;
4. Pemulihan sektor sosial diprioritaskan pada tahun anggaran 2017-2018; bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana; dan
5. Pemulihan lintas sektor diprioritaskan pada tahun anggaran 2017-2018 dalam rangka mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana.

Identifikasi potensi sumber pendanaan ditempuh dengan cara pendayagunaan anggaran pemerintah sebagai berikut:

1. Rupiah murni APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2017, 2018 dan 2019 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terkena dampak bencana melalui realokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
2. Anggaran perubahan APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2017 didayagunakan secara optimal untuk upaya penyelenggaraan transisi darurat sebagai dasar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku; dan
3. Anggaran pemerintah APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2018 dan 2019 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Berdasarkan upaya tersebut, maka indikasi pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pascabencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten, Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2018

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Bata Kabupaten		Praktis Kebutuhan Rp	Pendanaan (Rp) TA 2017 - 2018				
		Volume	Satuan		APBD - Kota Paitan	APBD - Provinsi Jawa Timur	APBN - KL	Sumber Lain	
A	PERUBAHAN			200.000.000,000	36.000.448,000	41.000.000,000	24.001.000,000	123.077.348,000	1.000.000,000
1	Perubahan	3962	Unit	150.000.000,000	4.710.000,000	31.120.000,000	12.150.000,000	107.012.000,000	1.200.000,000
2	Bantuan Serukan	201004	M2/daerah	50.000.000,000	27.883.448,000	10.737.900,000	11.000.000,000	74.000.000,000	-
B	INFRASTRUKTUR			264.000.000,000	70.000.000,000	30.737.000,000	200.000.000,000	70.000.000,000	-
1	Transportasi	14.331	Unit	195.834.803,520	13.307.125,000	16.404.888,000	82.082.562,500	24.000.000,000	-
2	Energi	119	buah	1.647.106,023	-	-	1.647.106,323	-	-
3	air dan sanitasi	1.072	Unit	3.320.553,900	882.643,000	136.000,000	2.520.010,300	-	-
4	Sumber daya air	11.862	Unit	53.223.189,061	2.220.000,000	175.000,000	49.440.700,000	1.387.489,063	-
C	SOSIAL			20.000.000,000	0,119,000,000	1.000.000,000	20,000,000,000	10,200,733,000	0,000,000,000
1	Kesehatan	74	Unit	13.500.000,000	100.000,000	351.500,000	6.489.122,301	6.540.125,500	-
2	Pendidikan	20717	Unit	37.801.500,000	2.875.000,000	4.832.400,000	10.000.000,000	11.655.500,000	418.000,000
3	Kepolisian	121	Unit	6.700.000,000	6.245.000,000	-	-	-	521.000,000
4	Keterampilan Dasar	101	Unit	162.700,000	-	-	162.700,000	-	-
D	EKONOMI			100,000,000,000	000,000,000	00,700,000,000	00,700,000,000	00,000,000,000	000,000,000
1	Perikanan	2587.95	terumbu	27.572.800,750	-	-	20.000.000,000	7.572.800,750	-
2	Peternakan	8.257	ekor/ha	4.500.000,000	-	-	-	4.500.000,000	-
3	Perkebunan	88.414	hektar	12.368.300,000	-	-	-	12.368.300,000	-
4	Pengembangan	1.072	Unit	30.700.000,000	400.000,000	710.000,000	-	31.100.000,000	-
5	Pemukim	1.000	Unit	242.000,000	-	545.000	-	787.000,000	-
6	Perikanan	118.000	ekor/ha	53.700.000,000	-	88.070.304,000	13.000.000,000	153.770.304,000	150.000,000
7	Perikanan	31	Unit	3.200.000,000	220.000,000	-	-	3.420.000,000	200.000,000
8	Kapasitas dan UCM	500	Unit	10.000.000,000	-	-	10.000.000,000	10.000.000,000	-
E	LINTAS SEKTOR			10,300,000,000	2,000,000,000	-	-	15,000,000,000	420,700,000
1	Perencanaan	6	Unit	5.510.100,000	1.000.000,000	-	-	6.510.100,000	420.700,000
2	Kelompok dan Kegiatan (TKP/POK)	228	Unit	901.000,000	-	-	-	901.000,000	-
3	Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	34	Unit	11.710.000,000	210.000,000	-	-	11.920.000,000	-
4	Langkah Hidup	100	Unit	100.000,000	100.000,000	-	-	200.000,000	-
TOTAL				705,011,550,471	61,000,071,007	104,347,525,030	240,523,200,474	200,000,211,064	3,000,550,000

Asisten Pem. & Kera
Kabag Hukum
PD Terkait

5.2. Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan di tingkat daerah oleh BPBD Kabupaten dan oleh BNPB untuk koordinasi di tingkat Pusat.

Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian / Lembaga dan atau Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Provinsi dan atau Kabupaten. Semua pelaksanaan teknis dari aspek - aspek rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementrian Lembaga dan SKPD.

Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi asset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan dilakukan penatausahakan sesuai peraturan yang berlaku.

5.3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

5.3.1. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017-2018 di Kabupaten mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut.

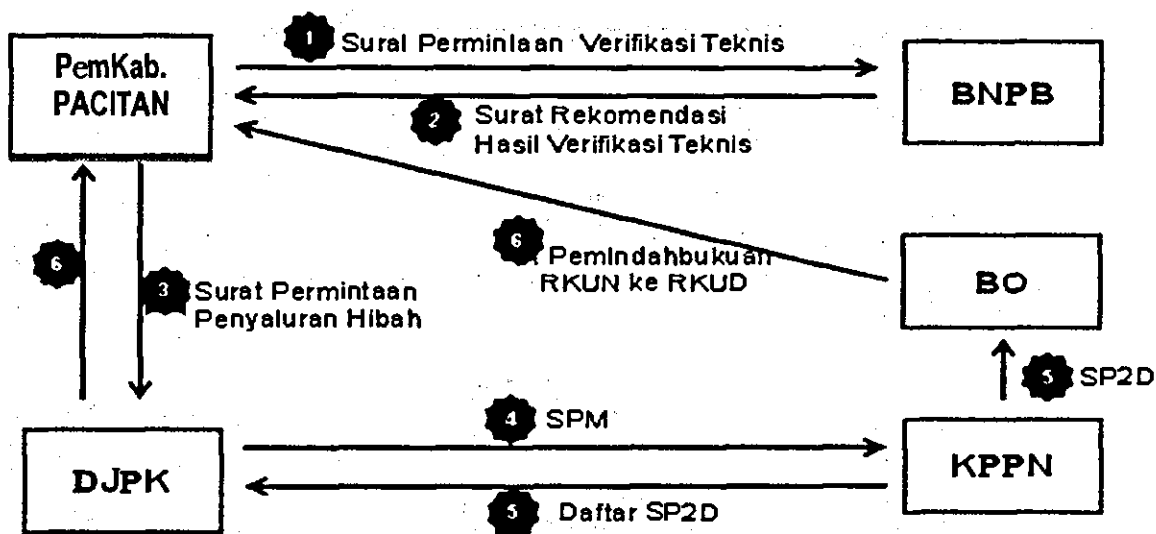
Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pendanaan yang bersumber dari kementerian/lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut:
 - a. Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
 - b. Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - c. Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
2. Pembiayaan yang menggunakan APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.
3. Pembiayaan yang menggunakan DSP BNPB akan mengikuti pola pelaksanaan anggaran DSP BNPB.
4. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Daerah akan mengikuti pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Kabupaten dilakukan sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten menyampaikan usulan bantuan pendanaan kepada Pemerintah melalui Kepala BNPB berdasarkan Rencana Aksi (renaksi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten.

Asisten Perencanaan & Negara	
Kabag Hukum	

- b. BNPB akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi atas usulan bantuan tersebut dengan melakukan konfirmasi dan validasi terhadap renaksi Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Tahun 2017-2018 di Kabupaten.
- c. Kepala BNPB akan menyampaikan surat usulan kepada Menteri Keuangan untuk dapat mengalokasikan anggaran Hibah kepada pemerintah Kabupaten. Surat usulan kepala BNPB ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan termasuk rekomendasi untuk mengalokasikan anggaran Hibah kepada Pemerintah Kabupaten.
- d. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan proses Hibah kepada Pemerintah Kabupaten melalui suatu Surat Pemberitahuan Hibah
- e. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hibah, akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dan Bupati
- f. PPA dan KPA Hibah pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan melakukan proses pencairan Hibah dari R KUN ke R KUD Pemerintah Kabupaten dengan Satker BPBD Kabupaten sebagaimana terdapat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Mekanisme Hibah Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten

5.3.2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sasaran rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan kondisi sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial-ekonomi-budaya, serta pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya memulihkan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik.

Sasaran kegiatan rekonstruksi adalah memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan *build back better and safer*. Kegiatan rekonstruksi yang dimaksud meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, pembangunan kembali sarana sosial-masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan menerapkan aspek pengurangan

Sekda	Paraf Koordinator	
Kasub. Per. & Kesa	Asisten Pj. Pemrakarsa	
Kabag Hukum	FD Terkait	

risiko bencana dan mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Di tingkat pusat, kegiatan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BNPB. Di tingkat daerah, kegiatan teknis dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

5.3.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam periode tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 dengan jadwal sebagaimana terdapat pada Tabel 5.7.

Pemerintah		Paraf Koordinasi	
Kabag	<i>D</i>	Asisten _____	<i>F</i>
Asisten Perencanaan & Kerja	<i>F</i>	FD Pemrakarsa	<i>L</i>
Kabag Hukum	<i>F</i>	FD Terkait	

Tabel 5.7

Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Tahun 2017-2019 Kabupaten

No			2017				2018				
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Penanganan Darurat Bencana	→									
2	Pelaksanaan Transisi Darurat Bencana	→									
3	Persiapan Operasional	→									
4	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi										
a	Sektor Permukiman										
	-Relokasi	→									
	-Rehab Rekon diluar Relokasi (In-Situ)		→	→	→	→	→	→	→	→	→
b	Sektor Infrastruktur		→	→	→	→	→	→	→	→	→
c	Sektor Ekonomi		→	→	→	→	→	→	→	→	→
d	Sektor Sosial		→	→	→	→	→	→	→	→	→
e	Lintas Sektoral		→	→	→	→	→	→	→	→	→

		Paraf Koordinasi
		Asisten _____
Asisten Perencanaan Kesa		FD Pemrakarsa _____
Kabag Hukum		FD Terkait _____

Jadwal pelaksanaan sebagaimana terdapat pada Tabel 5.7 akan dapat tercapai dengan asumsi anggaran tersedia secara tepat waktu dan cukup, serta komponen pendukung kegiatan seperti penyediaan lahan dan lain-lain dapat selesai tepat waktu.

5.4. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah (Rupiah Murni) kepada Pemerintah Kabupaten yang dikelola melalui mekanisme APBD, agar juga memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten .

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tanggal 26 November 2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten juga memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selain kepada Pengguna Anggaran (PA) masing-masing sesuai dengan sumber anggarannya.

Atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Hibah, maka Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Laporan Triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

Muzarki		Paraf Koordinasi	
Da		Asisten	
Asisten Pembantu Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

5.5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, digunakan lima indikator, yaitu:

1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dengan melibatkan kementerian/ lembaga dan SKPD terkait di daerah dengan mengacu pada pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Perka BNPB Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Dokumen RENAKSI yang telah ditetapkan Bupati serta tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan nasional.

Monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten, dilaksanakan sendiri oleh penanggung jawab program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Kabupaten sebagai penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun dengan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan untuk dilakukannya penajaman maupun pemutakhiran terkait kebutuhan yang terdapat dalam rencana aksi.

Jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi adalah tiga tahun anggaran, yakni dari tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019, dimana pemotretan kebutuhan dan analisisnya dilakukan dengan sumber data Jitu Pasma pada proses awal penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Setelah rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan pos yang belum jelas pendanaannya dan pos yang sangat rinci dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mendorong pihak-pihak lain, termasuk dunia usaha, untuk turut berpartisipasi.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal ini terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data

arak Hierarchy	Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal ini terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data
okda	
Asisten Pemda Kesra	
Kabag Hukum	FD Terkait

kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respons masyarakat dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud.

Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan respons terhadap dinamisasi kebutuhan di lapangan;
2. Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini dibelanjakan dengan setepat-tepatnya; dan
3. Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling mutakhir.

5.6. Kestinambungan Pemulihan Pasca bencana Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Setelah pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini, perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran reguler guna memastikan kestinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan "normal" sesuai kewenangan instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan:

1. Perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB);
2. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA dan DPA SKPD, serta RTRW.
3. Dengan adanya kejadian bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Tahun 2017-2018, diharapkan pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap RTRW kabupaten terdampak;
4. Penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait;
6. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari APBD.

Hierarki		Paraf Koordinasi	
Janda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten & Kasub	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum		PD Terkait	

BAB VI PENUTUP

6.1. Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan telah disepakati bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus berpedoman pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Dengan pertimbangan bahwa sebagian pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN, maka pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka perlu ditetapkan:

1. Keputusan Bupati tentang Penetapan Lahan Relokasi Pemukiman Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
2. Keputusan Bupati tentang Data Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pacitan;
3. Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan.

6.2. Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pacitan adalah tiga tahun anggaran, yaitu dimulai pada Tahun Anggaran 2017 dan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2019.

6.3. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain.

Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah Kabupaten melalui BPBD provinsi

As. Pen. & Kesra	0	FD Terkait
Kabag Hukum	4	

dan BPBD Kabupaten mengacu pada rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan.

6.4. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir dan Tanah Longsor, Pemerintah Kabupaten harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lengkap kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

R **BUPATI PACITAN** ✓



f **INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
stn	<i>f</i>
Pemrakasa	<i>b</i>
Perkalt	